

**ANALISIS EGALITARIANISME KEBUDAYAAN PANDALUNGAN DI
WILAYAH LUMAJANG JAWA TIMUR**

Studi Kasus Tradisi Sandingan Malam Jumat Legi

SKRIPSI

Disusun Untuk Melengkapi Syarat-Syarat Mencapai Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Dalam Bidang Sejarah Peradaban Islam (S.Hum)



Oleh:

Nama : MUHAMMAD ZA'IM ZACKY FADL-LILLAH

NIM : 20220130

**PROGRAM STUDI SEJARAH PERADABAN ISLAM
FAKULTAS ISLAM NUSANTARA
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA INDONESIA**

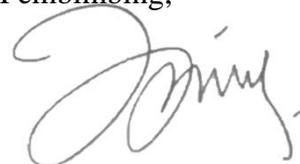
2024

PERSETUJUAN

PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “ANALISIS EGALITARIANISME KEBUDAYAAN PANDALUNGAN DI WILAYAH LUMAJANG JAWA TIMUR Studi Kasus Tradisi Sandingan Malam Jum’at Legi” yang disusun oleh Muhammad Za’im Zacky fadl-Lillah (2022013) telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan ke sidang Skripsi.

Jakarta, 14 Oktober 2023
Pembimbing,



Alanuari, M.A.
NIDN: 0312089101

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Analisis Egalitarianisme Kebudayaan Pandalungan di Kabupaten Lumajang Jawa Timur (Studi Kasus Tradisi *Sandingan Malam Jum’at Legi*)” yang disusun oleh Muhammad Za’im Zacky Fadl-Lillah (2022013) telah diujikan dalam sidang skripsi pada hari Selasa, tanggal 27 Mei 2024 yang diselenggarakan oleh Program Studi Sejarah Peradaban Islam Universitas Nahdlatul Ulama Indoensia Jakarta, dan telah direvisi sesuai saran tim penguji. Maka skripsi tersebut telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Humaniora (S.Hum)

Jakarta, 27 Mei 2024

Dekan,



Dr. Ahmad Su’adi, M.Hum

TIM PENGUJI:

1. Dr. Ayatullah, M.Ud, MA.
(Penguji 1)
2. Fuadul Umam, M.Hum.
(Penguji 2)


31/05-2024.

31/05
24

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah

Nama : MUHAMMAD ZA'IM ZACKY FADL-LILLAH

NIM : 2022013

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Analisis Egalitarianisme Kebudayaan Pandalungan di Kabupaten Lumajang Jawa Timur (Studi Kasus Tradisi Sandingan Malam Jum’at Legi)” adalah hasil karya asli penulis, bukan hasil plagiasi, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya atau atas petunjuk pada pembimbing. Jika di kemudian hari pernyataan ini terbukti tidak benar, maka sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab penulis dan bersedia gelar akademiknya dibatalkan sesuai dengan peraturan.

Jakarta, 27 Mei 2024



M Za'im Zacky F
2022013

KATA PENGANTAR

Segala puji tertuju kepada Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Pencipta semesta alam, yang telah memberikan karunia dan petunjuk-Nya sehingga penulis berhasil menyelesaikan tugas akhir dalam bentuk skripsi ini dengan sukses. *Shalawat* dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, utusan Allah yang mengemban risalah Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam.

Skripsi ini disusun sebagai persyaratan untuk meraih gelar Sarjana Strata Satu (S-1) dalam program studi Sejarah Peradaban Islam di Fakultas Islam Nusantara Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta. Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada semua yang telah membantu dalam penyusunan tesis ini.

Pertama-tama penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua, Ibu dan alm. Bapak, yang dengan seluruh perjuangan, do'a serta restunya dapat mengantarkan penulis pada jenjang pendidikan strata satu. Tiada balasan yang terkira selain bentuk bakti kepada orang tua dan semoga senantiasa rahmat Allah SWT senantiasa memberkasih keduanya.

Selanjutnya, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Alanuari, M.A., atas bimbingan, panduan, dan masukan berharga yang telah diberikan dalam proses penyusunan skripsi ini. Tanpa bimbingan dan dukungan beliau, skripsi ini tidak akan pernah terselesaikan. Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua dosen pengajar di program studi Sejarah Peradaban Islam di Fakultas Islam Nusantara atas ilmu yang telah diberikan selama masa studi. Dan juga kepada seluruh teman-teman mahasiswa prodi Sejarah Peradaban Islam angkatan 2020 yang dengan mereka telah mengukir kisah bersama, segala suka dan duka yang kita lalui bersama telah menjadi kenangan yang berharga.

Memasuki akhir tulisan, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki ruang untuk diperbaiki. Oleh karena itu, penulis mengundang pembaca untuk memberikan kritik dan saran yang membangun, demi meningkatkan kualitasnya di masa depan. Harapannya, skripsi ini dapat memberikan manfaat dan berkontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam konteks sejarah peradaban Islam. Semoga Allah senantiasa memberkahi langkah kita dalam meniti jalan kebenaran. Aamiin.

Jakarta, 27 Mei 2024

M Zaim Zacky F

2022013

ABSTRACT

MUHAMMAD ZA'IM ZACKY FADL-LILLAH, *Analysis of Egalitarianism in Pandalungan Culture in the Lumajang Regency of East Java*. Thesis. Jakarta: Islamic Civilization History Study Program, Faculty of Islam Nusantara, University of Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia) Jakarta, 2024.

This research aims to (1) Uncover the historical traces of Pandalungan culture as the historical foundation for the formation of Pandalungan traditions and culture, (2) Obtain facts about the social and geographical conditions of the Pandalungan culture community in Lumajang Regency, (3) Explain the various principles of egalitarianism in Pandalungan culture, and (4) Identify the forms of Islam Nusantara traditions in Pandalungan culture.

The method used in this research are qualitative with a participatory ethnographic approach. Data collection techniques include observation, interviews, document studies, and documentation. The data analysis technique used in this research is the inductive analysis technique, which includes data collection, data reduction, data presentation, and conclusion drawing.

The conclusions of this research are: (1) Pandalungan culture was formed from the meeting of Javanese and Madurese cultures due to migration from Madura to Java, occurring in three phases: first, Singosari-Majapahit (11th-13th century), second, Mataram Islam (16th-18th century), and third, Colonialism (18th-19th century). The main motive for migration was economic factors and seeking better fortune. (2) The agrarian geographical condition of the Lumajang area makes agriculture the predominant profession among its people. This influences the social characteristics of the Pandalungan community, who live in simplicity, tolerance, and harmony. (3) Social traditions and practices such as *sandingan malam jum'at legi* demonstrate the implementation of egalitarian principles in everyday life. (4) Pandalungan culture adheres to strong principles of egalitarianism, such as the strong role of civil society, appreciation for differing opinions, and emphasis on justice, equality, and fraternity. (5) The integration of local wisdom with Islam Nusantara values strengthens egalitarian values, as reflected in Pandalungan traditions such as *sandingan malam jum'at legi*.

Keywords: Culture, Pandalungan, Egalitarianism, Islam Nusantara.

ABSTRAK

MUHAMMAD ZA'IM ZACKY FADL-LILLAH, *Analisis Egalitarianisme Kebudayaan Pandalungan di Wilayah Lumajang Jawa Timur*. Skripsi. Jakarta: Program Studi Sejarah Peradaban Islam Fakultas Islam Nusantara, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia) Jakarta, 2024.

Penelitian ini bertujuan untuk (1) Menemukan jejak sejarah kebudayaan Pandalungan sebagai landasan historis terbentuknya tradisi dan budaya Pandalungan (2) Mendapatkan fakta kondisi sosial dan geografis masyarakat kebudayaan Pandalungan Kabupaten Lumajang (3) Menjelaskan berbagai prinsip-prinsip egalitarianisme kebudayaan Pandalungan (4) Mengetahui bentuk tradisi kebudayaan Islam Nusantara pada kebudayaan Pandalungan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif pendekatan etnografis partisipatif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, studi dokumen dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan teknik analisis induktif, yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Simpulan penelitian ini adalah: (1) Kebudayaan Pandalungan terbentuk dari pertemuan budaya Jawa dan Madura yang disebabkan adanya faktor migrasi dari Madura ke Jawa, terjadi pada tiga fase; pertama Singosari-Majapahit (11-13 M), kedua Mataram Islam (16-18 M), ketiga Kolonialisme (18-19 M). Motif utama migrasi adalah faktor ekonomi dan mencari peruntungan untuk kehidupan yang lebih baik. (2) Kondisi geografis wilayah Lumajang yang agraris, menjadikan profesi masyarakatnya mayoritas dalam bidang pertanian, hal tersebut mempengaruhi karakteristik sosial masyarakat Pandalungan, yang hidup dalam kesederhanaan, toleransi, dan harmonis. (3) Tradisi dan praktik sosial seperti *sandingan malam jum'at legi* menunjukkan implementasi prinsip egalitarianisme dalam kehidupan sehari-hari. (4) Kebudayaan Pandalungan menganut prinsip egalitarianisme yang kuat, seperti peran masyarakat sipil yang kuat, penghargaan terhadap perbedaan pendapat, dan penekanan pada keadilan, persamaan dan persaudaraan. (5) Integrasi kearifan lokal dengan nilai Islam Nusantara memperkuat nilai-nilai egalitarianisme, tercermin dalam tradisi Pandalungan seperti *sandingan malam jum'at legi*.

Kata Kunci: Kebudayaan, Pandalungan, Egalitarianisme, Islam Nusantara.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRACT	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Penelitian	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Pertanyaan Penelitian	8
1.4. Batasan Masalah Penelitian.....	9
1.5. Tujuan Penelitian.....	10
1.6. Manfaat Penelitian.....	10
1.7. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II KAJIAN TEORI	15
2.1. Kerangka Teori	15
2.2. Kerangka Pemikiran	41
2.3. Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	44
BAB III METODE PENELITIAN	47
3.1. Jenis Penelitian	47
3.2. Waktu dan Lokasi Penelitian	48
3.3. Sumber Data	48
3.4. Teknik Pengumpulan Data	50
3.5. Kisi-Kisi Instrumen Penelitian	50
3.6. Teknik Analisis Data	52
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL	56
4.1. Jejak Sejarah Kebudayaan Pandalungan	56
4.2. Kondisi Sosial dan Geografi Kebudayaan Pandalungan di Lumajang ..	72

4.3. Prinsip Egalitarianisme Kebudayaan Pandalungan.....	85
4.4. Tradisi <i>Sandingan Malam Jum'at Legi</i> sebagai Tradisi Islam Nusantara dalam Kebudayaan Pandalungan	92
BAB V PENUTUP	106
5.1. Kesimpulan.....	106
5.2. Saran.....	107
DAFTAR PUSTAKA	108
<i>Lampiran</i>	111

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	44
------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya, hal ini terlihat dari tradisi, budaya, dan kearifan lokal yang dimiliki masyarakatnya. Kekayaan budaya tersebut diciptakan dan dimanfaatkan untuk meningkatkan karakter, memperkuat jati diri bangsa, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) pada tahun 2022 (Direktorat Pelindung Kebudayaan, 2022) terdapat 1728 Warisan Budaya Takbenda (WBTb) yang terdiri dari 5 domain yaitu; Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, Perayaan-Perayaan, Kemahiran dan Kerajinan Tradisional, Pengetahuan dan Kebiasaan Perilaku Mengenai Alam Semesta, Seni Pertunjukan, Tradisi Lisan dan Ekspresi.

Warisan Budaya Takbenda (WBTb) atau *Intangible culture heritage* adalah berbagai praktik, representasi, ekspresi, pengetahuan keterampilan, instrumen, obyek, artefak, dan ruang-ruang budaya terkait yang diwariskan secara turun-temurun, dari generasi ke generasi, sehingga menciptakan suatu kebudayaan yang memberikan rasa identitas yang berkelanjutan dan ragam kreatifitas manusia (Sedyawati, 2018). Jumlah budaya takbenda yang tercatat tersebut pada umumnya mencakup beragam latar belakang identitas dan sebagainya. Ragam latar belakang yang identik dengan pluralitas tersebut dalam masyarakat terdiri dari agama, suku, budaya, bahasa dan lain sebagainya. Sehingga kehidupan masyarakat Indonesia

sebagai makhluk sosial dan masyarakat yang majemuk selalu identik dengan budaya, baik budaya dalam pengertian konteks terbatas maupun yang lebih luas.

Koentjaraningrat dalam bukunya Pengantar Ilmu Antropologi menjelaskan, bahwa kata “budaya” berasal dari bahasa Sansekerta, *buddhayah*, yaitu bentuk jamak dari *buddhi* yang berarti budi atau akal. Dengan demikian kebudayaan dapat diartikan sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan akal. Kata “budaya” adalah budi dan daya yang berupa cipta, karsa dan rasa. Sedangkan “kebudayaan” adalah hasil dari cipta, karsa dan rasa. Dalam istilah “antropologi-budaya”, perbedaan itu ditiadakan. Kata “budaya” di sini hanya dipakai sebagai suatu singkatan saja dari “kebudayaan” dengan arti yang sama. Isi pokok dari kebudayaan di dunia adalah bahasa, sistem pengetahuan, organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi dan kesenian (Paparang & Pasande, 2019).

Menurut Ralph Linton seorang profesor Antropolog di Universitas Columbia, New York, Amerika Serikat, secara luas mendefinisikan kebudayaan sebagai sebuah cara kehidupan dari masyarakat mana pun dan tidak hanya mengenai sebagian dari cara hidup itu yaitu bagian yang oleh masyarakat dianggap lebih tinggi atau lebih diinginkan. Bagi seorang ahli ilmu sosial, tidak ada masyarakat atau perorangan yang tidak berkebudayaan; tiap masyarakat memiliki kebudayaan, bagaimana pun sederhananya kebudayaan itu dan setiap manusia adalah makhluk berbudaya, dalam arti mengambil bagian dalam sesuatu kebudayaan (Paparang & Pasande, 2019). Ralph Linton berusaha menjelaskan bahwasannya tindakan-tindakan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dan

kemudian, lambat laun tindakan-tindakan diambil dan diputuskan untuk dilakukan secara berkelanjutan sehingga menjadi sesuatu yang dinamakan kebudayaan.

Beberapa definisi kebudayaan tersebut bertujuan untuk menunjukkan berbagai aspek dari kebudayaan, seperti: sifat manusia yang terus berkembang, kebudayaan sebagai bagian dari sistem sosial. Keragaman di Indonesia, termasuk berbagai etnis dengan adat istiadatnya, beragam agama dan kepercayaan, serta perbedaan geografis, menciptakan beragam geografi kebudayaan.

Kebudayaan menjadi sebuah simpul dari ikatan relasi antar manusia yang menjadikan ciri khas dalam kehidupannya. Manusia yang berbudaya tidak bisa luput dari aktifitas sosial yang dalam hal tersebut relasi antara kebudayaan pasti terjadi, seperti contoh adanya sebuah interaksi antara dua orang yang memiliki latar kebudayaan yang berbeda, sehingga menghasilkan sebuah akulturasi kebudayaan baru yang tercipta akibat dari adanya sebuah interaksi tersebut. Diatas telah dijelaskan bahwasannya ciri khas kebudayaan dapat ditemukan dari adanya perbedaan suatu bahasa atau bahkan perbedaan letak geografis suatu daerah. Dari adanya berbagai persinggungan dari latar belakang budaya yang berbeda tersebut menghasilkan sebuah kebudayaan-kebudayaan baru yang akan terjadi secara terus-menerus sehingga menjadi sebuah kebudayaan yang dikenal berada di lingkungan sekitar kita.

Kebudayaan merupakan unsur penting dalam proses pembangunan suatu bangsa (Habib & Nasional, n.d.). Ciri khas suatu bangsa dapat dikenali melalui karakteristik tertentu. Sebagai contoh, bangsa Indonesia dikenal dengan sifat ramah, suka berbasa-basi, dan menghargai nilai kebersamaan kolektivitas seperti

keluarga, klan, suku, dan bangsa. Identitas bangsa Indonesia yang tercermin dalam karakteristik tersebut menandakan ciri khasnya dari bangsa-bangsa lain terutama negara-negara barat yang cenderung memiliki budaya individualis bersifat otonom (Ammaria, 2017).

Salah satu kekayaan budaya di Indonesia adalah keberadaan kebudayaan Pandalungan. Secara budaya, Pandalungan mengacu pada komunitas hibrida, di mana masyarakat telah mengalami pengaruh dari dua budaya utama, yaitu budaya Jawa dan Madura. Daerah kebudayaan Pandalungan merujuk pada area di sepanjang pantai utara dan timur Provinsi Jawa Timur, di mana mayoritas penduduknya memiliki latar belakang budaya Madura. Dalam konteks wilayah "tapal kuda" Jawa Timur, kebudayaan Pandalungan mencerminkan perpaduan antara budaya Jawa dan Madura. Pada umumnya orang-orang Pandalungan bertempat tinggal di daerah perkotaan yang secara administratif, kawasan kebudayaan Pandalungan meliputi Kabupaten Pasuruan, Probolinggo, Situbondo, Bondowoso, Jember, dan Lumajang (Sutarto, 2006).

Konsep budaya hibrida atau *cultural hybridity* mulai di terapkan (walau istilah tersebut tidak selalu digunakan) dalam disiplin ilmu, khususnya sosiologi, antropologi dan sejarah pada awal abad ke-20 (Ackermann, 2012). Beberapa antropolog dan sosiolog pada masa itu mulai menggunakan istilah "hibriditas" akibat dari peristiwa sosial politik yang tidak kondusif di barat seperti; Robert Ezra Park (1864–1944), salah satu pendiri sosiologi di Chicago, menggunakan istilah hibriditas pada tahun 1920-an untuk merujuk pada masuknya imigran secara besar-besaran dari Eropa. Kemudian Georg Simmel (1858–1918) menulis

tentang penggambaran orang Yahudi yang dibebaskan dari pengasingan, dan Alfred Schutz (1899–1959) yang menggambarkan para migran sebagai “manusia marginal” atau wujud “persilangan budaya (*cultural hybrids*)”.

Secara historis terbentuknya masyarakat hibrida antara budaya Jawa dan Madura dalam catatan Agus Sunyoto dikatakan bahwasanya pada akhir abad ke 12 masehi Arya Wiraraja yang merupakan *demung* (kepala rumah tangga) kerajaan Tumapel (Singosari) diasingkan oleh raja Kertanegara akibat perbedaan visi dan misi dalam usahanya mempersatukan Nusantara dan menyebarkan ajaran Tanta-Bhirawa. Perbedaan visi tersebut menurut Agus Sunyoto akibat adanya sentimen lama antara agama Tantrayana sekte Tantra-Bhirawa dengan ajaran agama Islam, sehingga Arya Wiraraja yang merupakan penganut ajaran Islam diasingkan menjadi Adipati Madura (Sunyoto, 2020).

Jatuhnya kekuasaan Sri Kertanegara sebagai raja Singasari akibat penyerangan yang dilakukan oleh Jayakatwang yang merupakan adik iparnya menjadikan peluang Arya Wiraraja untuk kembali ke tanah Jawa untuk mendapatkan kembali hak dan takhta kerajaan *Lamajang* Tigang Juru (Lumajang kuno). Sehingga kembalinya Arya Wiraraja ke tanah Jawa beserta para pengikut setianya dari Madura tersebut menjadi salah satu bukti migrasi masyarakat Madura ke tanah Jawa khususnya kabupaten Lumajang dan sekitarnya yang di kemudian hari melahirkan kebudayaan hibrida antara kebudayaan Jawa dan Madura yang juga di kenal sebagai pandalungan (Sunyoto, 2020).

Dari segi geopolitik dan sosio-kultural, komunitas Pandalungan merupakan bagian dari masyarakat yang tinggal di daerah yang disebut sebagai

tapal kuda. Tapal kuda merujuk pada wilayah di Provinsi Jawa Timur yang memiliki bentuk seperti tapal kaki kuda atau lekukan yang mirip dengan sepatu kuda. Pada masa Hindia-Belanda wilayah tapal kuda dikenal sebagai wilayah Karesidenan Besuki, dikenal sebagai salah satu tempat yang memiliki peluang dan hasil terkemuka dalam sektor pertanian pada era prakolonial. Adanya potensi dan hasil yang bagus dalam bidang pertanian menjadikan Karesidenan Besuki pada masa kekuasaan Belanda diintegrasikan dalam pembukaan perkebunan-perkebunan kolonial yang dikelola oleh negara atau *Cultuurstelsel* (Nawiyanto, 2012). Selain potensi pertanian, wilayah ini memiliki ciri sosial khas dan telah lama menjadi basis bagi Islam kultural dan juga kaum abangan. Islam kultural didorong oleh para kiai dan ulama, sementara kaum abangan dipimpin oleh figur politik dan anggota penganut aliran kepercayaan (Geertz, 2013).

Pembahasan konsep egalitarianisme dalam kebudayaan Pandalungan secara general belum di bahas dalam tulisan atau kajian kebudayaan terdahulu. Egalitarianisme berasal dari kata egaliter yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti bersifat sama atau sederajat (KBBI VI, 2023). Egalitarian bisa disebut sebagai salah satu elemen dari masyarakat madani, juga merupakan suatu sifat bagi individu yang ditunjukkan melalui perilaku dan keyakinan tentang adanya sebuah persamaan derajat manusia (Subahri et al., 2022). Jika kita melihat masyarakat sebagai kelompok beberapa individu, maka masyarakat yang egaliter adalah sebuah sistem sosial yang menunjukkan prinsip dan komitmen bahwa setiap individu memiliki hak yang sama dalam segala hal, termasuk mendapatkan kesejahteraan hidup dan kesempatan yang setara dalam semua aspek.

Tulisan, buku, dan kajian tentang masyarakat Pandalungan masih sangat terbatas. Pada karya tulis dan penelitian terdahulu menjelaskan seputar peristiwa-peristiwa sosial-politik yang berada di kawasan Pandalungan seperti; pengaruh budaya Pandalungan terhadap bentuk penyajian berbagai kesenian, pengaruh Pandalungan terhadap nilai-nilai kearifan lokal, karakteristik praktek keagamaan, konsep perekonomian, kajian filosofis dalam pertanian, konsep egalitarianisme terhadap dunia pendidikan dan sebagainya (Subahri et al., 2022).

Sehingga penelitian ini akan menganalisa dan mendeskripsikan secara komprehensif mengenai konsep kebudayaan Pandalungan beserta nilai-nilai egalitarianismenya yang tertanam dalam setiap aspek kebudayaan yang dipraktikkan oleh masyarakat Pandalungan dan menjadi ciri khas kebudayaan masyarakat Jawa Timur bagian timur (tapal kuda). Wilayah Pandalungan yang menunjukkan tanda-tanda hibrida budaya terletak di pantai utara dan timur Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini menekankan Kabupaten Lumajang sebagai fokus utama, karena wilayah ini berada dalam wilayah eks-Karesidenan Besuki yang merupakan pusat budaya Pandalungan. Secara umum, penduduk Pandalungan terlibat dalam sektor pertanian, perkebunan, perdagangan informal, dan pelayanan publik. (Sutarto, 2006).

Penelitian ini akan melibatkan studi kasus tradisi *Sandingan Malam Jum'at Legi* pada masyarakat Pandalungan wilayah kabupaten Lumajang untuk mengeksplorasi praktik egalitarianisme yang ada dalam kehidupan sehari-hari mereka seperti; kegiatan sosial kemasyarakatan, praktek keagamaan (sebagai bentuk akulturasi agama dengan budaya), kesenian, pendidikan dan sebagainya.

Sehingga penulis berusaha menemukan identitas unik yang menjadi bukti-bukti adanya sebuah keragaman budaya terutama konsep egalitarianisme yang tercermin dalam kehidupan masyarakat Pandalungan seperti egalitarianisme dalam tradisi *Sandingan Malam Jum'at Legi* dan sebagainya. Serta adanya unsur hibrida kebudayaan tidak menjadi halangan akan terbentuknya sebuah kebiasaan-kebiasaan baru yang kemudian membudaya dan menjadi ciri khas suatu daerah pada daerah Lumajang sebagai basis kebudayaan Pandalungan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti mengidentifikasi beberapa permasalahan yang dirumuskan seperti berikut ini:

- 1.2.1. Terbatasnya kajian kesejarahan mengenai kebudayaan Pandalungan.
- 1.2.2. Walaupun telah ada praktek egalitarianisme, tetapi kajian ilmiah yang mengeksplorasi prinsip egalitarianisme di kebudayaan Pandalungan masih sangat terbatas.
- 1.2.3. Terdapat beberapa tradisi lokal yang mencerminkan budaya Islam Nusantara di kebudayaan Pandalungan yang perlu di eksplorasi sebagai bentuk warisan budaya tak benda.

1.3. Pertanyaan Penelitian

- 1.3.1. Bagaimana sejarah dan perkembangan kebudayaan Pandalungan dan karakteristik masyarakat Pandalungan di wilayah Lumajang?

1.3.2. Bagaimana prinsip-prinsip egalitarianisme tercermin dari kebudayaan Pandalungan melalui tradisi sandingan malam jumat di wilayah Lumajang Jawa Timur?

1.4. Batasan Masalah Penelitian

Batasan masalah pada judul penelitian “Analisis Nilai-Nilai Egalitarianisme pada Kebudayaan Pandalungan di Wilayah Lumajang Jawa Timur” sebagai berikut;

1.4.1. Lokasi Geografis: Penelitian ini akan berfokus secara khusus pada kebudayaan Pandalungan di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Wilayah-wilayah lain di luar kabupaten Lumajang tidak akan menjadi bagian dari penelitian ini.

1.4.2. Aspek Kebudayaan: Penelitian akan membatasi diri pada elemen-elemen budaya tertentu yang terkait dengan egalitarianisme, seperti sistem sosial, nilai-nilai, tradisi, dan praktik budaya.

1.4.3. Partisipan: Penelitian akan memfokuskan pada pandangan, pengalaman, dan perspektif masyarakat Pandalungan yang tinggal di Lumajang, dengan mengecualikan pandangan masyarakat di luar wilayah Lumajang.

1.4.4. Konsep Egalitarianisme: Penggunaan konsep egalitarianisme akan dibatasi pada pemahaman dan konsepsi yang relevan dalam konteks kebudayaan Pandalungan di Lumajang. Konsep egalitarianisme di luar kerangka kebudayaan ini mungkin tidak akan digunakan dalam analisa penelitian.

1.4.5. Sumber Data: Penelitian akan membatasi sumber data pada wawancara, observasi, dokumentasi, atau sumber-sumber primer lainnya yang relevan dengan kebudayaan Pandalungan di Lumajang.

1.5. Tujuan Penelitian

1.5.1. Menemukan jejak sejarah kebudayaan Pandalungan sebagai landasan historis terbentuknya kebudayaan Pandalungan.

1.5.2. Menjelaskan berbagai prinsip-prinsip egalitarianisme yang ada dalam kebudayaan Pandalungan.

1.5.3. Mengetahui bentuk tradisi kebudayaan Islam Nusantara pada kebudayaan Pandalungan.

1.5.4. Mendapatkan fakta tentang kondisi sosial dan budaya yang mempengaruhi eksistensi egalitarianisme dalam kebudayaan Pandalungan di Lumajang Jawa Timur pada masa kini.

1.6. Manfaat Penelitian

Penelitian tentang analisis egalitarianisme kebudayaan Pandalungan di wilayah Lumajang, Jawa Timur memiliki manfaat teoritis dan praktis yang signifikan. Berikut adalah beberapa manfaat dari penelitian tersebut:

1.6.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini akan membantu memperdalam pemahaman tentang kebudayaan Pandalungan dan bagaimana konsep egalitarianisme tercermin dalam kebudayaan tersebut, serta dapat berkontribusi pada literatur antropologi budaya dan penelitian tentang budaya lainnya. Kemudian penelitian ini dapat memberikan wawasan baru dalam pengembangan teori

egalitarianisme dalam konteks budaya yang spesifik, hal ini dapat membantu memperkaya wacana akademik tentang kesetaraan sosial dalam beragam kebudayaan. Penelitian ini dapat mengidentifikasi perubahan budaya seiring berjalannya waktu dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Harapannya dapat memberikan kontribusi pada pemahaman dinamika budaya dan adaptasi terhadap perubahan lingkungan eksternal.

1.6.2. Manfaat Terhadap Program Studi Sejarah Peradaban Islam

Penelitian ini memungkinkan integrasi antara studi sejarah dengan studi kebudayaan dan antropologi budaya, hal ini akan membantu program studi Sejarah Kebudayaan Islam untuk melihat keterkaitan antara berbagai disiplin ilmu dalam memahami kompleksitas sejarah dan budaya. Penelitian ini juga akan memberikan wawasan yang lebih dalam tentang kebudayaan lokal di wilayah Lumajang, Jawa Timur, khususnya dalam konteks kehidupan sehari-hari masyarakat Pandalungan. Hal tersebut penting untuk memperkaya pemahaman tentang beragam budaya yang ada di Indonesia, termasuk kaitannya dengan aspek-aspek sosial, ekonomi dan agama.

Penelitian ini juga dapat membantu memahami bagaimana Islam menyebar dan diadopsi dalam konteks lokal di Indonesia. Hal tersebut akan memperkaya pemahaman tentang dinamika sejarah Islam di Indonesia yang pada gilirannya dapat memperkuat keterampilan dalam menganalisis peradaban Islam secara lebih holistik.

1.6.3. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan penting bagi pemerintah lokal dan organisasi non-pemerintahan untuk mengembangkan kebijakan yang mendukung dan melestarikan kebudayaan Pandalungan dan prinsip-prinsip egalitarianisme yang terkandung didalamnya. Penelitian ini juga dapat membantu dalam upaya pelestarian dan pendokumentasian Warisan Budaya Tak benda (WBTb) yang dalam hal ini adalah kebudayaan Pandalungan. Hal ini dalam menjadi sumber informasi berharga bagi upaya pemeliharaan budaya tradisional.

Dengan memahami lebih dalam tentang kebudayaan Pandalungan, penelitian ini dapat membantu masyarakat atau komunitas lokal dalam mengenali kekuatan dan kelemahan mereka serta mempromosikan aspek-aspek positif egalitarianisme dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian penelitian ini juga dapat memfasilitasi dialog dan pemahaman yang lebih baik antara kebudayaan Pandalungan dengan budaya-budaya lainnya, serta dapat membuka peluang untuk kolaborasi dan pertukaran antar budaya yang positif.

Pada akhirnya secara praktis hasil dari penelitian ini berguna untuk mengedukasi masyarakat, baik di dalam maupun di luar komunitas kebudayaan Pandalungan, tentang budaya mereka dan prinsip-prinsip egalitarianisme yang sangat mungkin dapat bermanfaat untuk mempromosikan toleransi dan pemahaman antar budaya. Secara keseluruhan penelitian ini memiliki manfaat yang luas, baik dalam hal

memperkaya pemahaman akademik maupun dalam hal pengaruhnya pada kebijakan dan kehidupan sehari-hari masyarakat Pandalungan di Lumajang, Jawa Timur dan masyarakat yang lebih luas.

1.7. Sistematika Penulisan

Untuk mencapai penyajian skripsi yang terstruktur dan mudah dipahami, penelitian ini disusun dalam lima bab yang mengikuti sistematika pembahasan sebagai berikut:

1.7.1. BAB I (PENDAHULUAN): Latar belakang penelitian memberikan gambaran mengenai konteks dan situasi yang melatar belakangi topik yang akan diteliti. Dalam konteks penelitian tentang egalitarianisme kebudayaan Pandalungan di wilayah Lumajang, Jawa Timur, latar belakang akan menjelaskan apa itu kebudayaan Pandalungan dan mengapa tradisi Sandingan Malam Jum'at Legi dipilih sebagai fokus studi. Ini membantu pembaca memahami dasar-dasar budaya yang akan dieksplorasi. Penting juga untuk mengidentifikasi masalah yang ada dalam penelitian. Misalnya, apakah ada ketidaksetaraan dalam praktik budaya Sandingan Malam Jum'at Legi? Bagaimana dinamika sosial dan budaya di Lumajang memengaruhi egalitarianisme? Mengidentifikasi permasalahan ini membantu membangun argumen mengapa penelitian ini perlu dilakukan.

1.7.2. BAB II (KAJIAN TEORI): Pada bab ini memungkinkan peneliti untuk menyajikan teori-teori yang relevan yang akan digunakan dalam penelitian. Dalam hal ini, teori tentang konsep egalitarianisme, teori hibrida budaya, dan konsep Islam Nusantara yang bisa diuraikan untuk

memberikan pemahaman mendalam tentang landasan teoritis yang digunakan beserta berdarkan tinjauan-tinjauan penelitian terdahulu.

1.7.3. BAB III (METODE PENELITIAN): Pada bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, waktu dan lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, kisi-kisi instrumen penelitian, dan teknik analisis data yang akan digunakan dalam penyusunan penelitian.

1.7.4. BAB IV (HASIL DAN PEMBAHASAN): Pada bab ini akan memaparkan hasil dari observasi penelitian yang diuraikan dalam beberapa pembahasan seperti: Jejak Sejarah Pandalungan, Kondisi Sosial dan Geografi Kebudayaan Pandalungan di Lumajang, Prinsip Egalitarianisme Kebudayaan Pandalungan, Tradisi Sandigan Malam Jum'at Legi sebagai Tradisi Islam Nusantara dalam Kebudayaan Pandalungan.

1.7.5. BAB V (PENUTUP): Pada bab ini menguraikan hasil kesimpulan penelitian beserta saran yang akan digunakan oleh penyusun.

1.7.6. Bagian Akhir: Berisi tentang daftar pustaka dan lampiran

BAB II

KAJIAN TEORI

2.1. Kerangka Teori

Penelitian dilakukan karena adanya masalah yang signifikan dan mendesak yang memerlukan solusi. Untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan data yang akurat agar dapat menemukan solusi yang efektif dan efisien. Oleh karena itu, kajian teori diperlukan sebagai langkah awal untuk menghubungkan masalah yang ada dengan data yang diperlukan, sehingga dapat mengungkap fakta yang sebenarnya. Menurut Siswoyo (1995) mengenai kajian teori mengungkapkan bahwa “teori dapat diartikan sebagai seperangkat konsep dan definisi yang saling berhubungan yang mencerminkan suatu pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menerangkan hubungan antara variabel, dengan tujuan untuk menerangkan dan meramalkan suatu fenomena” (Tjetjep Samsuri, 2003). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa teori merupakan pandangan yang telah terbukti kebenarannya melalui pengujian empiris dan menjadi landasan utama secara umum. Oleh karena itu, peneliti perlu mencari teori-teori atau prinsip-prinsip yang sesuai dengan masalah yang sedang mereka teliti saat menyusun penelitian mereka.

2.1.1. Tinjauan Konsep Egalitarianisme

Arus globalisasi secara masif menjadi ajang persilangan antar ilmu pengetahuan dan pertukaran kebudayaan atau kelompok yang bukan hanya sekedar menciptakan sebuah kebiasaan-kebiasaan baru bagi masyarakat dunia, namun juga berbagai permasalahan baru yang timbul dari adanya sebuah

perbedaan. Globalisasi adalah kemajuan peradaban yang memungkinkan setiap individu untuk berpindah dan berhubungan dengan orang lain tanpa terhalang oleh batasan geografis atau sektarianisme primordial yang merupakan diskriminasi atau kebencian yang timbul karena perbedaan antara kelompok yang diakibatkan adanya sebuah kepentingan kelompok tertentu (Musa & others, 2015).

Di masa lampau, seseorang hanya dapat berinteraksi dengan kelompok sejenisnya yang memiliki kesamaan. Oleh karena globalisasi, saat ini interaksi antara individu dari komunitas atau kelompok yang berbeda dapat terjadi, sehingga faktor latar belakang primordial-sektarian tidak lagi begitu berpengaruh. Dalam era globalisasi, dorongan untuk kesetaraan antar-manusia di seluruh dunia meningkat, tanpa memandang identitas primordial masing-masing individu. Pandangan bahwa satu kelompok memiliki status yang lebih tinggi daripada kelompok lain dianggap sebagai sesuatu yang ironis. Oleh karena itu, penting untuk memprioritaskan gagasan kesetaraan, atau egalitarianisme, dengan kuat.

Konsep egalitarianisme berkembang seiring dengan perkembangan konsep hak asasi manusia (HAM). Kedua konsep ini dianggap penting dan tidak dapat diabaikan pada masa pasca-Perang Dunia II. Akibat trauma Perang Dunia II, hampir semua penduduk dunia sadar akan pentingnya egalitarianisme, yang kemudian diwujudkan dalam sebuah dokumen tertulis yang sekarang lebih dikenal sebagai *The International Bill of Human Rights* (Falah, 2023).

Egalitarianisme berasal dari kata egaliter yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti bersifat sama atau sederajat (KBBI VI, 2023). Nurcholish Majid menyamakan kata egalitarianisme dengan kata persamaan, yang secara substantif memiliki kesamaan dengan demokrasi (Madjid, 2008). Dalam persepektif Hak Asasi Manusia (HAM), egalitarianisme dapat diinterpretasikan sebagai doktrin atau pandangan yang menyatakan bahwa semua manusia memiliki martabat yang sama, atau sebagai prinsip yang menganggap bahwa berbagai kelas sosial memiliki anggota dengan beragam kemampuan dan juga berbagai variasi di proporsi yang relatif sama (Ritaudin, 2017).

Egalitarian bisa disebut sebagai salah satu elemen dari masyarakat madani, juga merupakan suatu sifat bagi individu yang ditunjukkan melalui perilaku dan keyakinan tentang adanya sebuah persamaan derajat manusia (Subahri et al., 2022). Apabila kita menganggap masyarakat sebagai sekelompok individu, maka masyarakat yang egaliter adalah sistem sosial yang menunjukkan perilaku dan komitmen untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama dalam hal seperti mendapatkan kesejahteraan dan kesempatan yang setara dalam segala aspek.

Persamaan hak dalam egalitarianisme menurut Muhammad Imarah secara rinci menjelaskan bahwasannya konsep persamaan hak yang realistik adalah persamaan manusia di depan hukum, dengan menghilangkan perbedaan tempat kelahiran, warna kulit, keturunan, etnis, dan keyakinan agama. Selanjutnya adalah persamaan dalam memberi kesempatan bagi semua

warga, semua bangsa dan negara dalam kerangka sosial dan negara sekaligus (Imarah, 1998). Dengan adanya kesempatan tersebut, konsep kesetaraan mungkin sulit diwujudkan karena perbedaan dalam penghasilan, pekerjaan, status sosial, agama, warna kulit, etnis, dan lainnya dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan alam.

Perihal egalitarianisme yang secara substantif menurut Nurcholish Majid memiliki kesamaan dengan demokrasi, David Beetham mendefinisikan demokrasi sebagai sebuah cara pengambilan keputusan menyangkut aturan dan kebijakan yang mengikat secara kolektif yang dikenai kontrol oleh rakyat (Beetham, 1992). Pernyataan kunci dalam definisi tersebut yang terkait dengan prinsip egalitarianisme adalah "pengendalian masyarakat dan kesetaraan politik". Dari penjelasan itu, dapat dipahami bahwa demokrasi dapat diterapkan dalam segala kolektivitas dan tidak hanya terbatas pada domain politik yang sempit. Dengan demikian, hubungan antara egalitarianisme dan demokrasi berkaitan dengan memperkuat komitmen bersama dalam urusan politik dengan mengabaikan faktor-faktor primordial yang menghalangi kemanusiaan.

Selain memandang egalitarian dari perspektif hak asasi manusia (HAM), perlu kiranya sebagai bukti luasnya konteks egalitarianisme yang dapat ditinjau dari segala aspek dilihat dari sudut pandang Islam terutama Islam Nusantara sebagai salah satu konsep yang dikaji dalam penelitian ini. Dalam perspektif Islam, praktek egalitarianisme sudah dicontohkan sejak zaman Islam era awal yakni pada zaman Rasulullah Muhammad SAW.

Disampaikan oleh Musa ibn ‘Uqbah (Wijaya, 2020), pada masa itu terjadi bencana banjir besar yang melanda Mekkah sehingga mengakibatkan rusaknya dinding Ka’bah. Semua kabilah-kabilah Quraisy bahu-membahu dalam pembangunan Ka’bah untuk merenovasi guna meminimalisir kerusakan yang diakibatkan oleh banjir. Sampai suatu ketika momen renovasi yang hampir selesai, pada saat hendak meletakkan kembali Hajar Aswad, para petinggi kabilah Quraisy masing-masing mengklaim berhak melakukan peletakan batu hitam dari surga tersebut. Diskusi alot yang menimbulkan perselisihan tidak dapat dihindari, bahkan diantara mereka menawarkan solusi perang dan angkat senjata untuk membuktikan kabilah mana yang memiliki hak mulia tersebut.

Pada akhirnya jalan musyawarah kembali ditempuh, yang paling tua diantara mereka yang bernama Abu Umayyah ibn al-Mughirah ibn ‘Abdullah ibn Makhzum memberi masukan, “jadikanlah orang yang pertama kali datang ke tempat pembangunan ini sebagai orang yang memutus masalah yang kalian perselisihkan”. Pada keesokan harinya, rupanya pemuda bernama Muhammad *shallallahu ‘alaihi wassallam* merupakan orang yang pertama kali datang ke area pembangunan. Begitu mengetahui orang yang akan memutuskan permasalahan adalah Muhammad, para petinggi kabilah Quraisy langsung setuju dengan berkata “ini Muhammad seorang pemuda yang jujur, kami ridha kepadanya”.

Ketika mendengar hal tersebut, Muhammad *shallallahu ‘alaihi wassallam* bersabda, “berilah aku sebuah kain”. Setelah itu, Rasul mengambil

Hajar Aswad secara langsung dengan tangannya dan menempatkan batu tersebut di atas kain seraya melanjutkan sabdanya, “silahkan masing-masing kabilah memegang pinggir kain ini dan mengangkatnya secara sama-sama”. Mereka lantas bahu-membahu melaksanakan saran dari Rasul Muhammad *shallallahu ‘alaihi wassallam*. Sesampainya ditempat semula, Hajar Aswad telah kembali ke posisi semula. Sejak saat itu, pembangunan dilanjutkan lagi, dengan setiap kabilah merasa puas dengan keputusan tersebut. (Wijaya, 2020).

Kisah peletakan Hajar Aswad diatas merupakan tauladan egalitarianisme yang diajarkan oleh nabi Muhammad *shallallahu ‘alaihi wassallam* sebelum beliau diangkat menjadi seorang Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wassallam*. Nabi Muhammad *saw* memandang setiap dari kabilah Quraisy memiliki derajat yang sama dan memiliki kesetaraan dalam hak peletakan Hajar Aswad, tidak ada satu kabilah pun yang dianggap paling mulia diantaranya, semua setara dan memiliki hak yang sama dalam peletakan batu mulia peninggalan Nabi Ibrahim AS tersebut. Tauladan egalitarianisme dimasa-masa yang mendatang terus diajarkan, diaplikasikan serta dikembangkan dalam kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara.

Perkembangan peradaban manusia pada era globalisasi seperti saat ini apabila tidak diiringi dengan perkembangan *nass* hukum Islam akan menjadi sebuah polemik. Dapat dipahami bahwa *nass* atau referensi yang dianggap sebagai dasar dalam pembentukan hukum tidak akan bertambah setelah wafatnya Nabi Muhammad *saw*, yang menjadikan ini sebagai tantangan bagi umat Islam untuk menegaskan universalitas ajaran Islam. Karakteristik hukum

Islam ialah *yasluhu li kulli zamanin wa makanin*, yaitu relevan dan layak diterapkan di semua ruang dan waktu (Falah, 2023). Pada akhirnya, hal tersebut mengharuskan para ulama, cendekiawan, dan intelektual Muslim untuk terus mengkaji keselarasan antara perkembangan globalisasi dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Salah satu karya dalam literatur pemikiran Islam yang membahas tentang egalitarianisme, termasuk egalitarianisme di antara Muslim dan non-Muslim, adalah buku *Al-Musawah Al-Insaniyyah Fi Al-Islam Baina An-Nazarriyah Wa At-Tatbiq*, yang ditulis oleh 'Ali Jum'ah.

'Ali Jum'ah adalah seorang guru besar terkemuka dalam bidang ushul fiqh dan tasawwuf. Keahliannya dalam ushul fiqh membuatnya terkenal sebagai seorang intelektual yang kritis terhadap golongan ekstrimis yang memahami teks-teks keagamaan secara teoritis tanpa memperhatikan konteksnya. Konstruksi pemikiran tasawuf 'Ali Jum'ah ialah pengembangan dan pemberdayaan masyarakat harus beradab, konstruktif dan tidak destruktif, karena menurutnya tasawuf memiliki potensi untuk memberikan kontribusi dalam melakukan dekonstruksi ideologi kaum puritan dan ekstremis ('Ali Jum'ah dalam Falah, 2023).

Secara umum, egalitarianisme menurut 'Ali Jum'ah merupakan salah satu prinsip yang sangat utama dalam *maqasid asy-syari'ah* (tujuan-tujuan syari'at). Menurutnya, egalitarianisme memiliki substansi yang sama dengan keadilan (al-adalah). Dalam pandangan 'Ali Jum'ah, kesetaraan, yang dalam konteks ini merujuk pada egalitarianisme, dianggap sebagai manifestasi dari keadilan. Dengan demikian, 'Ali Jum'ah mengemukakan bahwa kesetaraan

dan egalitarianisme merupakan sikap dan pemahaman yang sejalan dengan prinsip proporsionalitas, bukan sekadar tindakan yang tidak disadari. Pernyataan tersebut berdasarkan prinsip tauhid yang diyakini dalam agama Islam, seluruh umat manusia terlepas dari apapun suku, ras, agama, atau apapun unsur sektarian primordial yang dimiliki, merupakan hamba bagi Allah swt. mereka semua di hadapan Allah, memiliki derajat yang sama sebagai makhluk ciptaan-Nya ('Ali Jum'ah dalam Falah, 2023).

Pandangan 'Ali Jum'ah tentang egalitarianisme mencakup beberapa prinsip egalitarian yang berlaku bagi individu Muslim dan non-Muslim. Prinsip-prinsip yang dibahas dalam bukunya, *Al-Musawah Al-Insaniyyah Fi Al-Islam Baina An-Nazarriyah Wa At-Tatbiq*, mencerminkan nilai-nilai egalitarianisme dan berfungsi sebagai petunjuk untuk menilai tindakan-tindakan yang mencerminkannya. Prinsip-prinsip tersebut sebagai berikut (Falah, 2023):

a. Keadilan (*al-'Adalah*)

Keadilan adalah salah satu prinsip inti dalam egalitarianisme yang diusung oleh 'Ali Jum'ah, termasuk dalam konteks yang melibatkan individu Muslim dan non-Muslim. 'Ali Jum'ah menyatakan “*‘wa asy-syarīatu maqāṣidu, wa ahammu al-asas al-latī buniyat ‘alaihā maqāṣidu asy-syarī’ah hiya al-‘adālah wa al-musāwāh baina al-basyar*” ('Ali Jum'ah dalam Falah, 2023), bahwa keadilan (*al-'adalah*) berada dalam posisi yang sejajar dengan egalitarianisme (*al-musawa*) sebagai salah satu asas penting dalam *maqasiq syari'ah*. Kemudian, prinsip dan nilai

keadilan dalam gagasan egalitarianisme, baik dalam masyarakat Muslim maupun non-Muslim, akan menghasilkan beberapa sikap, seperti kesetaraan dalam hak dan tanggung jawab, pemenuhan hak yang seharusnya bagi setiap individu, serta penolakan terhadap diskriminasi.

b. Toleransi (*At-Tasamuh*)

Konsep kesetaraan tidak mengabaikan atau meniadakan perbedaan, sehingga tidak mengharuskan semua individu menjadi sama dalam mencapai tingkat yang setara. Sebaliknya, gagasan kesetaraan (egalitarianisme) yang digagas oleh 'Ali Jum'ah secara umum mengakui bahwa perbedaan adalah bagian dari hukum alam (*sunnatullah*) yang tidak dapat dihapuskan, dihilangkan, atau diabaikan begitu saja. Menurut 'Ali Jum'ah, toleransi terhadap perbedaan dapat dilaksanakan dengan menghormati keberagaman antara individu-individu, serta menghindari penyerangan atau perubahan yang merusak identitas yang berdasarkan ras atau latar belakang sektarian, dengan memaksa semua komunitas manusia untuk disatukan dalam satu bentuk yang sama. Toleransi terhadap perbedaan dan keragaman akan menghasilkan penerapan dan penguatan keadilan yang tidak membeda-bedakan. ('Ali Jum'ah dalam Falah, 2023).

c. Persaudaraan (*Al-Ukhuwah*)

Menurut 'Ali Jum'ah, Paling tidak, ada dua jenis persaudaraan yang dikenal dalam Islam, persaudaraan kemanusiaan (*al-ukhuwwah al-insaniyyah*) dan persaudaraan keimanan (*al-ukhuwwah al-imaniyyah*) ('Ali Jum'ah dalam Falah, 2023). Dua persaudaraan tersebut tidak bisa

dibenturkan, justru harus saling menguatkan satu sama lain. Berdasarkan QS. Al-A'raf: 65 dan 73, dan QS. Hud: 84, ayat-ayat tersebut menjelaskan bahwa Nabi Hud merupakan saudara kaum 'Ad, Nabi Shalih merupakan saudara kaum Samud serta Nabi Syu'aib merupakan saudara kaum Madyan. Maka, 'Ali Jum'ah memahami bahwa Al-Qur'an memberikan dukungan terhadap gagasan bahwa ikatan persaudaraan kemanusiaan tetap relevan, bahkan melintasi perbedaan agama dan kepercayaan, yang mencakup gagasan egalitarianisme baik bagi Muslim maupun non-Muslim.

d. Kebebasan (*Al-Hurriyah*)

Menurut 'Ali Jum'ah, kebebasan adalah esensi dan juga hasil konkret dari prinsip kesetaraan. Salah satu wujud dari kebebasan adalah kebebasan beragama, 'Ali Jum'ah dalam gagasannya menolak beberapa pendapat 'Ulama yang menyatakan bahwa ayat tentang larangan memaksa dalam hal keyakinan telah dihukumi *mansukh* oleh QS. At-taubah: 5 dan 29. 'Ali Jum'ah mengklaim tidak ada satu pun Hadist yang menyatakan bahwa Rasulullah *saw.* pernah memaksa seorangpun untuk memeluk agama Islam. Kemudian 'Ali Jum'ah menolak hukuman yang ditimpakan kepada orang-orang yang murtad karena mencederai egalitarianisme. Menurutnya, hukum yang menghukum orang-orang murtad sebenarnya dipengaruhi oleh hal-hal yang bersifat politis saja ('Ali Jum'ah dalam Falah, 2023).

Pesan-pesan egalitarianisme 'Ali Jum'ah dalam kitabnya tersebut memuat nilai-nilai kesetaraan manusia sebagai makhluk ciptaan Allah *swt*

yang memiliki hak-hak yang sama, hak-hak yang adil, hak-hak untuk mendapatkan kebebasannya tanpa terkungkung oleh paradigma primordial sektarian yang dapat meninggikan tembok pembatas hubungan saudara sesama agama maupaun hubungan sesama manusia. Gagasan ‘Ali Jum’ah tersebut membuktikan universalitas hukum Islam yang tidak terbatas oleh zaman tertentu, sesuai karakternya yaitu *yaşluhu li kulli zamānin wa makānin*, relevan dan layak untuk diterapkan di semua ruang dan waktu.

Nilai-nilai egalitarianisme dalam Islam tidak berhenti pada gagasan ‘Ali Jum’ah saja. Menurut Zainul Milal Bizawie, para ulama Nusantara jauh sebelum itu telah menggagas konsep egalitarianisme yang diterapkan dalam wadah perlawanan terhadap para penjajah, menghimpun kekuatan kalangan Kyai-Santri untuk melawan kolonialisme dan kemudian ditelurkan dalam keorganisasian bernama Nahdlatul ‘Ulama sebagai organisasi ke-Islaman *post-tradisionalisme* (Bizawie, 2016). Egalitarianisme kemudian tergambar dalam konsepsi Islam ala Indonesia yang kini dikenal dengan istilah Islam Nusantara.

Islam Nusantara adalah bentuk khas Islam di Indonesia, yang menggabungkan nilai-nilai teologis Islam dengan tradisi lokal, budaya, dan adat istiadat yang ada di tanah air. Menurut Bizawie Islam Nusantara memiliki karakteristik mengedepankan jalan tengah yang bersifat *tawasut* (moderat), tidak ekstrim kanan dan kiri, selalu seimbang, inklusif, toleran dan bisa hidup berdampingan secara damai dengan penganut agama lain, serta bisa menerima demokrasi dengan baik (Bizawie, 2016). Lebih jauh lagi, egalitarianisme

dalam tradisi Islam Nusantara tergambar dalam Piagam Khittah Nahdlatul Ulama yang diputuskan pada Munas Alim Ulama NU 1983 dan Mukhtamar PBNU 1984. Piagam tersebut berisi pedoman keagamaan serta sosial-kenegaraan, seperti *tawasut* (tengah-tengah), *i'tidal* (adil), *tasamuh* (toleran), *tawazun* (seimbang) serta *al-amr bi al-ma'ruf wa an-nahy al-munkar* (menyeru pada kebaikan dan mencegah kerusakan).

Salah satu tokoh Islam Nusantara yang lantang menyuarakan tentang kesetaraan, persamaan hak atau egaliter adalah KH. Abdurrahman Wahid yang akrab dikenal dengan nama Gus Dur. Gus Dur lahir dari latar belakang keluarga Nahdlatul Ulama murni, kakeknya merupakan pendiri Nahdlatul Ulama, dibesarkan dalam tradisi ke-Islaman ala Nusantara dan memiliki visi pemikiran yang mengedepankan humanis-egalitarian. Jhon L. Esposito dan John O. Voll memberikan julukan Gus Dur dengan “*modern reformer but not Islamic Modernist*” (Suaedy, 2018), julukan tersebut menandakan remormasi pemikiran ala Gus Dur tentang kemanusiaan dan kesetaraan tidak mengganggu dasar Islam ala tradisional yang identik dengannya.

Gus Dur memandang kesetaraan dalam kehidupan bernegara merupakan suatu keharusan untuk menghindari terjadinya konflik-konflik sektarian-primordialisme yang pada masa itu rawan terjadi. A. Suaedy dalam bukunya menerangkan, Gus Dur dalam menangani konflik Papua dan Aceh tidak berhenti hanya pada nilai pengakuan dan penghormatan saja, akan tetapi menindaklanjuti dengan melakukan transformasi kelembagaan (Suaedy, 2018). Bisa jadi adanya sebuah pengakuan dan penghormatan tidak diiringi

dengan upaya penyetaraan nyata yang berlandaskan hukum, sehingga adanya pengakuan dan penghormatan sekedar ada dalam formalitas belaka yang kemudian menyebabkan ketidakpuasan masyarakat seperti yang tercermin dalam kasus Aceh dan Papua tersebut.

Menurut Suaedy, Terdapat tiga diskursus besar dalam keilmuan Islam terhadap pandangan persamaan warga negara (*equality*) yang masih diperdebatkan untuk menentukan mana yang relevan untuk khazanah kewarganegaraan dalam Islam, yaitu: a). Ideologis-teokratis (membedakan warga negara muslim dan nonmuslim, supremasi muslim atas nonmuslim), b). Sekuler ideologis (merubah paradigma Islam kearah paradigma modern ala barat, doktrin HAM ke dalam sistem pemahaman dasar Islam), c). Kultural-reinterpretatif (argumen kesetaraan berlandaskan penggalian pemikiran dan praktik Islam klasik dan proses dialektika dengan tradisi yang berkembang di masyarakat kontemporer). Pandangan kultural-reinterpretatif dinilai sesuai dengan karakteristik Islam Nusantara yang memiliki metodologi Islam *post-tradisionalisme*. Akan tetapi, Gus Dur sebagai ulama dan tokoh intelektual pendorong gerbong gerakan sosial dalam dunia Islam berada pada tiga sudut diskursus kewarganegaraan tersebut (Suaedy, 2018).

Sehingga dapat disimpulkan bahwasannya egalitarianisme dalam perspektif HAM (hak asasi manusia) dan perspektif Islam Nusantara melihat bahwa setiap individu memiliki nilai dan kehormatan yang melekat pada dirinya, serta menjadi fondasi moral bagi sebuah masyarakat yang adil. Adanya egalitarianisme juga berdampak pada kesadaran kepentingan bersama

dan mengkesampingkan primordialisme suatu individu atau kelompok untuk menghindari adanya sektarian-primordialisme yang cenderung terjadi akibat adanya masyarakat mayoritas dan minoritas. Selain itu, dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, hal ini terkait erat dengan prinsip kedaulatan rakyat yang menegaskan dukungan terhadap pemerintahan demokratis dengan keyakinan bahwa rakyat memiliki otoritas tertinggi dan berhak untuk mengatur diri mereka sendiri.

2.1.2. Teori Hibrida Kebudayaan

Pertengahan abad ke-19 seorang Bapak Antropologi Budaya, Profesor Antropologi di Universitas Oxford, Inggris, Sir Edward Burnet Tylor (1832-1917), melakukan serangkaian penelitian tentang komunitas primitif, termasuk evolusi budaya manusia yang melampaui tahap-tahap transisi "*from savage through barbaric to civilized life*", dari masyarakat liar, melewati kehidupan barbarik sampai pada kehidupan beradab. Dalam karya tulisnya yang berjudul *Primitive Culture*, Tylor merumuskan "*Culture or Civilization is that complex which includes knowledge, belief, art, morals, law, custom, and many other capabilities and habits acquired by man as a member of society*", Kebudayaan atau Peradaban adalah satuan kompleks yang meliputi ilmu pengetahuan, kepercayaan, kesenian, akhlak, hukum, adat dan banyak kemampuan-kemampuan dan kebiasaan lain yang di peroleh manusia sebagai anggota masyarakat (Tylor, 2011).

Koentjaraningrat, E.B Tylor dan Ralph Linton sebagaimana dilatar belakang juga mendefinisikan kebudayaan sebagai sebuah proses perjalanan

hidup manusia yang secara terus-menerus berkembang, menciptakan hal baru dan keterkaitannya dengan sistem sosial yang tak akan pernah usai. Tentunya definisi mengenai kebudayaan tidak cukup pada pengertian ketiga tokoh tersebut, banyak sekali interpretasi mengenai kebudayaan yang telah diajukan oleh para ahli dari berbagai bidang seperti antropologi, sosiologi, psikologi, filsafat, dan lain-lain. Kroeber dan Kluckhohn telah mengumpulkan berbagai definisi tentang kebudayaan yang mereka padukan dalam sebuah buku yang berjudul *Cultur, A Critical Review of Concepts and Definition* (1952), buku tersebut merupakan hasil analisis dari semua definisi yang dikumpulkan sehingga definisi tentang kebudayaan mereka klasifikasikan dalam tujuh kategori sebagai berikut (Kroeber & Kluckhohn, 1952):

- 1) Golongan pertama; definisi yang menekankan dan merinci isi pengertian kebudayaan. Sebagian besar penulis definisi tersebut menekankan bahwa kebudayaan merupakan entitas kompleks yang terdiri dari beragam unsur yang berbeda.
- 2) Golongan kedua; definisi yang menekankan sejarah kebudayaan. Dalam konteks ini, kebudayaan dipandang sebagai warisan sosial atau tradisi.
- 3) Golongan ketiga, definisi yang menekankan segi kebudayaan yang bersifat normatif. Kebudayaan dipandang sebagai cara, norma, dan pola hidup manusia. Terdapat juga definisi yang menyoroti cita-cita, nilai, dan perilaku.

- 4) Golongan keempat; definisi kebudayaan dengan pendekatan psikologi. Kebudayaan dipandang sebagai upaya manusia untuk beradaptasi dengan lingkungan. Dalam kategori ini termasuk juga definisi yang menyoroti proses pembelajaran dan kebiasaan.
- 5) Golongan kelima adalah definisi-definisi yang bersifat struktur yang membicarakan pola-pola organisasi kebudayaan.
- 6) Golongan keenam; definisi-definisi yang melihat kebudayaan sebagai hasil perbuatan atau kecerdasan manusia. Dalam kategori ini termasuk juga definisi yang menyoroti ide-ide dan simbol-simbol. Seperti adanya sebuah kebudayaan untuk membedakan manusia dengan makhluk lainnya.
- 7) Golongan ketujuh; definisi-definisi yang tidak lengkap dan tidak dapat di pertimbangkan.

Analisa Kroeber dan Kluckhohn membuktikan bahwa definisi kebudayaan dapat ditinjau dari beberapa aspek dan unsur. Kebudayaan merupakan warisan sosial, kebudayaan juga merupakan hasil dari perbuatan manusia yang terus belajar. Banyaknya variasi definisi tentang kebudayaan menunjukkan bahwa kebudayaan dapat dilihat dari berbagai perspektif, sehingga tidak ada satu pun definisi yang bisa mencakupnya secara keseluruhan.

Selain definisi terkait kebudayaan yang bervariasi, tentunya terdapat pemahaman kebudayaan meliputi pengertian secara “sempit” dan “luas”. Dalam pengertian “sempit”, salah satunya kebudayaan dipahami sebagai

bentuk seni, sehingga orang yang berkarya di bidang seni dianggap sebagai budayawan, pertunjukan seni sering dianggap sebagai acara kebudayaan, dan misi seni yang melakukan perjalanan ke luar negeri sering disebut sebagai misi kebudayaan (Kistanto, 2017). Pemahaman tersebut tentu mempersempit pengertian kebudayaan, terutama di tinjau dari unsur-unsur kebudayaan. secara luas, Anthony Giddens memberikan pemahaman mengenai kebudayaan sebagai berikut.

Culture refers to the whole way of life of the members of a society. It includes how they dress, their marriage customs and family life, their patterns of work, religious ceremonies and leisure pursuits. It covers also the goods they create and which become meaningful for them – bows and arrows, ploughs, factories and machines, computers, books, dwellings (Giddens & Griffiths, 2006). (Kebudayaan berkenaan dengan keseluruhan cara hidup anggota-anggota masyarakat. Kebudayaan meliputi bagaimana mereka berpakaian, adat kebiasaan perkawinan mereka dan kehidupan berkeluarga, pola-pola kerja mereka, upacara-upacara keagamaan dan pencarian kesenangan. Kebudayaan meliputi juga barang-barang yang mereka ciptakan dan yang bermakna bagi mereka – busur dan anak panah, bajak, pabrik dan mesin, komputer, buku, tempat kediaman).

Sementara itu menurut van Peursen, kebudayaan merupakan suatu strategi (Peursen & Hartono, 1976). Strategi tersebut adalah memperlakukan kata atau istilah kebudayaan bukan sebagai ‘kata benda’ melainkan sebagai ‘kata kerja’. Kebudayaan bukan lagi semata-mata koleksi karya seni, buku-

buku, museum dan benda-benda lainnya. Kebudayaan harus dihubungkan dengan kegiatan manusia yang bekerja, yang merasakan, memikirkan, memprakarsai dan menciptakan (Syihab & Hartono, 1976). Dengan demikian, kebudayaan dapat diartikan sebagai produk dari pemikiran, perasaan, dan kreativitas manusia. Oleh karena itu, individu yang memiliki budaya adalah mereka yang berusaha untuk meningkatkan derajat kemanusiaan. Pendekatan budaya yang menyederhanakan praktik budaya sehari-hari dan kebijakan sosial dilakukan dengan merangkum secara konseptual elemen-elemen inti dari budaya.

Unsur-unsur kebudayaan bersifat universal (Kistanto, 2017), yaitu terdapat dalam seluruh masyarakat dunia seperti; masyarakat primitif (*underdeveloped society*), terpencil (*isolated*), masyarakat sederhana (*less developed society*) atau pra-pertanian (*preagricultural society*), masyarakat berkembang (*developing society*) atau industri (*industrializing society*), masyarakat maju (*developed society*) atau masyarakat industri (*industrial society*) dan pascaindustri (*postindustrial society*), masyarakat yang sangat rumit dan canggih (*highly complicated society*). Menurut Koentjaraningrat (2010) beberapa aspek universal dari kebudayaan tersebut dapat diuraikan dan dipelajari melalui kategori-kategori yang saling terkait dalam suatu kerangka sistem budaya dan sistem sosial, yang mencakup: 1) Sistem dan struktur sosial; 2) Sistem keagamaan dan ritual keagamaan; 3) Sistem mata pencaharian; 4) Sistem pengetahuan; 5) Sistem teknologi dan peralatan; 6) Bahasa; dan 7) Seni.

Konsep budaya hibrida atau *cultural hybridity* mulai di terapkan (walau istilah tersebut tidak selalu digunakan) dalam disiplin ilmu, khususnya sosiologi, antropologi dan sejarah pada awal abad ke-20 (Ackermann, 2012). Beberapa antropolog dan sosiolog pada masa itu mulai menggunakan istilah “hibriditas” akibat dari peristiwa sosial politik yang tidak kondusif di barat seperti; Robert Ezra Park (1864–1944), salah satu pendiri sosiologi di Chicago, menggunakan istilah hibriditas pada tahun 1920-an untuk merujuk pada masuknya imigran secara besar-besaran dari Eropa. Kemudian Georg Simmel (1858–1918) menulis tentang penggambaran orang Yahudi yang dibebaskan dari pengasingan, dan Alfred Schütz (1899–1959) yang menggambarkan para migran sebagai “manusia marginal” atau wujud “persilangan budaya (*cultural hybrids*)”.

Pada tahun 1960-an, konsep tentang hibriditas kebudayaan mulai eksis dan sering di bicarakan oleh para antropolog, sosiolog dan sejarawan di Eropa. Pierre Bourdieu (1930-2002) salah satu sosiolog Eropa menjelaskan, arti kata ‘hibrida budaya’ adalah menyandingkan dan menggabungkan objek, bahasa, dan praktik penandaan dari berbagai kebudayaan yang berbeda atau dari dua domain yang awalnya terpisah kemudian menjadi satu-kesatuan budaya (Bourdieu dalam Ackermann, 2012). Istilah hibriditas sendiri merupakan satu diantara sekian banyaknya metafora tentang proses transformasi suatu budaya. Dalam hal ini, Ackermann menyatakan setidaknya ada tiga metafora yang bisa diidentikkan dengan hibriditas kebudayaan sebagai berikut (Ackermann, 2012):

a. *Borrowing* (Peminjaman)

Peminjaman budaya sering dianggap sebagai istilah yang merendahkan, seolah-olah budaya yang dipinjamkan adalah budaya yang tidak memiliki orisinalitas. Sejarahwan asal Prancis Fernand Braudel (1902-1985) dan Edward Said yakin bahwa asal usul seluruh kebudayaan berasal dari adanya adopsi atau peminjaman kebudayaan. disisi lain terdapat istilah akulturasi, yang dianggap sebagai istilah teknis yang menunjukkan subordinat suatu budaya yang mengadopsi ciri-ciri suatu budaya yang dominan. Kemudian terdapat asimilasi yang identik terjadi akibat dari adanya proses migrasi dan istilah transkulturasi yang menyiratkan proses peminjaman atau adopsi budaya dari dua arah.

b. *Mixing* (Percampuran)

Dalam konsep hibriditas terdapat istilah percampuran atau peleburan atau istilah yang lebih terkini adalah sinkretisme. Sinkretisme merupakan suatu upaya untuk menyatukan elemen-elemen budaya, agama atau sistem kepercayaan dengan harapan terbentuknya suatu sistem agama atau budaya baru yang melebur menjadi satu-kesatuan.

c. *Translating* (Penerjemahkan)

Dalam bidang humaniora, penerjemahan budaya merupakan suatu gagasan cukup berhasil yang kemudian menghasilkan istilah *linguistic turn*. Bronislaw Malinowski (1884-1942) mengklaim bahwa mempelajari budaya asing sama seperti mempelajari bahasa asing. Kegiatan penerjemahan merupakan tugas utama seorang antropolog, keahlian

seorang antropolog dalam mendeskripsikan suatu kondisi budaya pada khalayak umum merupakan salah satu bentuk kegiatan translating atau penterjemahan tersebut.

2.1.3. Konsep Islam Nusantara

Istilah Islam Nusantara menjadi terkenal karena menjadi fokus utama Mukhtamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-33 di Jombang, Jawa Timur, yang berlangsung dari 1 hingga 5 Agustus 2015. Nahdlatul Ulama dikenal sebagai organisasi umat Islam terbesar di Indonesia. (Qomar, 2015), Islam Nusantara semakin terpublikasikan dalam masyarakat Muslim Indonesia yang lebih luas, dari masyarakat perkotaan hingga perdesaan. Pemilihan istilah Islam Nusantara tersebut bertujuan untuk mengenalkan citra Islam yang toleran, ramah, dan damai dalam ruang lingkup geografis, sosial maupun budaya.

Secara praktis, tipologi Islam Nusantara telah lama ada di wilayah Indonesia atau dulu lebih di kenal dengan nama Nusantara (Qomar, 2015). Sebuah kerangka pemikiran, pengertian, dan praktik ajaran Islam yang tetap memperhatikan tradisi atau budaya setempat, sehingga mampu menunjukkan suatu model atau cara ber-Islam yang khas Nusantara dan membedakannya dari model ber-Islam lainnya seperti di Timur Tengah, India, Turki, dan lain-lain.

Islam Nusantara terdiri dari dua kata, yaitu Islam dan Nusantara. Islam yang berarti “penyerahan, kepatuhan, ketundukan dan perdamaian”, memiliki lima ajaran pokok yang di sebut rukun Islam yaitu; bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah, menegakkan shalat, menunaikan zakat,

melaksanakan puasa dan menunaikan zakat, melaksanakan puasa dan menunaikan ibadah haji (bagi yang mampu) (Luthfi, 2016). Islam memiliki dua pedoman yang digunakan sebagai referensi ajarannya yaitu Al-Qur'an dan Hadits.

Nusantara adalah istilah yang merujuk kepada kumpulan pulau di Indonesia, mulai dari Sumatera hingga Papua. Kata Nusantara berasal dari naskah berbahasa Jawa dari sekitar abad ke-12 hingga ke-16, merujuk pada konsep Negara Majapahit (Luthfi, 2016). Dalam karya sastra berbahasa Inggris pada abad ke-19, istilah Nusantara mengacu pada kepulauan Melayu. Pada abad ke-20, Ki Hajar Dewantoro menggunakan istilah Nusantara sebagai salah satu saran untuk nama suatu wilayah di Hindia-Belanda (Van Der Kroef, 1951). Istilah Nusantara secara konstitusional juga terdapat dalam TAP MPR No.IV/MPR/1973, tentang Garis Besar Haluan Negara Bab II Sub E; kata Nusantara ditambah dengan kata wawasan (Majelis Permusyawaratan Rakyat, 1978).

Berdasarkan pengertian dua terminologi diatas, Islam Nusantara merupakan ajaran agama Islam berlandaskan Al-Qur'an dan Hadits yang cara memahaminya dan menjalankannya dilakukan oleh penduduk asli Nusantara (Indonesia) sehingga menjadi sistem nilai, tradisi dan budaya Islami yang berciri khas Nusantara. Menurut Zastrouw, Islam Nusantara tidak bertujuan untuk mengubah ajaran Islam agar sesuai dengan budaya atau tradisi Nusantara, tetapi sebaliknya, upaya tersebut adalah untuk memelihara prinsip-

prinsip dasar ajaran Islam dan berusaha menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Nusantara (Al-Zastrouw, 2017).

Azyumardi Azra dalam esainya yang berjudul *Islam Indonesia Berkemajuan*, menjabarkan terminologi “Islam Nusantara” dalam dunia akademis bermuara pada “Southeast Asian Islam” yang terdapat di wilayah Muslim Indonesia, Malaysia, Brunei, Pattani (Thailand Selatan) dan Mindanau (Filipina Selatan) (Azra, 2022). Azra selanjutnya menekankan bahwa Islam Nusantara merupakan suatu kerangka pemikiran, pemahaman, dan praktik ajaran Islam yang diselaraskan dengan budaya dan tradisi yang tumbuh di kawasan Asia Tenggara. Menurut Azra, unsur-unsur ortodoksi Islam Nusantara mencakup Kalam (teologi) Asy'ariyah, Fiqh Syafi'i, dan Tasawuf al-Ghazali (Azra dalam Sahal & Aziz, 2015). Selain tiga komponen tersebut, dapat di tambah tiga komponen untuk memperkokoh konsep Islam Nusantara, yaitu komponen politik, pendidikan dan budaya (Qomar, 2015). Sehingga objek kajian Islam Nusantara dapat meliputi enam komponen, yaitu Kalam (teologi), Fiqh, Tasawuf, politik, pendidikan dan budaya (tradisi).

Sementara itu menurut Said Aqil Siradj (Luthfi, 2016), istilah Islam Nusantara merupakan “Islam yang hanya dimiliki Indonesia, yakni memiliki corak Islam Nusantara yang heterogen. Satu daerah dengan daerah lainnya memiliki ciri khas masing-masing, tetapi memiliki ruh yang sama. Kesamaan nafas, merupakan saripati dan hikmah dari perjalanan panjang Islam selama berabad-abad di Indonesia yang telah menghasilkan suatu karakteristik yang lebih mengedepankan aspek esoteris hakikah, ketimbang esoteris syariat.”

Dari berbagai penjelasan tersebut, jelas bahwa Islam Nusantara bukan merupakan suatu arus baru dalam Islam, pemahaman baru, atau kelompok keagamaan baru, bahkan bukan agama baru yang dapat mengubah atau menyempitkan ajaran Islam yang suci dan universal. Secara praktis, Islam Nusantara merupakan strategi aktualisasi ajaran Islam di kalangan bangsa Nusantara dengan tetap menjaga prinsip-prinsip dasar ajaran Islam, sebagaimana yang diajarkan dalam Al-Qur'an dan Hadits (Al-Zastrouw, 2017). Sehingga akar tradisi dan budaya yang sudah ada di Nusantara tidak langsung dihapus dan digantikan oleh tradisi ajaran Islam. Sebaliknya, terjadi sebuah proses akulturasi budaya di antara tradisi lokal dengan Islam, menghasilkan suatu fenomena baru yang disebut Islam Nusantara dengan ciri-cirinya yang khas.

Karakteristik Islam Nusantara yang lahir dari adanya persilangan antara Islam dan tradisi lokal dapat menghasilkan produk bibit yang unggul sebagaimana di analogikan oleh Ahmad Baso dalam bukunya, *Islam Nusantara Ijtihad Jenius dan Ijma' Ulama*; bahwa Islam Nusantara ibarat pertemuan dua bibit pohon unggulan yang berbeda jenis, namun ketika disatukan dalam proses persilangan akan menghasilkan sebuah bibit baru yang lebih unggul. Benih ini akan berkembang secara kuat dan mampu bertahan di bawah pengaruh lingkungan apapun, menjadi toleran dan adaptif terhadap lingkungan, sehingga dapat tumbuh dengan baik dan kokoh, tidak mudah rapuh, rusak, atau gagal berkembang (Baso, 2015). Dengan persilangan tersebut, diharapkan muncul suatu jenis baru yang populis, memiliki tingkat

peradaban yang tinggi, serta tangguh menghadapi berbagai kondisi dan tantangan. Jenis baru tersebut disebut sebagai Islam Nusantara.

Tidak hanya itu, sifat khas dari Islam Nusantara membedakannya dari karakteristik Islam di wilayah lain seperti di Timur Tengah. Wilayah Nusantara memiliki sejumlah keunikan yang berbeda dengan negeri-negeri lain, mulai dari keunikan geografis, sosial politik, dan tradisi peradaban (Qomar, 2015). Islam Nusantara merupakan Islam yang ramah, terbuka, inklusif dan mampu memberi solusi terhadap masalah-masalah bangsa dan negara, serta dinamis dan bersahabat dengan lingkungan kultur, sub kultur dan agama yang beragam (Bizawie dalam Qomar, 2015). Bizawie juga menambahkan bahwa Islam Nusantara tidak hanya dapat diterima oleh masyarakat Nusantara, namun juga sesuai untuk memperkaya budaya Nusantara agar mewujudkan prinsip Islam yang akomodatif, yaitu rahmatan lil 'alamin. Hal tersebut tersebut adalah pesan yang menginspirasi karakteristik Islam Nusantara yang moderat, toleran, damai, dan menghormati keberagaman.

Selanjutnya, Ngatawi al-Zastrouw menambahkan beberapa karakteristik Islam Nusantara sebagai berikut (Al-Zastrouw, 2017);

Pertama; genealogi keilmuan (sanad) yang bersambung dan terlacak dengan jelas. Para ulama Nusantara memiliki mata rantai keilmuan (sanad) yang jelas, merupakan sebuah karakteristik Islam Nusantara yang menjadikan sanad keilmuan sangat penting untuk mempertahankan kesahihan ajaran dan untuk mengawasi kesinambungan suatu gagasan.

Kedua; mengedepankan kearifan (wisdom) dan kebajikan (masalah). Menurut para ulama Nusantara yang menjadi rujukan dalam ber-Islam di wilayah Nusantara, simbol dan ritual agama adalah cara untuk mencapai tujuan agama, yaitu berbakti kepada Allah SWT. untuk mewujudkan kebajikan (kemaslahatan) dan menebar *rahmah* kepada seluruh alam (*rahmatan lil 'alamin*).

Ketiga; non-kooperatif namun tidak frontal dan radikal, para ulama Nusantara selalu menjaga hal-hal prinsip yang tidak bisa di kompromikan dengan cara-cara yang lentur (fleksible). Seperti contoh pada era kolonialisme Hindia Belanda yang kafir, selama masa pemerintahan Belanda tidak menghambat umat Islam dalam menjalankan ibadah sesuai syariatnya, penting untuk mendukung dan mempertahankan tanah air Hindia Belanda. Sebagai contoh, setelah Indonesia merdeka dan menjadi NKRI yang menjamin kebebasan pelaksanaan syariat Islam bagi umat Muslim, saat terjadi pendudukan oleh sekutu, umat Islam bersatu dalam upaya mempertahankan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) melalui Resolusi Jihad NU (Bizawie, 2014). Islam Nusantara menjadi dinamis karena selalu mencari titik temu dan keseimbangan untuk bisa menjaga dan menerapkan ajaran Islam.

Keempat; menjaga dan merawat keberagaman dengan sikap saling mengerti dan menghargai atas perbedaan. Karakter ini adalah yang membedakan Islam Nusantara dari Islam lain yang menekankan homogenitas dengan cara menghilangkan atau menyingkirkan perbedaan,

bahkan menggunakan tindakan yang cenderung kekerasan. (Al-Zastrouw, 2017). Karakter ini tercermin dalam penerimaan Pancasila sebagai landasan negara, di mana para ulama Nusantara percaya bahwa tidak ada aspek dalam Pancasila yang tidak sesuai, apalagi bertentangan, dengan ajaran Islam. Islam Nusantara menganggap Pancasila sebagai kesepakatan yang luhur antara umat Islam Indonesia dan umat lain yang harus dijaga dan dihormati bersama-sama. Pancasila juga dipandang sebagai cerminan dari nilai-nilai dan ajaran Islam yang diterima oleh komponen-komponen bangsa lainnya (Sora & Asy'ari, 1994).

2.2. Kerangka Pemikiran

Menurut Singarimbun (1990) mengatakan bahwa kerangka pemikiran atau konsep adalah generalisasi dari sekelompok fenomena tertentu sehingga dapat dipakai untuk menggambarkan berbagai fenomena yang sama (Singarimbun dalam Tjetjep Samsuri, 2003). Kerangka pemikiran atau konsep adalah sebuah pemahaman yang utuh tentang suatu masalah atau fenomena yang perlu dirumuskan, oleh karena itu, konsistensi seorang peneliti sangat diperlukan dalam menyusun kerangka pemikiran atau konsep. Ini berarti bahwa jika suatu hal disebut sebagai A dalam kerangka pemikiran, maka dalam seluruh penelitian yang dilakukan, konsep tersebut harus tetap disebut sebagai A sesuai dengan pengertian atau penjelasan dari kerangka konsep atau pemikiran tersebut.

Dalam penelitian ini peneliti mencoba menganalisa dan menjelaskan pokok masalah yang terjadi. Penelitian ini menganalisa tentang Nilai-Nilai Egalitarianisme pada Kebudayaan Pandalungan di Wilayah Lumajang Jawa

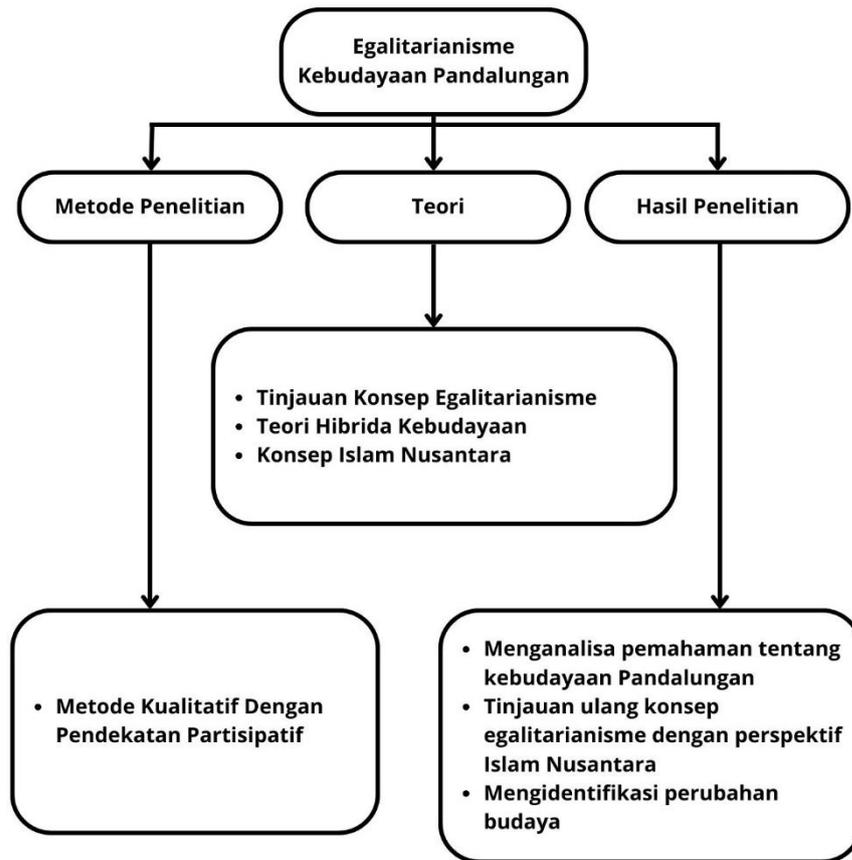
Timur. Menjelaskan bagaimana jejak sejarah Pandalungan, apa saja prinsip egalitarianisme, menjelaskan bentuk tradisinya dan menjelaskan pula tentang kondisi sosial-geografis budaya yang mempengaruhi eksistensi egalitarianisme dalam kebudayaan Pandalungan di Lumajang Jawa Timur.

Sebagai negara budaya yang tercermin dalam tradisi dan kebudayaan yang variatif, Indonesia menjadi negara yang kaya akan budaya, memiliki karakter yang kuat dan memperteguh jati diri bangsa Indonesia. Adanya sebuah kebudayaan menunjukkan adanya berbagai dimensi kebudayaan seperti; ciri manusia sebagai makhluk yang “belum selesai” dan terus berkembang, dan kebudayaan sebagai sistem yang terkait dengan sistem sosial. Realitas kehidupan dan sistem sosial tersebut mencerminkan keragaman yang ada di Indonesia yang terdiri atas banyak unsur etnis beserta adanya, bermacam-macam agama dan aliran kepercayaan, dan faktor geografis yang berbeda-beda.

Kebudayaan menjadi sebuah simpul dari ikatan relasi antar manusia yang menjadikan ciri khas dalam kehidupannya. Manusia yang berbudaya tidak bisa luput dari aktifitas sosial yang dalam hal tersebut relasi antar kebudayaan pasti terjadi, seperti contoh adanya sebuah interaksi antara dua orang dengan latar belakang yang berbeda-beda, sehingga menghasilkan akulturasi kebudayaan baru yang tercipta akibat dari interaksi tersebut. Salah satu kebudayaan yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini adalah kebudayaan Pandalungan. Secara budaya disebut Pandalungan karena terdiri dari masyarakat hibrida yaitu masyarakat berbudaya baru akibat terjadinya sebuah percampuran dua budaya dominan, yakni budaya Jawa dan Madura.

Penelitian tentang Pandalungan di lakukan di wilayah kabupaten Lumajang provinsi Jawa Timur sebagai salah satu kabupaten yang masuk dalam kawasan tapal kuda yang menjadi basis kebudayaan Pandalungan. Secara administratif kawasan kebudayaan Pandalungan meliputi; kabupaten Pasuruan, Kabupaten/kota Probolinggo, kabupaten Situbondo, kabupaten Bondowoso, kabupaten Jember dan Kabupaten Lumajang. Ruang lingkup penelitian berfokus di kabupaten Lumajang dikarenakan menyesuaikan cakupan penelitian yang berada di tingkat skripsi, sehingga tidak terlalu luas dan secara geografi budaya terfokus pada satu karakter kebudayaan.

Beberapa teori yang berkaitan dengan penelitian ini adalah; (1) Teori Egalitarianisme, sebuah teori yang meyakini adanya kesamaan derajat antar manusia. Dengan teori ini dapat mengidentifikasi apakah benar dalam kebudayaan Pandalungan mengedepankan unsur egalitarian dalam prakteknya. (2) Teori Kebudayaan, yaitu sebuah proses perjalanan hidup manusia yang secara terus-menerus berkembang, menciptakan hal baru dan keterkaitannya dengan sistem sosial yang tak akan pernah usai. Teori kebudayaan menguatkan eksistensi Pandalungan sebagai salah satu kebudayaan yang ada dalam pembahasan penelitian. (3) Teori Islam Nusantara, sebuah teori yang menjelaskan tentang praktek ajaran Islam yang khas Nusantara yaitu Indonesia yang mampu berjalan bersama dengan praktek kebudayaan.



Gambar 1.1 Bagan Kerangka Pemikiran

2.3. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu tentang kebudayaan Pandalungan yang menjadi identitas kebudayaan masyarakat Jawa Timur bagian timur sangat bervariasi. Tidak sedikit yang telah melakukan penelitian dan diangkat dalam pembahasan seminar-seminar akademis untuk memperkenalkan kebudayaan Pandalungan yang unik selayaknya varian kebudayaan lainnya di Indonesia. Beberapa penelitian terdahulu yang terdiri dari makalah dan jurnal penelitian hanya membahas tentang Pandalungan sebagai kebudayaan secara komprehensif, adapun beberapa jurnal membahas tentang keterkaitan budaya Pandalungan dengan wilayah atau pembahasan tertentu, seperti:

2.3.1. Makalah berjudul “Sekilas Tentang Masyarakat Pandalungan” karya Ayu Sutarto (2006). Makalah yang disajikan dalam acara orientasi kebudayaan yang diadakan oleh Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta pada tanggal 7 hingga 10 Agustus 2006. Makalah tersebut membahas tentang kebudayaan Pandalungan secara umum; tentang arti kata Pandalungan, dimana tempatnya dan sekilas membahas karakteristik masyarakat Pandalungan (Sutarto, 2006). Karya tulis tersebut membahas kebudayaan Pandalungan terkait dengan bagaimana asal usul, penjelasan hibrida kebudayaan dan bagaimana pengaruh kebudayaan Pandalungan terhadap sosial kemasyarakatan hanya dijelaskan secara umum. Sehingga perbedaan dengan penelitian skripsi ini adalah akan dijelaskan lebih mendalam terkait asal usul kebudayaan Pandalungan secara periodik, penjabaran lebih jelas tentang istilah hibrida kebudayaan dan bagaimana dampak kebudayaan Pandalungan terhadap karakteristik masyarakatnya.

2.3.2. Jurnal penelitiann berjudul “Budaya Pandalungan Sebagai Media Pendidikan Egaliter” karya Bambang Subahri, Ahmad Arif Ulin Nuha (2022). Penelitian yang membahas tentang penerapan pola egaliter kebudayaan Pandalungan dalam dunia pendidikan modern yang terbukti dapat meningkatkan kemampuan kognitif, afektif dan pedagogi (Subahri et al., 2022). Perbedaan dengan penelitian skripsi ini terletak pada analisis egalitarianisme yang tidak befokus pada satu hal saja yaitu pendidikan, akan tetapi akan dianalisa lebih mendalam egalitarianisme dalam kebudayaan Pandalungan itu sendiri.

2.3.3. Jurnal penelitian berjudul “Nanggeleh: Kajian Filosofis dan Psikologi Dakwah Petani Pandalungan” karya Abdul Ghofur, Zainil Ghulam dan Bambang Subahri (2022). Penelitian tentang kajian filosofis kegiatan *Nanggeleh* yang merupakan istilah lokal masyarakat Pandalungan yang berarti membajak lahan pertanian, dan mengkaji tentang psikologi dakwah dan kontekstualisasi *Nanggeleh* para petani Pandalungan (Ghofur et al., 2022). Pada karya tulis tersebut berfokus pada satu bentuk tradisi dalam kebudayaan Pandalungan, yang menjadi pembeda dengan penelitian skripsi ini adalah objek tradisi yang dikaji berbeda, yaitu tradisi *sandingan malam jum'at legi* yang juga berada di wilayah kebudayaan Pandalungan.

2.3.4. Jurnal penelitian berjudul “Ungkapan Emosi Negatif Masyarakat Multietnis Pandalungan Jember” karya Asti Widyaruli Anggraeni, Trisna Andarwulan dan Ruaidah. Penelitian yang membahas pola komunikasi atau ungkapan negatif masyarakat multi etnis Pandalungan kabupaten Jember yang meliputi kata tunggal, kata kompleks atau berimbuhan, bentuk frasa dan bentuk klausa (Astri W. A, dkk, 2016). Sehingga antara jurnal penelitian dengan skripsi penelitian memiliki perbedaan pada; objek kajian skripsi ini berfokus pada analisis egalitarianisme yang menunjang kesetaraan dalam praktiknya, berikut dengan bagaimana dampak sosial kemasyarakatan yang terjadi dalam praktik kebudayaannya.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian tentang “Analisis Egalitarianisme Kebudayaan Pandalungan di Wilayah Lumajang Jawa Timur” menggunakan metode penelitian kualitatif pendekatan etnografis partisipatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang lebih difokuskan untuk mendeskripsikan keadaan sifat atau hakikat nilai suatu objek atau gejala tertentu (Abdussamad, 2021). Penelitian kualitatif mengadopsi sudut pandang untuk mengamati aspek kualitas dari objek penelitian, seperti nilai-nilai, makna, emosi manusia, apresiasi terhadap keberagaman, keindahan, karya seni, nilai-nilai sejarah, dan sebagainya. Sehingga pemilihan metode tersebut untuk memberikan penjelasan mengenai suatu fenomena apakah benar pola egaliter identik dengan kebudayaan Pandalungan yang tercipta dari hibrida kebudayaan antara budaya Jawa dan Madura, karena menyangkut dari persepektif nilai, makna, penghayatan keberagaman dan perkara yang bersangkutan dengan nilai sejarah. Kemudian direkonstruksi dengan beberapa teori yang berkaitan dengan fenomena tersebut.

Istilah etnografi berasal dari kata *ethnos* berarti bangsa dan *graphien/graphic* berarti gambaran atau lukisan. Secara harfiah etnografi adalah tulisan atau laporan tentang suatu suku-bangsa, yang di tulis atas hasil penelitian lapangan selama sekian bulan atau sekian tahun (Abdussamad, 2021). Sehingga pendekatan etnografis dalam penelitian ini digunakan untuk menyesuaikan kebutuhan data penelitian yang bersumber pada kegiatan tradisi sosial

kemasyarakatan masyarakat Pandalungan di kabupaten Lumajang. Pendekatan yang digunakan bukan etnografi murni, akan tetapi pendekatan partisipatif yang ikut aktif dalam kegiatan tradisi kebudayaan masyarakat Pandalungan selama penelitian.

3.2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian akan dimulai setelah dinyatakan lulus dari seminar proposal skripsi yang sedang disusun. Jika proposal penelitian skripsi dinyatakan lulus dan layak untuk dilanjutkan, pelaksanaan penelitian akan dimulai dan berlangsung selama 2 (dua) bulan, yaitu dari bulan Februari hingga Maret 2024. Bulan Februari akan digunakan untuk pengumpulan data, sementara bulan Maret akan digunakan untuk pengolahan dan penyelidikan data dalam pembahasan penelitian.

Lokasi penelitian ini terdapat di kabupaten Lumajang, Jawa Timur sebagai salah satu kabupaten di Jawa Timur yang menjadi basis kebudayaan Pandalungan. Peneliti pada proses pengumpulan datanya akan berfokus pada kecamatan Senduro yang memiliki latar belakang kebudayaan Jawa namun ada pengaruh kebudayaan Madura. Pada kecamatan tersebut memiliki tradisi dan kebudayaan Pandalungan yang kuat dalam praktik keseharian masyarakatnya, sehingga peneliti ingin mencari dan menganalisa tentang pola egalitarianisme yang terdapat pada kecamatan tersebut yang berada di kabupaten Lumajang.

3.3. Sumber Data

3.3.1. Data Primer

Data primer oleh penulis didapatkan dari sampel sesuai dengan konsep yang di gunakan dalam penelitian kualitatif (Abdussamad, 2021). Dalam

penelitian kualitatif sampel merupakan subjek penelitian, subjek penelitian berhubungan dengan apa atau siapa yang diteliti. Sehingga untuk mendapatkan data penelitian membutuhkan observasi dan wawancara untuk mendapatkan validitas suatu data. Subjek penelitian dan sumber data dalam penelitian ini adalah masyarakat kabupaten Lumajang sebagai salah satu basis kabupaten yang menerapkan kebudayaan Pandalungan. Observasi akan difokuskan untuk mendapatkan data di kecamatan Senduro dan di kecamatan tersebut peneliti akan mewawancarai informan kunci yakni tokoh masyarakat dan masyarakat sekitar yang memiliki pengetahuan atau pelaku langsung terhadap tradisi kebudayaan Pandalungan yang memiliki nilai egaliter.

Informan kunci yang akan memberikan informasi pada observasi penggalan data adalah bapak Syamsul Hadi selaku tokoh masyarakat yang berada di kecamatan Senduro. Beliau merupakan tokoh masyarakat yang berperan aktif dalam melestarikan tradisi 'sandingan malam jum'at legi. Setiap prosesi tradisi tersebut dilaksanakan salah satunya di surau atau musholla milik informan, kemudian informan memimpin rangkaian prosesi dengan do'a-do'a dan kemudian pada akhirnya ikut membantu membagikan "*sandingan*" yang telah melewati prosesi tradisi tersebut.

3.3.2. Data Sekunder

Data sekunder oleh penulis didapatkan dari beberapa dokumen penelitian terdahulu berupa lembar jurnal penelitian yang berguna untuk menunjang validitas dari data primer. Sehingga data yang di dapatkan memiliki keselarasan, dapat dikembangkan dan dapat dipertanggung jawabkan.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan 3 cara dalam prosedur pengumpulan data yaitu; observasi, wawancara dan studi dokumen sebagai berikut:

3.4.1. Observasi: observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi partisipatif, observasi partisipatif adalah Peneliti terlibat dalam aktivitas sehari-hari yang dilakukan oleh individu yang menjadi objek pengamatan atau sumber data penelitian (Abdussamad, 2021).

Untuk menganalisa nilai egaliter dalam kebudayaan Pandalungan di perlukan partisipasi secara langsung dari penulis agar mendapatkan data dan perspektif secara langsung.

3.4.2. Wawancara: adalah komunikasi verbal, merupakan percakapan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi atau dapat disebut sebagai metode pengumpulan data di mana peneliti bertanya kepada objek penelitian dan mendapatkan jawaban dari informan kunci yaitu bapak Syamsul Hadi selaku tokoh agama di daerah tersebut dan infroman tambahan dari beberapa warga kecamatan Senduro kabupaten Lumajang.

3.4.3. Studi dokumen: adalah upaya untuk mengumpulkan informasi dalam bentuk catatan, manuskrip, buku, jurnal penelitian, dan sumber-sumber lainnya yang bertujuan untuk melengkapi data yang diperoleh dari observasi dan wawancara.

3.5. Kisi-Kisi Instrumen Penelitian

Menurut Nasution (1998) menyatakan: “dalam penelitian kualitatif, tidak ada pilihan lain dari pada menjadikan manusia sebagai instrumen penelitian utama. Alasannya ialah bahwa segala sesuatunya belum memiliki bentuk yang pasti” (Nasution dalam Abdussamad, 2021). Berikut kisi-kisi instrumen penelitian untuk mendapatkan gambaran tentang egalitarianisme kebudayaan Pandalungan dari perspektif informan kunci di lapangan:

3.5.1. Aspek Sejarah dan Perkembangan hibrida budaya Pandalungan

Terdapat beberapa fase sejarah dan faktor yang mempengaruhi perkembangan kebudayaan sebagai berikut;

- a. Fase pertama: sejarah dan perkembangan hibrida budaya Pandalungan pada masa transisi kerajaan Singosari menuju Majapahit,
- b. Fase kedua: dampak politis kerajaan Mataram Islam yang menunjang perkembangan hibrida budaya Pandalungan,
- c. Fase ketiga: kebijakan kolonialisme Belanda yang mempengaruhi hibrida budaya Pandalungan.

3.5.2. Aspek Egalitarianisme dalam Kebudayaan Pandalungan

- a. Persepsi hubungan sesama manusia dalam praktek egalitarianisme,
- b. Persepsi laki-laki dan perempuan dalam aspek kesetaraan,
- c. Simbol-simbol yang menandakan eksistensi egalitarianisme dalam budaya Pandalungan.
- d. Bentuk-bentuk egalitarianisme yang tercermin dalam tradisi sandingan malam jum'at legi.

3.5.3. Aspek karakteristik dan prinsip kebudayaan Pandalungan di kecamatan Senduro, kabupaten Lumajang

- a. Pola pikir merupakan inti dari keberadaan manusia yang kompleks. Dalam konteks kebudayaan Pandalungan, pola pikir mencerminkan perilaku dan adaptasi terhadap lingkungan sekitar.
- b. Analisa terhadap watak masyarakat Pandalungan untuk mendapatkan sifat-sifat, sikap dan karakteristik individu yang mempengaruhi perilaku, respon terhadap situasi dan interaksi dengan orang lain.
- c. Setiap bahasa mengandung keunikan yang mencerminkan kehidupan dan pengalaman masyarakat yang menggunakannya. Dalam budaya Pandalungan, bahasa bukan sekedar alat komunikasi tetapi juga cerminan dari budaya dan identitas masyarakat Pandalungan.
- d. Simbol-simbol yang menjadi identitas kebudayaan Pandalungan.
- e. Sistem pemerintahan dalam kebudayaan Pandalungan.

3.6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan tahapan dimana data yang didapat dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi disusun secara sistematis dengan mengorganisirnya ke dalam kategori, memecahnya menjadi unit-unit, menggabungkannya menjadi kesimpulan, serta menyoroti yang relevan untuk dipelajari, sehingga mudah dipahami oleh peneliti sendiri maupun orang lain (Abdussamad, 2021).

Dalam metode penelitian kualitatif, analisis data Ini menggunakan pendekatan induktif dimana analisis dilakukan berdasarkan data yang diperoleh, kemudian data tersebut digunakan untuk merumuskan hipotesis. Hipotesis yang terbentuk dari data tersebut kemudian diuji dengan mencari data tambahan secara berulang, sehingga dapat ditentukan apakah hipotesis tersebut dapat diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul. Sehingga dari sekian banyak data yang didapat akan dicari benang merahnya untuk menjadi hipotesis, untuk selanjutnya berkembang menjadi sebuah temuan hasil penelitian.

Penulis menggunakan teknik analisis data pra-lapangan dan selama di lapangan. Analisis penulis pada teknik pra-lapangan terdapat pada hasil penulisan latar belakang skripsi ini, dan juga pada data sekunder yang berupa beberapa studi dokumen terhadap penelitian terdahulu, jurnal-jurnal penelitian terkait dan sebagainya yang digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Akan tetapi, fokus penelitian pada proposal ini bersifat sementara, akan lebih difokuskan dan berkembang setelah penulis masuk di lapangan. Analisis selama dilapangan menggunakan model Spradley (1980) yaitu “menerapkan seorang informan kunci yang merupakan informan yang berwibawa dan dipercaya mampu “membukakan pintu” kepada peneliti untuk memasuki objek penelitian. Setelah itu peneliti melakukan wawancara kepada informan tersebut, dan mencatat hasil wawancara. Setelah itu perhatian peneliti pada objek penelitian dan memulai mengajukan pertanyaan deskriptif, dilanjutkan dengan analisis terhadap hasil wawancara” (Abdussamad, 2021).

Sesuai apa yang di paparkan pada kerangka pemikiran di bab sebelumnya, penelitian tentang Analisis Egalitarianisme Kebudayaan Pandalungan di Lumajang Jawa Timur difokuskan dikecamatan Senduro, kemudian menentukan satu tokoh masyarakat yang hendak di jadikan narasumber, kemudian berpartisipasi dalam tradisi kebudayaan Pandalungan untuk mendapatkan berbagai data penelitian yang dibutuhkan. Sehingga proses penelitian berangkat dari yang luas kemudian berfokus, dan meluas lagi. Menurut Spradley, terdapat analisis data yang dilakukan dalam penelitian kualitatif, yaitu analisis domain, taksonomi, komponensial dan analisis tema kultural (Abdussamad, 2021).

3.6.1. Analisis Domain: Biasanya dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang luas dan menyeluruh tentang situasi sosial yang sedang diteliti. Dalam analisis ini, meskipun belum dilakukan secara mendalam, namun telah berhasil mengidentifikasi domain-domain kunci dari situasi sosial yang sedang diteliti.

3.6.2. Taksonomi: Analisis yang dilakukan terhadap semua data yang terkumpul, berdasarkan pada domain yang telah ditetapkan. Dengan demikian, domain yang telah ditetapkan menjadi acuan bagi peneliti untuk melakukan analisis yang lebih rinci dan mendalam melalui analisis taksonomi.

3.6.3. Komponensial: Dalam analisis ini, fokusnya bukan pada kesamaan dalam domain, melainkan pada perbedaan atau kontras di antara mereka. Data ini diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang telah terpilih.

3.6.4. Analisis Tema Kultural: Merupakan usaha untuk menemukan kesamaan yang mengintegrasikan berbagai domain yang ada. Dengan menemukan kesamaan ini dari analisis domain, taksonomi, dan komponensial, maka akan terbentuk suatu "struktur kerangka" dari situasi sosial atau objek penelitian yang sebelumnya masih kabur menjadi jelas dan terperinci.

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL

4.1. Jejak Sejarah Kebudayaan Pandalungan

Bagaikan sebuah rumput yang tumbuh liar, mencabut satu rumput sampai keakarnya tidak berpengaruh terhadap ratusan bahkan ribuan akar rumput lain yang siap tumbuh. Begitulah perjalanan panjang catatan sejarah mengenai kebudayaan yang tersebar di seluruh pelosok Nusantara hingga kini tak kunjung menemukan ambang batasnya. Setiap studi tentang suatu kebudayaan diangkat menjadi topik penelitian ilmiah, maka akan menemukan berbagai fakta baru yang kemudian dapat dikembangkan dalam ranah penelitian akademis. Pola yang terus berulang dan berkembang, dari berbagai fakta yang ditemukan menghasilkan teori-teori baru yang dapat memperkaya khazanah keilmuan, terutama dalam konteks kajian sejarah dan kebudayaan.

Kebudayaan Pandalungan sebagai salah satu kebudayaan yang ada di Indonesia memiliki peranannya sendiri dalam perkembangan kebudayaan yang berada di pulau Jawa khususnya wilayah Jawa Timur. Secara budaya, yang disebut Pandalungan adalah masyarakat hibrida yakni masyarakat berbudaya baru akibat terjadinya percampuran antara dua budaya dominan yaitu budaya Jawa dan Madura (Sutarto, 2006). Wilayah di mana budaya Pandalungan tersebar mengacu pada daerah pesisir utara bagian timur Provinsi Jawa Timur. Secara umum, masyarakat Pandalungan tinggal di perkotaan, daerah pesisir atau pinggiran kota yang secara administratif meliputi kabupaten Pasuruan, Probolinggo, Situbondo, Bondowoso, Jember, dan Lumajang.

Tidak ditemukan data pasti mengenai kapan awal mula kebudayaan Pandalungan terbentuk, akan tetapi apabila di telusuri berdasarkan data sejarah pertemuan antar budaya tersebut dapat di tarik benang merah kapan dari ketersinggungan dua budaya menjadi satu bentuk kebudayaan baru yang di kenal sebagai kebudayaan Pandalungan. Begitupun berdasarkan informasi yang di dapat dari proses wawancara dengan informan kunci mengenai kebudayaan Pandalungan di kecamatan Senduro, bapak Syamsul Hadi mengatakan tidak tahu kapan pastinya kebudayaan Pandalungan tersebut ada. Berdasarkan penuturan leluhurnya, kebudayaan Pandalungan ada berdasarkan kehidupan antara masyarakat Jawa dan Madura yang telah lama hidup berdampingan, berbaur bersama dalam kegiatan keagamaan, sosial dan ekonomi.

Secara teoritis, kebudayaan Pandalungan identik dengan istilah masyarakat hibrida, merupakan konsep *cultural hybridity* yang mulai di terapkan dalam disiplin ilmu, khususnya sosiologi, antropologi dan sejarah pada awal abad ke-20 sebagai akibat dari banyaknya peristiwa-peristiwa yang menyebabkan terjadinya percampuran antara dua budaya yang berbeda (Ackermann, 2012). Secara historis jauh sebelum abad ke-20, masyarakat Nusantara khususnya di kepulauan Jawa telah mempraktekkan konsep hibriditas sebagai akibat dari kondisi geografis Nusantara yang didominasi oleh wilayah kemaritiman.

Sebagaimana konsep *cultural hybridity* diatas, terbentuknya kebudayaan Pandalungan disebabkan oleh adanya faktor migrasi satu budaya ke suatu daerah baru yaitu budaya Madura yang berasal dari pulau Madura ke pulau Jawa yang dominan kebudayaan Jawa. Dari data sejarah dapat diketahui bahwa hubungan

antara budaya Madura dengan budaya Jawa di Jawa Timur meliputi politik, ekonomi, sosial dan kebudayaan (Kresnan Hadi, 2016). Proses perpindahan penduduk atau migrasi masyarakat berbudaya Madura ke Jawa Timur berlangsung sejak masa lampau. Secara kronologis, bukti-bukti proses perpindahan penduduk atau migrasi akan dibagi menjadi beberapa fase sebagai berikut:

Fase pertama, bukti catatan tertua adanya migrasi pertemuan antar budaya menurut Agus Sunyoto dalam bukunya “Atlas Wali Songo” di terangkan bahwasannya pada prasasti Mula Malurung bertahun 1255 M, kerajaan Lamajang (Lumajang kuno) dirajai oleh Naraya Kirana merupakan Juru atau bagian kadipaten dari kerajaan Singasari yang pada masa itu berada di bawah kekuasaan raja Sri Prabu Seminingrat Jayawisnuwardhana (Sunyoto, 2020). Lamajang merupakan sebutan terdahulu sebelum berubah menjadi kerajaan Lamajang Tigang Juru dibawah kekuasaan Arya Wiraraja. Disebutkan dalam prasasti Mula Malurung yang menyebutkan nama Lamajang berasal dari masa pemerintahan Naraya Seminingrat Jayawisnuwardhana. “*Sira Naraya Kirana saksat atmaja nira Nararya Sminingrat, pinratista Juru Lamajang, pinasangaken jagad palaka, ngka neng negara Lamajang*” terjemahan dalam bahasa Indonesia “Naraya Kirana, anak Naraya Sminingrat, yang ditetapkan sebagai juru Lamajang, menguasai wilayah Lamajang”. Kata Juru dapat diartikan sebagai Seorang pemimpin yang bertanggung jawab menjaga wilayah kecil dari suatu kerajaan. Dalam konteks sistem pemerintahan, istilah "juru" diartikan sebagai wilayah bawahan atau negara bagian (Ayu, 2020).

Beberapa putra dan putri Prabu Jayawisnuwardhana juga di rajakan di beberapa daerah seperti Hering, Madura, Bali, dan sang putra Mahkota Sri Kertanegara dirajakan di wilayah Daha (Sunyoto, 2020). Hal tersebut membuktikan keberhasilan perluasan wilayah yang merupakan visi dari raja Singasari Prabu Jayawisnuwardhana, dan juga menjadi bukti dengan perluasan wilayah tersebut yang bahkan mencakup luar pulau Jawa seperti Madura dan Bali memungkinkan terjadinya migrasi budaya yang menghasilkan hibrida budaya antara budaya Jawa dengan wilayah yang dikuasai.

Kemudian saat kekuasaan Singasari berpindah ke putra mahkota, Sri Kertanegara dinobatkan sebagai raja Singasari dengan gelar abhiseka Sri Kertanegara Wikramotunggadewa, Sang raja baru tersebut memiliki visi yang kuat dalam menyebarkan luaskan kekuasaan dan mempersatukan seluruh Nusantara. Menurut Agus Sunyoto, ambisi Sri Kertanegara dalam meluaskan kekuasaannya di seluruh Nusantara dengan menyebarkan tidak saja kekuatan militer akan tetapi juga ajaran Tantrayana sekte Tantra-Bhairawa. Ajaran Tantrayana menurut Zoetmulder adalah doktrin, aturan, karya ilmiah dan karya tertentu yang berisi pelajaran tentang perbuatan gaib dan mistik (Zoetmulder dalam Istari, 2002). Tantrayana pertama kali muncul di India yang hingga saat ini dianut oleh bangsa Tibet, sedangkan di Nusantara (Indonesia) persebarannya berawal dari kerajaan Sriwijaya sekitar tahun 684 M, terdapat dalam prasasti Talangtuwo yang menyebutkan kata Vajasarira (Istari, 2002). Ajaran Tantrayana di Nusantara merupakan bentuk sinkretisme antara Hindu-Buddha dengan kepercayaan lokal yang umumnya di sebut dinamisme, sehingga ajaran perbuatan

gaib atau magis dari Tantrayana dan kepercayaan lokal melebur jadi satu dengan istilah sekte Bhairawa.

Visi dan juga ambisi Sri Kertanegara tersebut mendapat banyak penentangan dari beberapa pejabat kerajaan Singasari, salah satu yang menentang adalah Arya Wiraraja yang merupakan putra dari Naraya Kirana raja Lamajang (Lumajang Kuno) dan juga keponakan Sri Kertanegara. Arya Wiraraja yang juga disebut sebagai *Banyak Wide* (Graaf & Pigeaud, 2003) pada saat itu menjabat sebagai demung (kepala rumah tangga raja), merupakan jabatan penting yang mengatur atau berhubungan langsung dengan keselamatan keluarga kerajaan (Sunyoto, 2020). Sehingga dalam hal ini Sri Kertanegara menunjukkan kedekatan yang harmonis dan menaruh kepercayaan tersebut pada keponakannya sendiri.

Timbulnya penentangan terhadap visi Sri Kertanegara menimbulkan tersulutnya hubungan harmonis antara paman dan keponakannya tersebut. Menurut Agus Sunyoto (2020), penolakan Arya Wiraraja terhadap ambisi penyebaran ajaran Tantrayana sekte Tantra-Bhairawa tersebut merupakan bukti ke-Islamannya. Sebagai seorang Muslim, Arya Wiraraja memiliki tanggung jawab moral untuk menghentikan penyebaran ajaran tersebut. Dalam praktik ritual Tantrayana, ada beberapa langkah penting yang biasanya diikuti dalam rangka mencapai tujuan akhir atau moksa. Tujuan ini dapat dicapai melalui praktik yoga, samadhi, pengulangan mantra-mantra tertentu, dan menggunakan alat bantu yang disebut Yantra (Istari, 2002). Bahkan Agus Sunyoto (2020) mengatakan, dalam ritualnya menggunakan persembahan berupa manusia sebagai korban di ksetra-ksetra pemujaannya, seperti yang dilakukan Adityawarman dalam prasasti

berangka tahun 1375 M yang menguraikan tentang upacara yang menggunakan korban yang dilakukan Adityawarman sebagai penganut Tantrayana.

Adanya penolakan yang dianggap mengganggu visi Sri Kertanegara tersebut mengakibatkan beberapa pejabat yang menolak dan berselisih diturunkan kedudukannya, bahkan Arya Wiraraja bukan hanya diturunkan tetapi juga dibuang untuk menjadi adipati di Madura. Di Madura Arya Wiraraja menjadi adipati yang tak segan tetap menerima kedatangan kerabat keluarganya dari Singasari meskipun telah dibuat sakit hati akibat pengasingannya. Bahkan ketika konflik internal keluarga kerajaan Singasari pecah, Naraya Sanggramawijaya yang merupakan menantu Sri Kertanegara kabur dari pengejaran musuh dengan pergi ke Madura dan mendapat perlindungan serta sambutan hormat dari Arya Wiraraja.

Hancurnya Singasari dan jatuhnya kekuasaan Sri Kertanegara menjadi peluang terbesar Arya Wiraraja untuk kembali ke pulau Jawa dan mengambil apa yang telah menjadi haknya, yaitu tahta kerajaan Lamajang Tigang Juru. Pada momen itu, dalam catatan Agus Sunyoto disebutkan bahwa Arya Wiraraja dengan dua orang putranya; Arya Adikara Rangalawe dan Arya Menak koncar, beserta pasukan Madura yang dipimpin Arya Lembu Sora dan para pengikutnya membuka hutan Tarik dan membangunnya sebagai perkampungan yang dihuni oleh orang-orang Madura yang diberi nama Majapahit-Wilwatikta (Sunyoto, 2020). Dari catatan-catatan yang di dapat Agus Sunyoto tersebut memberikan salah satu bukti bagaimana migrasi orang-orang Madura beserta budaya yang dibawa ke pulau Jawa khususnya para pasukan dan pengikut Arya Wiraraja yang kemudian menjadi raja di kerajaan Lamajang Tigang Juru (Lumajang Kuno) yang

meliputi wilayah kekuasaan yaitu Lumajang, Madura, Panarukan dan Blambangan dan juga sebagai suksesor tokoh politik dibalik berdirinya kerajaan Majapahit (Mualifah, 2018).

Fase kedua, catatan bukti adanya proses migrasi antara masyarakat Madura menuju pulau Jawa maupun sebaliknya berada pada catatan H.J De Graaf dan TH. Pigeaud pada abad ke 16 sampai 18 masehi. Madura sebelum ekspansi Mataram Islam, daerah kekuasaannya terbagi menjadi dua yaitu; Madura barat (Bangkalan dan Sampang) dan Madura Timur (Sampang dan Sumenep). Pada masa-masa tersebut banyak raja-raja Madura (khususnya Madura Barat) yang mengikat tali pernikahan dengan para penguasa atau raja-raja di sepanjang pantai utara Jawa, salah satu buktinya yaitu adanya pernikahan antara Panembahan Lemah Duwur dari Aros baya dengan putri Raja Pajang yang disebut sebagai “anugrah” karena selain adanya hubungan pernikahan, pada peristiwa tersebut patih Madura berkunjung kepada Sunan Kudus dan terwujudlah antara keluarga raja Madura dengan raja Pajang di pulau Jawa. Bahkan menurut De Graaf, Jawa merupakan suatu hal penting dalam alam pikiran dan cita-cita para pemuka orang Madura (Graaf & Pigeaud, 2003). Hal tersebut dipicu oleh kondisi geografis Madura yang kering dan tandus, tanpa kota pelabuhan besar, dan kekurangan sumber daya yang dapat diekspor.

Madura barat yang secara geografis lebih dekat dengan negeri di seberangnya (Gresik dan Surabaya) dapat mengambil keuntungan lebih banyak dari perkembangan ekonomi, budaya dan politik kekuasaan di pesisir pulau Jawa di banding dengan Madura timur, sehingga persebaran masyarakat Madura barat

pada masa itu jauh lebih luas dan makmur karena secara ekonomi dan politik. Dapat disimpulkan bahwa penguasa Jawa yang memegang kendali di sepanjang pantai selatan Madura (bagian barat) mungkin memanfaatkan jumlah yang besar dari populasi yang tersedia, baik pria maupun wanita yang bekerja di rumah tangga dan di lahan pertanian yang dimiliki oleh raja dan pejabat di tanah Jawa. (Graaf & Pigeaud, 2003).

Graaf & Pigeaud (2003) dalam catatannya menyatakan bahwa aktivitas ekspansi kerajaan Mataram Islam untuk mendapatkan validitas sebagai penguasa pulau Jawa menuju ke Madura di mulai pada tahun 1589 masehi. Ekspansi besar-besaran Mataram disebabkan oleh adanya hegemoni politik dari para leluhur Mataram yang memimpikan Mataram sebagai penerima kekuasaan mutlak di pulau Jawa. Ekspansi yang di mulai oleh Panembahan Senopati Mataram tersebut belum menampakkan keberhasilannya sampai pada masa kekuasaan cucunya yang bernama Sultan Agung. Sultan Agung mulai menginvasi Madura Barat pada tahun 1617 kemudian berhasil menduduki Madura Timur (Sampang dan Sumenep) pada tahun 1624 masehi.

Pasca keberhasilam Sultan Agung tersebut, kekuasaan Madura di sentralkan atas nama Raja Mataram dengan pemimpinya yang bernama Cakraningrat. Kemudian berdasarkan berita-berita Madura dan berita-berita Belanda, sesudah direbutnya Madura secara keseluruhan, banyak sekali “tawanan perang” yang terdiri dari pria, wanita dan anak-anak yang diangkut dari pulau Madura ke beberapa wilayah pesisir pulau Jawa hingga wilayah pedalaman untuk

di pekerjakan, terutama kelompok petani dan buruh dari Madura ke daerah inti kerajaan Mataram (Graaf & Pigeaud, 2003).

Proses perpindahan penduduk atau migrasi tersebut dapat tercatat dengan baik karena prosesnya berkesinambungan dengan peristiwa lainnya. Pada kasus dalam catatan Agus Sunyoto di fase pertama, adanya proses migrasi masyarakat Madura yang datang ke Jawa dilatar belakangi oleh faktor sosial-politik seperti banyaknya pasukan dan pengikut yang mengikuti junjungannya dalam hal ini Arya Wiraraja untuk melakukan migrasi demi adanya sebuah perubahan nasib. Bukan berarti berada di tanah kelahiran tidak bisa melakukan sebuah perubahan, akan tetapi adanya peluang dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan suatu potensi kemakmuran dan tersalurnya identitas budaya yang lebih menjanjikan. Kemudian dalam catatan De Graaf dan Pigeaud, motif utama terjadinya migrasi dari Madura maupun sebaliknya karena terjadinya sebuah hubungan persahabatan antara raja-raja Jawa dan Madura pada abad ke 16 masehi, dan kemudian terjadinya ekspansi besar-besaran oleh Mataram dari abad ke 16 hingga 17 masehi yang kemudian melanjutkan 'tradisi' perpindahan penduduk sebagai tawanan perang untuk di pekerjakan di pulau Jawa.

Hasilnya pada masa itu para pengikut Arya Wiraraja maupun para "tawanan perang" Mataram mendapatkan fasilitas untuk membuka lahan, dukuh dan beradaptasi dengan lingkungan dan budaya baru sehingga di masa yang akan datang timbulah berbagai desa-desa orang Madura di pulau Jawa khususnya seputar wilayah Karesidenan Besuki yang pada masa kini secara administratif

terbagi menjadi enam kabupaten yaitu kabupaten Pasuruan, Probolinggo, Situbondo, Bondowoso, Jember dan Lumajang (Sutarto, 2006).

Kemudian fase ketiga, pada masa yang lebih muda pada abad ke 18-19 M, proses pertemuan antar budaya Jawa dan Madura terus terjadi. Pada masa ini motif migrasi masyarakat lebih ditekankan karena adanya faktor ekonomi. Migrasi atau perpindahan penduduk antar daerah di Indonesia telah menjadi fenomena yang berlangsung lama, sebagaimana yang dicatat oleh Agus Sunyoto. Sejarah panjang migrasi di Indonesia dapat dilihat dari perpindahan penduduk yang dilakukan oleh beberapa kelompok etnis tertentu seperti suku Madura, dan dari waktu ke waktu, intensitas perpindahannya semakin meningkat dengan cepat.

Salah satu faktor ekonomi mengapa banyak masyarakat Madura yang melakukan migrasi adalah karena kondisi geografis pulau Madura yang kurang menguntungkan untuk usaha pertanian. Menurut Andreas, sebagian besar tanah di pulau Madura terdiri dari tanah kapur yang terbentuk pada jaman pleistosen, yang umumnya kurang subur untuk pertanian (Kresnan Hadi, 2016). Dengan kondisi tersebut sangat tidak memungkinkan untuk usaha pertanian, karena curah hujan yang sangat rendah, terutama pada masa musim kemarau.

Pada akhir abad ke-19 M, tepatnya tahun 1870, pemerintah Hindia Belanda menerapkan undang-undang Agraria sebagai dampak dari kebijakan liberal pemerintah di Belanda. Undang-undang tersebut memberikan banyak peluang kepada sektor swasta dalam bidang ekonomi, sehingga sebagian besar wilayah di Jawa Timur mulai mengalami pembukaan lahan perkebunan yang mengandalkan tenaga kerja manusia (Kresnan Hadi, 2016). Pembukaan lahan

perkebunan secara masif sangat membutuhkan banyak tenaga manusia. Sehingga untuk mendapatkan hasil yang maksimal dengan modal yang minimal, pihak swasta banyak mendatangkan tenaga kerja murah yang berasal dari Madura, baik sebagai pekerja tetap maupun musiman.

Setiap tahun, ribuan penduduk Madura bermigrasi ke Jawa Timur. Kedatangan mereka tidak hanya sebagai pekerja di perkebunan, tetapi banyak di antara mereka yang juga menjadi petani kecil. Besarnya jumlah penduduk yang pindah tersebut disebabkan oleh adanya banyak kesempatan kerja di sektor perkebunan dan juga janji-janji menarik yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan perkebunan. Misalnya, jika mereka berhasil mengajak banyak anggota keluarga untuk bekerja, mereka akan diberikan lahan garapan yang luas dan diberi jabatan sebagai mandor di perkebunan tersebut. Pada masa itu jabatan mandor merupakan impian yang banyak di harapkan oleh masyarakat pribumi (Kresnan Hadi, 2016).

Migrasi tersebut terus berlanjut hingga terjadinya krisis ekonomi global pada awal abad ke-20 M (Syamsuddin, 2007), yang mengakibatkan penurunan pasar komoditas perkebunan di pasar internasional. Hal ini menyebabkan banyak pekerja musiman yang kehilangan pekerjaan mereka. Dampaknya, banyak dari mereka memutuskan untuk menetap di sekitar perkebunan dan mencari pekerjaan alternatif. Demikian terjawablah mengapa di wilayah Karesidenan Besuki yang kini di kenal sebagai wilayah Pandalungan (Pasuruan, Pronolinggo, Situbondo, Bondowoso, Jember dan Lumajang) menjadi basis tempat tinggal masyarakat berbudaya Jawa dan Madura, dan juga daerah Karesidenan Besuki secara

geografis ideal bagi masyarakat dengan mata pencaharian petani, pekerja perkebunan dan nelayan.

Beberapa sumber di atas cukup jelas menunjukkan secara kronologis dan praksis bagaimana pertemuan budaya Madura dan Jawa bagian utara (Besuki) yang menjadi landasan terbentuknya kebudayaan baru, kebudayaan dengan konsep cultural hybridity yang dikenal sebagai kebudayaan Pandalungan. Dan juga sumber sejarah tersebut dapat dihubungkan dengan penuturan yang disampaikan oleh informan kunci yang hanya mengetahui jejak sejarah Pandalungan berdasarkan tradisi lisan yang diceritakan secara turun-temurun.

Berdasarkan data lapangan, budaya Pandalungan dapat dilihat sebagai bentuk hibrida budaya melalui beberapa faktor seperti: (1) Adanya pengaruh dari elemen budaya yang berbeda. Misalnya, tradisi sandingan malam jum'at legi merupakan bentuk perpaduan antar elemen budaya yang akan dijelaskan pada pembahasan berikutnya. (2) Integrasi nilai-nilai tradisional dan modern. Perilaku masyarakat yang dapat beradaptasi dengan modernitas seperti misalnya, dahulu untuk menyebarkan informasi atau undangan hendak dilaksanakannya sebuah tradisi hanya menggunakan media speaker atau TOA Masjid atau Langgar. Pada masa kini dapat menggunakan handphone untuk menyebarkan undangan atau informasi hendak diadakannya tradisi bulanan seperti sandingan malam jum'at legi, sehingga dengan media tersebut jangkauan informasi untuk masyarakat semakin luas. (3) Respon terhadap perubahan lingkungan sosial, pada pembahasan selanjutnya akan dijelaskan bagaimana konsep egalitarianisme

kebudayaan Pandalungan dapat mengontrol respon masyarakat Pandalungan terhadap setiap adanya perubahan lingkungan sosial.

Sejarah adalah segala yang sudah terjadi di masa lalu, baik itu berlangsung dalam waktu yang sangat lama atau bahkan hanya dalam sepersekian detik yang telah berlalu. Menurut Padiatra (2021), sejarah adalah sebuah peristiwa di masa lalu yang kemudian dituliskan, kemudian peristiwa tersebut di rekonstruksi ulang dengan berbagai macam sumber-sumber yang tersedia dan telah melewati proses kritik guna memperoleh keabsahan peristiwa yang sedang digubah. Keabsahan tersebut dapat bersandar pada kebendaan, ada juga yang mengikuti standarisasi pada sumber-sumber tertulis dan ada yang mendasarkan diri pada sumber refrensi yang bersifat lisan.

Thompson memberikan sebutan bagi sumber tradisi lisan sebagai “suara dari masa silam” dengan kemudian memberikan keterangan yang memungkinkan sebuah peristiwa ditulis menggunakan sumber-sumber yang berangkat dari wawancara-wawancara seseorang atau para tokoh guna mencari benang merah pada peristiwa yang telah terjadi (Thompson dalam Padiatra, 2021). Tradisi lisan, meskipun memiliki kelebihan dan kekurangannya, menawarkan aspek menarik yang dapat menjadi tambahan penting dalam penyelidikan sumber untuk melengkapi rekonstruksi suatu peristiwa yang pernah terjadi.

Jejak sejarah kebudayaan Pandalungan yang didapatkan dari informan merupakan penuturannya terkait apa yang informan dapatkan dari cerita-cerita para leluhur. Menurut bapak Syamsul Hadi selaku informan, Lumajang merupakan wilayah strategis dari segi geografis karena berada tepat di lereng

gunung Semeru yang dari dulu hingga kini disakralkan oleh umat beragama Hindu. Senada dengan data penelitian sejarah, Lamajang (Lumajang kuno) menurut cerita mitologi yang terdapat dalam kitab Tantu Pagelaran, Gunung Semeru merupakan bagian dari puncak gunung Mahameru di India yang telah dipotong oleh para dewa dan kemudian dibawa ke Pulau Jawa yang sebelumnya selalu berguncang (Mansur Hidayat dalam Ayu, 2020). Lumajang, dengan keberadaan Gunung Semeru sebagai tempat yang dianggap suci, telah menjadikan wilayah tersebut sebagai tujuan ziarah yang kemudian memperluas wilayah tersebut sebagai tempat tinggal. Situasi ini telah ada sejak zaman kerajaan Kediri, Singhasari, dan terus berlanjut hingga sekarang.

Bukti catatan sejarah mengatakan bahwa potensi budaya Lumajang sudah dikenal keberadaannya serta sudah banyak dikunjungi oleh masyarakat luar daerah sejak masa kerajaan Kadhiri (masa pemerintahan Kameswara 1182 M), Lumajang berkembang menjadi sentra keagamaan karena kepentingan ritual agama Hindu para pejabat kerajaan di gunung Semeru (dibuktikan dengan peninggalan sejarah berupa prasasti Ranu Kumbolo, Arca Pada, Prasasti Tesirejo dan sebagainya) (Pareno, 2017). Faktor tersebut didukung oleh produktivitas tanah yang subur di Lumajang dan aliran sungai yang selalu mengalir sepanjang tahun tanpa pernah kering. Kemudian pasca jatuhnya Kediri, Lumajang kuno menjadi kadipaten dibawah kekuasaan kerajaan Singasari seperti yang diterangkan sebelumnya.

Seperti yang dipaparkan diatas bahwasannya selain membawa imigran dari Madura, keluarga besar Arya Wiraraja dari Singasari mayoritas beragama Hindu-

Buddha, bahkan menurut Agus Sunyoto dalam bukunya dijelaskan bahwa keturunan Arya Wiraraja dari klan Pinatih yang beragama Hindu di Bali setiap tahun menziarahi situs makamnya (Sunyoto, 2020). Sehingga berdasarkan informasi tersebut, kerukunan dalam beragama, berbudaya dan kegiatan sosial lainnya di kabupaten Lumajang sudah sangat baik dan menjadi bukti adanya perbedaan antar agama atau budaya bukan menjadi suatu masalah, pungkas informan.

Kemudian informan menjelaskan sejarah dari salah satu bentuk kebudayaan Pandalungan yaitu tradisi Sandingan Malam Jum'at Legi. Menurut penuturan leluhur, tradisi sandingan malam jum'at legi pada masa dahulu sebelum kedatangan Islam dalam praktiknya hanya menyajikan sebuah sandingan atau sajian atau sesajen yang dipersiapkan pada malam jum'at legi pada kalender Jawa untuk menolak hal-hal buruk yang disebabkan oleh makhluk gaib. Kemudian setelah Islam datang, tradisinya tetap dilestarikan akan tetapi ritualnya mengandung nilai-nilai ke-Islaman seperti khotmil Qur'an dan sebagainya. Akan tetapi menurut informan, sekitar 30 sampai 40 tahun yang lalu tradisi tersebut di kecamatan Senduro, kabupaten Lumajang sempat mandek atau tidak dilestarikan. Sampai pada kisaran tahun 1980-an terdapat tiga tokoh yang mulai melestarikan kembali tradisi tersebut, yaitu; alm. bapak Chayyun, alm. bapak Barul Ulum dan alm. bapak Sunar. Ketiga tokoh tersebut sukses mewariskan pentingnya melestarikan nilai-nilai ajaran leluhur yang berhasil meleburkan antara dua budaya yang berbeda menjadi konsep cultural hybridity. Sehingga sampai saat ini tradisi sandingan malam jum'at legi tersebut di wilayah Lumajang khususnya di

kecamatan Senduro masih terus dilestarikan sebulan sekali pada hari Kamis malam Jum'at legi di penanggalan Jawa.

Tradisi sandingan malam Jum'at legi dalam kebudayaan Pandalungan dapat diinterpretasikan sebagai manifestasi dari warisan budaya lisan yang kaya dan penting dalam masyarakat Pandalungan tersebut. Warisan budaya lisan atau tradisi lisan menurut Sibarani dalam Wati (2023) menyatakan bahwa warisan budaya lisan atau tradisi lisan tidak hanya mencakup kelisanan, seperti tuturan yang kemudian dikategorikan dalam bentuk lisan, tetapi juga bentuk dan pola kelisanan sehingga dapat berkembang menjadi pengetahuan masyarakat dan diwariskan melalui berbagai versi dari generasi ke generasi. Selanjutnya Irwanto dalam Wati (2023) menambahkan bahwa tradisi lisan bersifat dinamis, tradisi lisan tidak hanya mencakup dongeng, mitologi dan legenda pada umumnya, tetapi juga informasi mengenai cara pandang, identitas, ekspresi serta sistem religi dan kepercayaan masyarakat.

Tradisi sandingan malam Jum'at legi tidak memiliki catatan tertulis yang pasti mengenai asal-usul dan perkembangannya. Informasi mengenai tradisi ini lebih banyak disampaikan secara lisan dari generasi ke generasi, hal tersebut menunjukkan bahwa tradisi sandingan ini lebih bersifat lisan daripada tertulis. Tradisi sandingan dalam penuturannya diiringi dengan cerita-cerita yang disampaikan secara lisan, cerita-cerita tersebut memberikan peranan penting dalam memperkuat dan mempertahankan tradisi tersebut, serta memberikan konteks dan makna yang lebih dalam bagi pelaksanaannya. Tokoh-tokoh masyarakat memiliki peran penting dalam penyuluhan tradisi lisan tradisi

sandingan malam jum'at legi ini. Pengetahuan dan pengalaman langsung terkait tradisi sandingan yang dimiliki oleh pelaku sekaligus penjaga langsung tradisi ini sangat penting untuk melestraikan tradisi tersebut kepada generasi selanjutnya.

Tradisi sandingan malam jum'at legi memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat Pandalungan. Selain sebagai prosesi ritual, tradisi sandingan juga menjadi media untuk menyampaikan nilai-nilai budaya, norma-norma sosial, dan pengetahuan-pengetahuan lainnya secara lisan kepada anggota masyarakat. Tradisi sandingan malam jum'at legi memiliki fleksibilitas untuk beradaptasi dengan perubahan zaman dan lingkungan. Tradisi sandingan berkembang seiring berjalannya waktu, akan tetapi inti dan esensi dari tradisi tersebut tetap dipertahankan dalam bentuk penuturan lisan yang terus di sampaikan dari satu generasi ke generasi selanjutnya.

Tradisi sandingan malam jum'at legi yang merupakan bagian dari tradisi lisan sebagaimana diuraikan diatas bahwa informasi tentang bagaimana asal mula tradisi ini berlangsung, bagaimana prosesnya dan dampak manfaatnya kepada masyarakat didapatkan dari penuturan leluhur yang di wariskan secara turun-temuruan sehingga menjadi sebuah kearifan dan pengetahuan bagi masyarakat lokal Pandalungan Senduro. Dan juga tradisi sandingan dapat dikembangkan bersamaan dengan sejarah lokal agar mendapatkan benang merah seiring perkembangan tradisi, sejarah lokal dan manusianya yang akan di bahas pada uraian selanjutnya.

4.2. Kondisi Sosial dan Geografi Kebudayaan Pandalungan di Lumajang

Masyarakat Pandalungan kecamatan Senduro kabupaten Lumajang pada umumnya memiliki latar belakang sebagai masyarakat agraris. Secara geografis kecamatan Senduro berjarak 17km dari pusat kota Lumajang, berada tepat di sebelah utara lereng Gunung Semeru. Hidup diatas tanah subur sebagai dampak geografis wilayah gunung Semeru yang hampir setiap tahunnya beraktifitas vulkanis dengan skala yang sangat kecil. Sehingga mayoritas masyarakat kecamatan Senduro mengandalkan komoditas pertanian sebagai mata pencaharian utama, dan juga sebagian kecilnya berprofesi lainnya seperti pedagang, aparatur sipil negara berupa tenaga pengajar, tenaga kesehatan, aparatur desa dan sebagainya.

Masyarakatnya tersebar di berbagai kampung, dukuh, atau desa. Terdapat 12 desa yang menjadi tempat tinggal masyarakat Pandalungan kecamatan Senduro yaitu; desa Argosari, Bedayu, Bedayutalang, Burno, Kandangan, Kandang Tepus, Pandansari, Purworejo, Ranu Pani, Sarikemuning, Senduro dan Wonocepokoayu. Dari masing-masing desa tersebut terdapat beberapa desa yang dominan kebudayaan Jawa seperti contoh desa Senduro dan Kandang Tepus, terdapat juga desa dengan mayoritas budaya Madura seperti Pandansari dan Sarikemuning. Dan juga yang menarik, dua desa sisanya seperti desa Argosari dan Ranu Pane yang menerapkan budaya 'Tengger' sebagai pembeda dari desa-desa lain di kecamatan Senduro. Keunikan dominasi kebudayaan tersebut, secara umum kecamatan Senduro menjadi salah satu wilayah budaya Pandalungan yang terdapat di kabupaten Lumajang.

Berdasarkan data yang didapat dari penuturan warga setempat, wilayah kecamatan Senduro pada zaman dahulu merupakan wilayah yang selalu dilewati oleh peziarah yang ingin berkunjung untuk ‘sembahyang’ di lereng gunung Semeru yang khususnya oleh umat Hindu, puncak gunung Semeru di anggap sebagai tempat yang sakral dan suci. Menurut Ayu (2020) kedudukan wilayah Lamajang (Lumajang kuno) tidak dapat di pisahkan dari lokasinya yang berada di wilayah gunung Semeru, seperti dalam kitab Tantru Pagelaran disebutkan bahwa gunung Semeru merupakan bagian dari puncak gunung Mahameru di India yang telah dipotong dan dibawa ke pulau Jawa yang sebelumnya selalu berguncang. Sehingga Lumajang khususnya kecamatan Senduro yang berada di bawah lereng gunung Semeru oleh umat Hindu menjadi wilayah tujuan ziarah. Hal tersebut bertahan sejak era kerajaan Kadhiri, Singosari, Majapahit dan terus bertahan hingga masa kini.

Sebagai agama mayoritas pada era Singosari hingga Majapahit kemudian menjadi jalur peziarahan umat Hindu sejak zaman dahulu, Lumajang menjadi pusat peribadatan agama Hindu di wilayah sekitaran Jawa dan Bali. Hal tersebut pada masa kini dibuktikan dengan adanya beberapa Pure (tempat ibadah umat Hindu) baik yang kuno maupun yang modern bernama Pure Mandara Giri Semeru Agung, dan juga juga total pemeluk agama Hindu menjadi jumlah terbanyak ketiga setelah pemeluk agama Islam di Lumajang. Berdasarkan data agregat penduduk kabupaten Lumajang berdasarkan agama semester 1 tahun 2019, jumlah penganut agama Hindu di Lumajang berjumlah 6.419 pemeluk.

Khusus di wilayah kecamatan Senduro dari total berjumlah penduduk sebanyak 49.571 jiwa, dengan pembagian pemeluk agama sejumlah; 44.930 (Islam), 4.518 (Hindu), 102 (Kristen), 19 (Katolik), 2 (Budha) dan masing-masing 0 untuk Konghucu dan lainnya (DKB Semester I Lumajang Tahun 2019, 2019). Islam dan Hindu menjadi agama dengan pengikut terbanyak di kecamatan Senduro. Dengan jumlah tersebut semakin menegaskan bahwasannya wilayah Lumajang dan khususnya kecamatan Senduro menjadi daerah yang dulunya pernah menjadi basis mayoritas pemeluk agama Hindu. Tentunya dengan dinamika yang berkembang selanjutnya, posisi mayoritas pemeluk Hindu tersebut bergeser dengan menjadikan Islam sebagai agama mayoritas. Akan tetapi karakteristik budaya Pandalungan sebagai kebudayaan yang dominan di wilayah Senduro, berikut dengan berbagai tradisi yang mengikutsertakan karakteristik Islam Nusantara menjadikan berbagai peninggalan tradisi terdahulu tidak serta merta hilang begitu saja. Begitu juga dengan berbagai kondisi sosial geografis masyarakat Senduro yang tidak menampakkan perubahan secara signifikan hingga masa kini.

Pada masa kerajaan Singosari, Lumajang yang pada masa kini masuk wilayah Senduro, Candipuro, Pronojiwo dan sebagian wilayah selatan kabupaten Malang merupakan wilayah kadipaten Singosari yang berfokus pada komoditas pertanian dan tempat pemukiman dikarenakan kondisi tanah yang subur dan dialiri oleh banyak sungai besar yang tidak pernah kekurangan air sepanjang tahun (Sunyoto, 2020). Sehingga pada masa kini pun wilayah-wilayah tersebut, termasuk Senduro menjadi wilayah dengan komoditas utama pertanian dan

menjadi tempat persilangan antar agama dan kebudayaan. Selain menjadi destinasi wisata religi umat Hindu, potensi wisata alam menjadi magnet utama kedatangan para penduduk dari berbagai latar belakang yang kemudian bermukim maupun hanya sekedar singgah di wilayah kecamatan Senduro.

Pada masa kini kecamatan Senduro terkenal sebagai daerah dengan hasil pertanian terbaik di kabupaten Lumajang. Julukan Lumajang sebagai “Kota Pisang” salah satu daerah yang menjadi kontributor terbesar penghasil buah pisang adalah kecamatan Senduro. Hampir disetiap perkebunan milik warga Senduro terdapat pohon pisang dengan berbagai varian jenisnya. Bahkan terdapat satu pasar khusus buah pisang yang diberi nama “Pasar Gedang” sebagai pusat aktifitas jual-beli buah pisang. Sehingga Senduro sebagai wilayah dengan tanahnya yang subur menjadikan profesi petani sebagai pekerjaan mayoritas masyarakat Senduro.

Dengan kondisi geografis yang berada tepat di lereng gunung Semeru, begitu juga dengan kondisi tanah yang subur serta adanya sebuah harmoni antar masyarakatnya, menjadikan kecamatan Senduro sebagai wilayah di kabupaten Lumajang yang tetap menjaga dengan teguh warisan tradisi dan budaya. Tidak dapat dipungkiri bahwasannya dengan melestarikan tradisi dan budaya tersebut sebagai sebuah media pelestarian tradisi juga sebagai bentuk ungkapan syukur kepada Yang Maha Kuasa terhadap limpahan kenikmatan melalui tanah yang subur, hasil pertanian yang terus bergantian menghasilkan produk pertanian sepanjang tahun. Menurut bapak Syamsul Hadi, masyarakat Senduro

mengistilahkan hasil tanah yang subur dengan sebutan “Lumintu”, yang menurutnya berarti panen terus menerus tanpa henti.

Aktifitas masyarakat sebagai petani tidak terbatas pada gender tertentu. Menurut informasi lapangan, aktifitas pertanian di setiap kebun dapat dikerjakan oleh laki-laki maupun perempuan. Bapak Syamsul Hadi memberikan contoh ketika proses perawatan pohon-pohon pisang tak jarang beliau mengajak istrinya untuk turut membantu. Beliau menggunakan arit atau celurit yang disambungkan dengan batang bambu panjang untuk memotong daun pohon pisang yang sudah tua, kemudian istrinya membersihkan potongan-potongan daun tua tersebut untuk dikumpulkan di suatu tempat.

Karena mayoritas berprofesi sebagai petani, sehingga tak jarang dalam satu keluarga dari bapak, ibu dan anak usia remaja berprofesi sebagai seorang petani. Menurut bapak Rowi, petani setempat mengatakan bahwa “tani iku warisane poro sepuh, diwehi tanah ombo lan tingkas kanggo tani gawe jagane urip. Mboten ngertos malih sakmangke lek mboten enten seng gelem tani, utamane arek-arekane”, berarti profesi petani adalah warisan leluhur, kita diberi tanah luas dan subur untuk bertani demi menjaga kelangsungan hidup. Saya tidak tahu lagi bagaimana jika sudah tidak ada yang mau bertani terutama para anak-anak mudanya tuturnya . Sehingga aktifitas bertani merupakan sebuah identitas bagi masyarakat Senduro. Meskipun terdapat sebagian yang profesi utamanya bukan bertani, akan tetapi mereka pasti memiliki sebuah lahan pertanian dan perkebunan yang akan di garap setiap akhir pekan.

Aktifitas para petani tersebut tidak pernah mengenal libur. Bagi yang profesi utamanya sebagai seorang petani, setiap harinya mereka berangkat bertani di kebun pukul 6 pagi waktu setempat. Menjelang waktu dzuhur, para petani kembali kerumah mereka untuk istirahat. Setelah beristirahat tak jarang mereka untuk kembali lagi ke kebun untuk sekedar menyelesaikan pekerjaan pada hari itu dan juga terdapat beberapa petani yang juga mencari pakan ternaknya sembari menunggu waktu sore sebelum kembali kerumah mereka masing-masing. Sebagai prinsip dalam menjalani aktivitas sehari-hari, petani Pandalungan di kecamatan Senduro mengutamakan akal sehat dan melakukan perhitungan yang matang terhadap setiap tindakan yang mereka lakukan dengan penuh dedikasi. Mereka menghargai segala hal yang berkualitas sebagai imbalan dari proses yang luar biasa. Bertani bukanlah hal yang sederhana, semua dilakukan dengan penuh pertimbangan dan kepekaan terhadap lingkungan sosial dan alam.

Kehidupan sosial masyarakat Pandalungan Senduro mencakup norma-norma sosial yang didasarkan pada karakteristik aspek alamiah dan aspek sosial di kabupaten Lumajang yang secara jelas menjadi bagian dari wilayah Pandalungan yang dibuktikan dengan ciri-ciri masyarakatnya. Karakteristik masyarakat Pandalungan Senduro menggambarkan karakteristik umum masyarakat budaya Pandalungan, memiliki sikap sederhana, lugu, mengutamakan kekeluargaan, gotong royong serta mengedepankan unsur keadilan dan sama rata. Selain hal tersebut, masyarakat Pandalungan Senduro memiliki jati diri giat dalam bekerja, suka bekerja keras, konsisten dan memiliki puncak kesabaran yang dinamakan

'pasrah' apabila segala usaha yang telah dilakukan tidak mendapatkan sesuatu yang diharapkan.

Terdapat sedikit perbedaan karakter dalam internal masyarakat Pandalungan Senduro ketika dalam pola interaksi sosial antar warganya. Perbedaan tersebut terletak pada masyarakat Pandalungan yang lebih kuat karakteristik budaya Maduranya. Bagi mereka riskan secara etika apabila seorang perempuan menerima tamu lawan jenis secara langsung diruang tamu, tanpa adanya ikatan kekerabatan yang jelas dan dekat. Setiap tamu laki-laki yang hanya seorang diri tanpa ditemani oleh tamu perempuan apabila bertamu hanya dipersilahkan dan diterima di pelataran rumah apabila di dalam rumah tersebut hanya ada perempuan seorang diri. Tamu tersebut dipersilahkan masuk apabila laki-laki pemilik rumah tersebut telah datang ataupun apabila sedang menunggu kedatangan pemilik rumah, etika apabila dalam waktu yang tak kunjung datang maka tamu tersebut dengan kesadaran dirinya harus segera pamit mengundurkan diri. Dalam jurnal penelitian Syamsuddin (2007) istilah yang menjelaskan pola interaksi sosial tersebut disebut dengan istilah parseko.

Hal tersebut menggarisbawahi pentingnya bagi seorang laki-laki untuk mempertahankan dan melindungi kehormatan para wanita di lingkungan keluarganya dalam budaya Pandalungan. Demikian pula, seorang perempuan diharapkan memegang teguh komitmennya dalam turut menjaga kehormatan dalam keluarganya. Sehingga konsep kesetaraan yang tergambar dalam hal tersebut adalah ketika para lelaki dan wanita memiliki kesamaan dalam kesadaran untuk saling menjaga kehormatannya satu sama lain. Dengan begitu dapat

membuktikan bahwasannya terdapat perbedaan pemahaman serta penerapan antara konsep kesetaraan ala barat dengan timur.

Budaya Pandalungan memiliki ragam tradisi dan kebudayaan mulai dari tradisi bercocok tanam bagi para petani seperti yang telah dijelaskan diatas, tradisi dalam upacara keagamaan seperti tradisi Sandingan Malam Jum'at Legi dan berbagai tradisi lainnya mengajarkan banyak tentang nilai-nilai kesetaraan antara pemimpin dengan masyarakat sekitar. Para pemimpin, tokoh masyarakat dengan masyarakat pada umumnya menjalin satu kesatuan untuk saling terhubung dan diikat dengan berbagai tradisi kebudayaan Pandalungan. Selain tradisi sandingan yang memuat banyak nilai-nilai kesetaraan dalam lingkup sosial, menurut bapak Syamsul Hadi terdapat beberapa tradisi yang juga memiliki nilai kepedulian, gotong royong dan kesetaraan yang tidak secara formal dalam pengaplikasiannya, yaitu tradisi Sonjo dan Ater-Ater.

Sonjo

Sonjo merupakan tradisi Pandalungan yang mencakup hubungan atau interaksi antar masyarakat Pandalungan Senduro. Sonjo dapat diartikan berdasarkan pola yang terlihat dilapangan adalah sebuah praktek silaturahmi yang kerap dilakukan oleh masyarakat Pandalungan pada rentan waktu akhir bulan ramadhan hingga bulan dzulhijah. Tradisi sonjo tersebut menghapus unsur stratifikasi sosial dalam lingkungan masyarakat Pandalungan kecamatan Senduro. Seluruh lapisan masyarakat dari pejabat desa, para tokoh masyarakat dan keseluruhan masyarakat saling mengunjungi dari rumah ke rumah tanpa membedakan satu sama lain. Hal tersebut senada dengan konsep egalitarianisme

yang memandang segala sesuatu memiliki persamaan hak, kesetaraan dan derajat yang sama.

Tradisi sonjo dalam masyarakat Pandalungan Senduro mencerminkan nilai-nilai moral dan kekerabatan yang sangat dihargai. Hal ini terbukti dari adanya hubungan sosial yang erat antar anggota masyarakat, di mana setiap orang saling mengenal satu sama lain secara mendalam. Lebih dari sekadar mengenal, setiap individu di masyarakat tersebut memiliki pengetahuan yang luas mengenai anggota-anggota lainnya, bahkan dari ujung ke ujung wilayah desa. Terdapat ikatan kekerabatan yang kokoh antar keluarga-keluarga di komunitas tersebut. Bahkan setiap ada masyarakat atau tetangga yang meninggal dunia, masyarakat yang melayat bukan hanya lingkungan sekitar saja, masyarakat yang jaraknya sedikit berjauhan asalkan mendengar kabar tersebut, maka akan datang untuk melayat ke rumah duka. Hal tersebut menjadikan identitas masyarakat Pandalungan Senduro yang peduli terhadap satu sama lain.

Konsep hubungan kekerabatan dalam budaya Pandalungan menurut Subahri (2022) terdapat 2 jenis kekerabatan, pertama tretan semak dan yang kedua tretan jeuh. Dalam budaya Pandalungan Senduro juga mengenal konsep hubungan kekerabatan tersebut yang menurut bapak Syamsul Hadi disebut dengan dulur celak dan dulur tebih. Secara bahasa antara tretan dan dulur memiliki arti yang sama yaitu 'saudara', semak dan celak berarti 'dekat', jeuh dan tebih berarti 'jauh'. Secara istilah tretan semak atau dulur celak adalah keluarga/ famili internal yang memiliki ikatan darah secara langsung seperti saudara kandung dan sepupu, atau saudara dalam satu kakek-nenek. Sementara tretan jeuh atau dulu tebih

adalah keluarga atau famili jauh yang memiliki ikatan keluarga dari kakek-nenek buyut seperti dupupu, telupupu, patangpupu atau lebih jauh lagi yang hingga tidak terdeteksi lagi silsilah keluarganya. Berdasarkan data yang didapat di lapangan, pada umumnya di kecamatan Senduro setiap desanya awal mulanya pada zaman dahulu hanya ditinggali oleh beberapa keluarga saja, membentuk sebuah perdukahan yang kemudian beranak-pinak hingga membentuk sebuah pedesaan. Sehingga dengan hal tersebut dapat menjadi faktor mengapa masyarakat dari ujung ke ujung desa dapat mengenal dan mengetahui satu sama lain.

Ater-ater

Tradisi ater-ater merupakan tradisi yang berbasis interaksi antar masyarakat berupa saling berbagi atau mengantarkan makanan ke tetangga sekitar pada momen-momen tertentu. Secara bahasa tidak ditemukan dalam perbendaharaan kata ilmiah mengenai arti ater-ater tersebut. Akan tetapi berdasarkan dari informasi warga setempat mengacu dari maknanya, ater-ater dapat diartikan sebagai ‘penyaluran’ atau ‘hantaran’. Tradisi ater-ater masyarakat Pandalungan Senduro mengandung keunikan karena merupakan perpaduan antara budaya lokal dengan nilai-nilai ke-Islaman. Ater-ater dilaksanakan pada hari besar Islam di bulan-bulan hijriah.

Masyarakat Lumajang khususnya di kecamatan Senduro berdasarkan data lapangan meyakini bahwa tradisi ater-ater sudah berjalan puluhan tahun bahkan ratusan tahun lalu. Setiap informan yang memberikan informasi mengatakan bahwa sejak mereka kecil dan dari cerita leluhur mereka sudah melestarikan tradisi ater-ater tersebut. Menurut bapak Syamsul Hadi, tradisi tersebut dapat

menanamkan semangat persatuan antar masyarakat dengan adanya kepedulian satu sama lain. Sehingga masyarakat memiliki prinsip bahwa mereka memiliki ikatan saudara dalam kemasyarakatan, setiap orang adalah saudara bagi yang lain.

Kepedulian satu sama lain yang menimbulkan semangat persatuan dalam tradisi ater-ater juga berhubungan dengan tradisi sonjo atau silaturahmi. Silaturahmi menurut Jailani dan Rachman (2020) merupakan sarana untuk berinteraksi dengan baik, bertutur kata dengan baik, tidak menyakiti perasaan, mengormati dan menghargai orang lain. Sehingga antara tradisi sonjo dan ater-ater pada bulan-bulan hijriyah tertentu menjadi kombinasi yang sempurna dalam karakteristik masyarakat Pandalungan Senduro, yakni pada bulan syawal pasca hari raya Idul Fitri.

Tradisi ater-ater atau mengantarkan makanan pada saudara dan tetangga sekitar dapat dilihat dari dua faktor, yaitu waktu dan jenis makanan yang hendak di bagikan ke tetangga. Masyarakat Senduro pada umumnya dalam satu keluarga hanya membagikan satu kali saja di setiap momentum bulan pengantaran ater-ater. Tidak setiap bulan pada bulan hijriah dijadikan momentum ater-ater oleh masyarakat Senduro, hanya saja yang paling sering adalah pada saat bulan Muharram, Ramadhan dan Syawal.

Pada bulan Muharram, masyarakat Senduro mengantarkan jenis makanan berupa bubur putih dengan lauk telur dadar, tempe, tahu, kuah santan dan sebagainya yang diberi nama 'jenang suro'. Dilaksanakan setiap tanggal 10 Muharram yang menurut bapak Syamsul Hadi diidentikkan dengan bulan

kesedihan umat Islam, karena pada tanggal tersebut merupakan hari meninggalnya cucu Nabi Muhammad pada peristiwa perang Karbala pada zaman dahulu.

Pada bulan Ramadhan tradisi ater-ater umumnya di laksanakan dua kali yaitu awal Ramadhan hingga tanggal 17 Ramadhan sebagai puncak memperingati Nuzulul Qur'an, dan pada tanggal 21 hingga 30 Ramadhan (sepuluh hari terakhir Ramadhan) sebagai momentum hendak menyambut hari raya Idul Fitri. Makan yang dibagikan atau diantarkan ke masyarakat pada umumnya adalah nasi atau lontong (nasi yang dibungkus daun pisang berbentuk kerucut dan dimasak selama 8 jam) dengan lauk ayam bumbu merah atau opor ayam pada 10 hari terakhir bulan Ramadhan.

Pada bulan Syawal merupakan bulan yang identik dengan tradisi ater-ater yang dikombinasikan dengan tradisi sonjo. Setiap masyarakat yang berkunjung silaturahmi pada umumnya akan disediakan makanan oleh tuan rumah yang dikunjungi, baik berupa makanan ringan sampai makanan berat. Makanan yang disuguhkan bervariasi, akan tetapi pada umumnya adalah lontong dan ketupat dengan lauk opor ayam atau bakso sapi. Puncaknya pada tanggal 7 Syawal terdapat istilah kupatan atau peringatan 7 hari bulan Syawal dengan berkumpul dan berdo'a bersama, kemudian saling membagikan makanan ketupat ke tetangga sekitar.

Tradisi ater-ater selain memperkuat hubungan sesama umat Islam juga memperkuat hubungan persaudaran antar masyarakat. Dalam berbagi makanan tidak memandang tetangganya beragama apa atau berasal dari suku apa, karena status mereka adalah sama yaitu warga masyarakat Pandalungan kecamatan

Senduro. Bapak Syamsul Hadi mengatakan bahwa tradisi ater-ater juga merupakan bentuk rasa syukur kepada Gusti Allah swt, dengan berbagi kebahagiaan berupa makanan tersebut adalah pengungkapan rasa syukur terbaik menurut masyarakat Pandalungan Senduro. Sehingga tradisi tersebut sangat mencerminkan pola egalitarianisme dan toleransi antar sesama anggota masyarakat Pandalungan kecamatan Senduro.

4.3. Prinsip Egalitarianisme Kebudayaan Pandalungan

Prinsip adalah aturan atau keyakinan yang menjadi dasar bagi tindakan, pemikiran atau keputusan seseorang. Prinsip-prinsip tersebut dapat berasal dari nilai-nilai moral, etika, hukum atau pengalaman empiris seseorang. Menerapkan prinsip-prinsip ini membantu seseorang bertindak dengan konsistensi, integritas dan tujuan tertentu dalam pikiran (Covey, 2020). Sehingga prinsip merupakan sebuah patokan tentang konsistensi yang didasarkan pada keyakinan atau pemikiran yang kemudian menjadi sebuah output identitas suatu individu atau kelompok.

Setiap kelompok masyarakat yang hidup berdampingan memiliki sebuah prinsip yang berbeda satu sama lain. Setiap prinsip tersebut menghasilkan sebuah istilah, yaitu sektarian-primordialisme (Falah, 2023), yang menjelaskan tentang kondisi sosial kemasyarakatan yang bersifat homogen. Pada kondisi tersebut setiap kelompok masyarakat cenderung terkotak-kotakan sesuai kelompoknya masing-masing akibat dari adanya berbagai perbedaan, termasuk adanya perbedaan sebuah prinsip. Sehingga apabila faktor sektarian primordialisme tersebut masih berlaku dalam praktik sosial kemasyarakatan, maka pola

kehidupan egalitarianisme yang menempatkan kedudukan kesetaraan dalam kehidupan bersama akan sulit tercapai.

Prinsip egalitarianisme seperti yang di jelaskan sebelumnya, keadilan berlaku apabila semua orang mendapat bagian yang equal (Subahri, 2022). Membagi secara adil berarti membagikan secara merata atau setara, yang menjadi prinsip utama dari egalitarianisme. Dalam konsep egalitarianisme, semboyan "sama rata" mencerminkan keyakinan akan kesetaraan. Jika ada situasi di mana tidak semua orang mendapatkan bagian yang sama karena alasan tertentu, hal tersebut dianggap tidak adil menurut pandangan egalitarianisme. Oleh karena itu, kesetaraan menekankan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama, bukan karena faktor seperti agama, ras, jenis kelamin, budaya, atau asal-usul, tetapi karena mereka adalah manusia.

Pada masa kini interaksi antar individu ataupun kelompok yang berbeda bisa terjadi dengan adanya sebuah arus globalisasi. Globalisasi yang masif menjadi arena pertemuan antarbudaya dan ilmu pengetahuan, yang tidak hanya menghasilkan kebiasaan-kebiasaan baru, tetapi juga memunculkan berbagai masalah baru. Hal tersebut berpotensi meningkatkan kecenderungan sektarian-primordialisme, seperti diskriminasi dan kebencian yang timbul akibat perbedaan antara kelompok masyarakat. Hal tersebut menyebabkan pandangan bahwa satu kelompok memiliki status yang lebih tinggi dari pada yang lain menjadi sebuah ironi, karena setiap individu atau kelompok memiliki martabat dan hak yang sama. Kesetaraan hak ini dikenal sebagai egalitarianisme.

Terdapat dua perspektif tentang egalitarianisme: 1) Dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM), egalitarianisme dipahami sebagai doktrin atau pandangan yang menyatakan bahwa manusia ditakdirkan memiliki derajat yang sama, atau dapat dikatakan sebagai asas yang menganggap bahwa kelas-kelas sosial yang berbeda mempunyai bermacam-macam anggota dengan berbagai varian proporsi yang relatif sama (Madjid, 2008). 2) Dalam perspektif Islam Nusantara, egalitarianisme berjalan berdasarkan beberapa asas yaitu; keadilan (al-'adalah), toleransi (at-tasamuh), persaudaraan (al-ukhuwah), dan kebebasan (al-hurriyah) (Falah, 2023). Kemudian egalitarianisme dalam perspektif Islam Nusantara menurut Abdurrahman Wahid (Gus Dur) perlu menggunakan diskursus kultural-reinterpretatif, yaitu menggunakan argumen kesetaraan berlandaskan penggalian pemikiran dan praktik Islam klasik ala Nusantara dan proses dialektikanya dengan tradisi yang berkembang di masa kontemporer (Suaedy, 2018).

Dua perspektif tentang egalitarianisme merupakan sebuah instrumen penjelasan tentang makna egaliter yang tidak berhenti pada satu pemahaman saja. Salah satu contoh tentang pemaknaan kebebasan dalam egalitarianisme, faham tentang kebebasan dalam perspektif HAM dan Islam Nusantara tentunya memiliki ranah pemahaman yang jauh berbeda. Sehingga kedua perspektif tersebut apabila ditinjau dalam penerapan dilapangan dapat mengisi satu sama lain, dapat ditemukan kedua unsurnya dalam praktik egalitarianisme masyarakat, khususnya dalam egalitarianisme yang diterapkan dalam tradisi kebudayaan Pandalungan.

Egalitarianisme yang tercermin dalam kebudayaan Pandalungan, berdasarkan data lapangan cenderung merepresentasikan konsep egalitarianisme

dalam perspektif Islam Nusantara. Latar belakang terbentuknya budaya Pandalungan seperti yang dibahas pada sub bab sebelumnya ialah terjadinya proses hibrida budaya antara kebudayaan Jawa dan Madura yang terjadi sejak masa dahulu, ditandai dengan adanya proses migrasi penduduk Madura yang disebabkan oleh faktor ekonomi dan politik sehingga terjadi sebuah pertemuan antar budaya Jawa dan Madura di pulau Jawa. Pertemuan antar budaya tersebut yang kemudian menghasilkan sebuah budaya baru beserta dengan tradisi-tradisinya menandakan keberhasilan unsur egaliter yang menekankan adanya sebuah pemahaman sektarian primordial antar budaya. Terlebih pada periode sejarah dan perkembangan selanjutnya, kebudayaan baru tersebut berakulturasi dengan ajaran Islam di Nusantara. Sehingga perpektif egaliter dengan diskursus kultural-reinpretatif merupakan sebuah unsur egaliter yang cocok diterapkan pada kebudayaan Pandalungan.

Kultural-reinpretatif yang menurut Suaedy adalah menggunakan argumen kesetaraan berlandaskan penggalian praktik dan pemikiran Islam klasik ala Nusantara dan proses dialektikanya dengan tradisi yang berkembang di masa kontemporer (Suaedy, 2018). Pola egaliter tersebut tercermin dalam praktek dakwah Sunan Kalijaga salah satu Walisongo yang juga menerapkan pola egalitarian dalam praktek dakwahnya. Sunan Kalijaga pada masa dakwahnya memahami karakter masyarakat di lingkungannya yang mayoritas berasal dari kalangan atas maupun bawah menggemari kesenian wayang sebagai sebuah media hiburan (Sunyoto, 2020). Berangkat dari hal tersebut, Sunan Kalijaga memanfaatkan media kesenian wayang sebagai sarana berdakwah untuk menarik

minat masyarakat untuk mengenal ajaran Islam, bersatu padu menikmati kesenian pewayangan tanpa membedakan kasta masyarakatnya.

Lakon pewayangan yang lazim digunakan oleh Sunan Kalijaga adalah tokoh pewayangan Dewa Ruci, lakon cerita tersebut menceritakan tentang perjalanan tokoh Bima dalam mencari kebenaran, yang dipandu oleh Begawan Drona, hingga akhirnya ia berjumpa dengan Dewa Ruci. Sunan Kalijaga menggunakan lakon pewayangan tersebut di reinpretasikan dengan sangat mendalam memaparkan kupasan-kupasan ruhaniah berdasar ajaran tasawuf dalam Islam (Sunyoto, 2020). Sehingga pola dialektika antara tradisi lokal dengan praktik dan pemikiran Islam terbentuk dan menjadi sebuah diorama Islam ala Nusantara. Peranan besar Sunan Kalijaga dan para Walisongo dalam mereformasi tradisi dan kebudayaan lokal pada masa yang mendatang hingga kini menjadi sebuah corak praktik dan pemikiran Islam ala Nusantara yang berhasil dan tetap eksis dimasa kontemporer.

Begitu juga dengan kebudayaan Pandalungan yang terbentuk dari hasil hibrida kebudayaan Jawa dan Madura. Kebudayaan Jawa memiliki ciri khas budaya kejawen dan ke-Islamannya, sementara budaya Madura identik dengan budaya ke-Islaman yang juga kuat (Syamsuddin, 2007). Melebur menjadi suatu kebudayaan baru bernama Pandalungan dengan berbagai variasi tradisi kebudayaan yang terkandung didalamnya yang juga memuat nilai-nilai egalitarianisme sebagai komponen dalam kerukunan dalam kehidupan masyarakat yang berdampingan.

Berdasarkan sumber data dari informan dan warga masyarakat Pandalungan kecamatan Senduro, berikut beberapa prinsip-prinsip egalitarianisme kebudayaan Pandalungan:

a. Penguatan peran masyarakat sipil atau masyarakat umum dalam sosial-kemasyarakatan; menghapus sebuah stratifikasi sosial dimana masyarakat lokal Pandalungan di kecamatan Senduro semuanya memiliki hak yang sama rata, bukan hanya golongan kaya seperti contoh pemilik tanah yang memiliki sebuah privileg dalam kehidupan bermasyarakat.

b. Tidak emosional dalam merespon perbedaan pendapat, menghargai setiap perbedaan pendapat yang ada; selalu menggunakan jalan musyawarah dalam menentukan sebuah keputusan, seperti musyawarah warga dalam rangka memperingati hari-hari besar agama dan sebagainya.

c. Menunjukkan kelembutan saat berdiskusi dengan orang lain, tetapi tetap mempertahankan ketegasan dan keberanian dalam mengoreksi kesalahan mereka.

d. Berlandaskan pondasi keadilan, keseimbangan dan persamaan, salah satu contohnya dalam konsep pembelajaran di Langgar (musholla atau surau) dimana seorang guru atau kiai tidak memandang status sosial para murid atau santrinya, semua diperlakukan sama meskipun latar belakangnya berasal dari keluarga kaya ataupun kurang mampu.

e. Lebih luas lagi, prinsip egaliter Pandalungan mengutamakan persaudaraan dan persatuan yang tercermin dalam setiap tradisinya yang akan dijelaskan pada sub bab selanjutnya.

Seperti apa yang dikatakan bapak Syamsul Hadi tentang konsep egalitarianisme yang beliau pahami sebagai kesetaraan: *“Orep masyarakat Pandalungan iku ndak luput teko kerukunan. kerukunan sebabe teko kabeh masyarakat derajate podo, lek ono masalah ngutamakne rundingan (musyawarah), sabar lan wani marang keapikan, adil, rukun karo seduluran. Kabeh iku wes dadi ajiane wong Senduro teko tuturane poro wini sepuh”*, yang berarti; hidup masyarakat Pandalungan selalu berkaitan dengan kerukun karena mengutamakan persamaan derajat manusia, jikalau ada masalah harus mengutamakan musyawarah, sabar dan berani menegakkan kebenaran, keadilan, dan mengedepankan persaudaraan. Semua hal tersebut adalah prinsip utama masyarakat Senduro yang diajarkan para leluhurnya.

Prinsip-prinsip egalitarian tersebut oleh masyarakat kecamatan Senduro hingga kini tetap dijalankan dan diyakini sebagai sebuah keharusan. Karena menurut informan apabila satu prinsip tersebut tidak terlaksana, dalam kehidupan sosial kemasyarakatan mereka akan terasa ganjil. Perasaan ganjil atau ada yang kurang tersebut merupakan hal wajar, karena prinsip kesetaraan atau egaliter tersebut sudah menjadi sebuah tradisi dalam hubungan sosial yang di jalankan secara turun temurun. Secara tidak langsung, prinsip-prinsip tersebut menggambarkan nilai-nilai keadilan, toleransi, persaudaraan, kebebasan dan bahkan diskursus kultural-reinpretatif menurut Gus Dur dalam Suaedy (2018) nampak pada kebudayaan Pandalungan dengan pola sinkretisme antara kebudayaan Pandalungan dengan tradisi ke-Islaman dengan tidak meninggalkan aspek kesetaraan dan keadilan yang masih dilestarikan hingga kini sehingga

menjadi sebuah tradisi ke-Islaman berbasis interaksi dalam bentuk tradisi sandingan malam jum'at legi dan beberapa tradisi lainnya yang akan di bahas di pembahasan berikutnya.

Dari beberapa prinsip egaliter kebudayaan Pandalungan tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwasannya, makna masyarakat adalah sebuah perkumpulan dari beberapa individu, maka masyarakat yang egaliter adalah sebuah tatanan masyarakat yang menunjukkan perilaku dan komitmen bahwa setiap individu mempunyai persamaan hak dalam berbagai hal seperti; memperoleh kesejahteraan hidup dan memperoleh kesempatan yang sama dalam hal apapun, tanpa harus menampakkan unsur supremasi suku, diskriminasi antar kelompok dan sebagainya yang berkaitan dengan kuantitas kelompok masyarakat tertentu.

4.4. Tradisi *Sandingan Malam Jum'at Legi* sebagai Tradisi Islam Nusantara dalam Kebudayaan Pandalungan

Tradisi merupakan praktik-praktik yang diwariskan dari generasi ke generasi oleh individu atau kelompok masyarakat, yang didasarkan pada nilai-nilai budaya dari komunitas tersebut. Tradisi mencerminkan perilaku anggota masyarakat, baik dalam aspek keagamaan maupun kepercayaan magis. Sztompka mendefinisikan tradisi sebagai segala sesuatu yang disalurkan atau diwariskan dari masa lalu ke masa kini, atau tradisi adalah kesamaan benda material dan gagasan yang berasal dari masa lalu namun masih ada hingga kini dan belum hancur atau dirusak (Sztompka dalam Ningsih, 2019).

Dapat disimpulkan bahwasannya tradisi adalah warisan yang terus hidup dan diwariskan di antara masyarakat, yang mencakup kumpulan ide dan pandangan ideal serta cita-cita bersama. Tradisi juga berisi aturan-aturan tentang bagaimana menjalani kehidupan bersama di masyarakat. Dalam tradisi, diatur konsep hubungan antarmanusia di dalam suatu kelompok, hubungan antar kelompok, dan hubungan manusia dengan lingkungan alam sekitarnya.

Sebagai sistem budaya, menurut Mursal Esten tradisi juga merupakan suatu sistem yang menyeluruh, yang terdiri dari cara yang memberikan arti ujaran, perilaku ritual dan berbagai perilaku lainnya dari manusia dalam hubungan sesama manusia atau dengan lainnya, dimana unsur terkecil dari sistem ini adalah simbol yang meliputi simbol konstitutif (kepercayaan), kognitif (pengetahuan), penilaian norma dan sistem ekspresif (pengungkapan perasaan) (Esten dalam Ningsih, 2019).

Fungsi tradisi menurut Sztompka menjelaskan peranan tradisi yang selalu menjadi sebuah bagian dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks hubungan manusia dengan tradisi, terjadi sebuah relasi dimana manusia tak dapat hidup tanpa tradisi meski manusia sering merasa tak puas terhadap tradisi mereka. Karena manusia selama hidupnya akan terus berkuat dengan tradisi, dan tradisi juga memberi sebuah legitimasi identitas bagi manusia yang menjadikannya memiliki sebuah ciri khas. Tradisi yang juga sebagai identitas kolektif menjadikannya mampu bersanding dengan berbagai dinamika adanya tradisi-tradisi lain yang menjadi identitas, seperti agama yang dalam hal ini agama Islam sebagai agama mayoritas di Nusantara atau Indonesia.

Pertemuan Islam dengan tradisi lokal di Nusantara merupakan sebuah keniscayaan, karena Indonesia dari zaman awal permulaan Islam datang sudah menjunjung tinggi nilai-nilai tradisi dan kebudayaan yang dengan mudah berakulturasi dengan berbagai tradisi dan kebudayaan baru yang datang pada masa itu. Tradisi dan kebudayaan dimiliki oleh setiap masyarakat dengan karakteristiknya masing-masing. Di Nusantara dari zaman dahulu hingga kini, terdapat ragam tradisi dan kebudayaan yang mewarnai kehidupan masyarakat Nusantara dan Indonesia pada masa kini. Salah satu kebudayaan yang dikaji dalam penelitian ini adalah kebudayaan Pandalungan yang merupakan sebuah hibrida budaya antara Jawa dan Madura, sehingga sebelum mengarah pada bentuk tradisi kebudayaan Pandalungan perlu kiranya menjelaskan secara singkat tentang budaya Jawa dan Madura.

Budaya Jawa memiliki banyak keunikan-keunikan yang menjadi ciri khasnya yang membedakan dengan budaya-budaya lainnya. Keunikan tersebut berdasarkan pada karakteristik budaya Jawa membiarkan dirinya dibanjiri oleh berbagai gelombang budaya asing yang datang dari luar, kedatangan berbagai budaya asing tersebut seperti budaya Hindu-Budha, Islam dan sebagainya yang dibawa oleh para pengembara yang datang menuju ke Nusantara. Dalam masifnya kedatangan budaya asing tersebut, budaya Jawa tetap mempertahankan orisinalitasnya dan bahkan mampu berakulturasi dengan berbagai budaya baru tersebut yang pada akhirnya menghasilkan produk-produk budaya baru hasil akulturasi antar budaya.

Dalam alam pikiran masyarakat Jawa dirumuskan kehidupan manusia berada dalam dua kosmos (alam), yaitu makrokosmos dan mikrokosmos (Setyowati, 2007). Makrokosmos dalam budaya Jawa menggambarkan pandangan terhadap alam semesta yang dipenuhi dengan kekuatan supranatural dan hal-hal misterius, sementara mikrokosmos dalam budaya Jawa merujuk pada pandangan terhadap dunia nyata yang tercermin dalam kehidupan manusia dan lingkungannya. Sehingga masyarakat Jawa memiliki kepercayaan terhadap kekuatan adikodrati yakni segala hal yang bersifat ghaib dan masyarakat juga mempercayai keberadaan roh-roh atau arwah leluhur serta makhluk halus lainnya yang mendiami alam semesta di sekitar tempat tinggal mereka. Keyakinan ini menyatakan bahwa roh-roh tersebut memiliki kekuatan untuk membawa keselamatan, kebahagiaan, dan keberuntungan, namun juga dapat menyebabkan malapetaka jika perilaku manusia tidak sesuai dengan tradisi yang telah diwariskan, karena dipercaya dapat mengganggu keseimbangan antara alam makrokosmos dan mikrokosmos.

Sedangkan budaya Madura memiliki komposisinya sendiri dalam menjelaskan eksistensinya sebagai bagian dari budaya yang ada di Nusantara. Untuk mengetahui budaya Madura perlu dijelaskan dari dua faktor yaitu faktor geografis dan politis (Syamsuddin, 2007). Secara geografis, pulau Madura sebagai tempat tinggal masyarakat Madura mengalami proses sosialisasi sejak awal karena letak geografis yang berdampingan langsung dengan pulau Jawa. Bentuk interaksi sosial masyarakat Madura secara langsung terjalin dengan masyarakat Jawa, begitu juga dengan kebudayaannya yang bersinggungan langsung dengan

budaya Jawa. Seperti yang dijelaskan diatas bahwa budaya Jawa selalu mampu berakulturasi dengan budaya luar yang pada akhirnya Jawa menjadi suatu budaya dominan. Sehingga dalam terjadinya sentuhan budaya dalam interaksi masyarakat Madura, kebudayaan Madura menjadi tersubordinasi dari dominasi budaya Jawa dan memungkinkannya terjadi banyak kesamaan antara budaya Jawa dan Madura.

Secara politis, posisi Madura hampir tidak pernah lepas dari kekuasaan kerajaan-kerajaan Jawa. Hal tersebut semakin mempertegas subordinasi kebudayaan Madura, sehingga setiap kali masyarakat Madura hendak mengekspresikan nilai-nilai budaya Madura maka akan selalu cenderung “tenggelam” oleh dominasi adi luhung budaya Jawa. Madura begitu erat terlibat dalam perkembangan-perkembangan politik dan ekonomi Jawa, menurut Syamsuddin (2007) banyak literatur yang menganggap "Jawa dan Madura" sebagai entitas yang saling terkait. Dalam menghadapi realitas sosial budaya ini, langkah yang bisa diambil oleh masyarakat Madura adalah melakukan revitalisasi budaya dan nilai-nilainya untuk menjaga keberadaan budaya Madura. Salah satu aspek kunci dari budaya Madura yang memberikan signifikansi dalam kehidupan individu maupun komunitasnya adalah agama Islam, yang merupakan agama mayoritas yang dianut oleh masyarakat Madura.

Hibrida budaya antara kebudayaan Jawa dan Madura merupakan sebuah keunikan yang menghasilkan kebudayaan baru bernama Pandalungan dengan berbagai macam tradisi dan budayanya. Keunikan tersebut menurut Subahri (2018) dikarenakan karakteristik budaya Pandalungan yang bersifat dekonstruktif, yaitu memperbaiki budaya lama dan mengkonstruksi ulang dengan budaya-budaya

baru yang khas tanpa meninggalkan budaya lama. Sehingga karakteristik budaya Jawa yang lunak dipadukan dengan budaya Madura yang konsisten, bermuara pada satu tradisi kebudayaan yang menjunjung tinggi nilai kesetaraan dalam masyarakat yang telah lama dijaga dan diwariskan, tradisi tersebut bernama tradisi Sandingan Malam Jum'at Legi.

Tradisi sandingan malam jum'at legi merupakan salah satu contoh ragam tradisi Islam Nusantara yang memiliki karakteristik khas Islam Indonesia. Kembali pada pengertian singkat Islam Nusantara yaitu ajaran agama Islam berlandaskan al-Qur'an dan Hadist yang cara memahaminya dan menjalankannya dilakukan oleh penduduk asli Nusantara sehingga menjadi sistem nilai, tradisi dan budaya Islami yang berciri khas Nusantara. Sehingga akar tradisi dan kebudayaan yang telah ada di Nusantara tidak serta-merta dihilangkan atau diganti dengan tradisi Islam, akan tetapi tercipta sebuah akulturasi budaya antara tradisi lokal dengan Islam yang menghasilkan sebuah istilah bernama Islam Nusantara.

Tradisi *Sandingan Malam Jum'at Legi* merupakan sebuah bentuk tradisi Islam lokal berbentuk slametan, yaitu sebuah ritual untuk mempengaruhi alam semesta guna mencapai keseimbangan antara alam makrokosmos dan mikrokosmos agar mendapatkan keselamatan. Menurut bapak Syamsul Hadi, tradisi sandingan ini adalah “sarana bagi para warga Senduro untuk meminta keselamatan kepada Gusti Allah melalui doa-doa yang dibaca ketika melaksanakan (berbagai) ritual sesuai dengan yang dilakukan leluhur, termasuk tradisi Sandingan ini”. Selain tradisi Sandingan Malam Jum'at, masyarakat Pandalungan di kecamatan Senduro masih melestarikan tradisi slametan yang lain,

seperti melakukan slametan ketika memiliki sebuah kendaraan baru, rumah baru atau meresmikan suatu jalan yang baru di bangun. Sehingga apapun yang ‘baru’ masyarakat dapatkan, akan di mintakan sebuah keselamatan juga ungkapan rasa syukur yang dilakukan oleh masyarakat kepada Yang Maha Kuasa.

Secara definitif tidak ditemukan secara pasti mengenai arti dari sandingan yang sulit ditemukan dalam perbendaharaan kata ilmiah. Berdasarkan data lapangan dan penuturan dari informan kunci, sandingan adalah tradisi sesaji yang diperuntukkan bagi leluhur yang telah mendahului dengan memberikan sesajian/sesajen yang disukai selama hidupnya dan juga memperingati keteladanan para leluhur bagi para keturunannya. Di kecamatan Senduro khususnya desa Kandang Tepus tradisi sandingan tersebut biasa dilakukan pada satu malam yang dianggap sakral setiap satu bulan sekali pada kalender penanggalan Jawa, yaitu pada hari kamis malam jum’at legi.

Masyarakat Pandalungan Senduro melestarikan tradisi sandingan hingga saat ini karena mereka meyakini bahwasannya para leluhur yang telah meninggal dunia masih mengetahui apa yang dilakukan oleh orang-orang yang masih hidup dan akan pulang kerumah pada hari tertentu yaitu pada hari kamis malam jum’at legi penanggalan Jawa. Kehadiran sandingan tersebut membuat arwah leluhur yang telah meninggal menjadi tenteram dan tidak mengganggu kehidupan orang-orang yang masih hidup. Bahkan menurut penuturan masyarakat setempat, salah satu contoh arwah leluhur yang mengganggu orang-orang yang masih hidup adalah adanya anak kecil dalam satu keluarga yang sering menangis tanpa sebab yang jelas. Sehingga menurut kepercayaan setempat, arwah leluhur pada keluarga

tersebut menuntut untuk di sandingi atau di sediakan sandingan. Dengan adanya kejadian-kejadian tersebut masyarakat Senduro sengaja memberi sandingan berupa sesaji yang berbentuk makanan dan sebagainya yang merupakan kesukaan leluhur semasa hidup. Sesuai dengan penuturan informan kunci, bapak Syamsul Hadi mengatakan: “tradisi sandingan itu dilaksanakan agar (orang) yang masih hidup tidak melihat (orang) yang sudah mati, agar yang mati tidak mengganggu mangkanya harus di sandingi. Kalau tidak disediakan sandingan, maka (orang) yang mati akan minta.”

Tradisi sandingan telah berjalan sangat lama dan dilestarikan secara turun-temurun hingga saat ini. Menurut bapak Syamsul Hadi, pada zaman dahulu atau saat beliau masih kecil, pelaksanaan tradisi sandingan mayoritas oleh masyarakat di laksanakan di rumah masing-masing dengan membuat sebuah sandingan berupa sesaji disebuah nampan yang berisikan nasi, lauk pauk seperti telur, ikan beserta dengan minumannya berupa air putih, kopi dan juga rokok. Atau bahkan ada yang menyajikan makanan sesuai dengan makanan yang disukai leluhurnya semasa hidup.

Kemudian sandingan tersebut juga di beri kemenyan atau dupa sebagai tanda pemaknaan ritual yang sakral begitu juga dengan pembacaan lantunan do'a-do'a. Tentunya menurut informan, pada masa dahulu tradisi sandingan masih sangat kental dengan pengaruh budaya Hindu-Buddha. Hal tersebut dibuktikan dengan jumlah penganut Hindu yang cukup besar di wilayah Senduro dan menjadi bukti pernah menjadi agama mayoritas setempat. Kemudian pada masa kini, masyarakat Hindu setempat yang masih melestarikan tradisi sandingan, pola

prosesnya cukup sama hanya dibedakan oleh lantunan do'a-do'a yang dibacakan begitu pula dengan sajian atau sajen-nya berada di rumah masing-masing, tidak dibagi-bagikan. Ketika Islam datang tradisi tersebut tidak semata-mata ditinggalkan. Tradisi sandingan bertransformasi menjadi tradisi yang bernafaskan Islam Nusantara. Sandingan yang berupa makanan-makanan yang disajikan digunakan untuk sedekah atau dimakan secara bersama-sama setelah proses ritual dengan do'a-do'a.

Tradisi sandingan malam jum'at legi dapat diklasifikasikan sebagai bentuk tradisi Islam Nusantara. Menurut Al-Zastrouw (2017) karakteristik Islam Nusantara yang berkolerasi dengan tradisi dan budaya adalah; pertama, mengedepankan kearifan lokal (lokal wisdom) dan kebajikan (masalah), kedua, menjaga dan merawat keragaman dengan sikap saling pengertian dan menghargai terhadap perbedaan. Karakter tersebut tercermin dalam tradisi sandingan malam jum'at legi. Saat proses transformasi tradisi sandingan yang menjadi bernafaskan Islam tidak serta-merta menghapus orisinalitas tradisi sandingan yang kental dengan unsur-unsur budaya dengan sistem kepercayaan terdahulu. Menurut informan, yang dahulu menggunakan pelafalan do'a-do'a sistem kepercayaan Hindu atau Buddha dalam prosesi tradisi sandingan, sejak Islam masuk ritualnya tetap berjalan akan tetapi prosesi dalam pelafalan do'a-do'anya diganti dengan pembacaan al-Fatihah, Ya-sin, Tahlil dan pembacaan sholawat.

Hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan syariat yang telah ditetapkan. Sebenarnya, makanan-makanan yang disajikan sebagai sandingan tidak hanya dimaksudkan sebagai persembahan bagi arwah atau leluhur yang telah

meninggal dunia. Namun, ketika tradisi ini diresapi oleh nilai-nilai Islam, esensi dari tradisi sandingan tersebut adalah doa-do'a dan bacaan-bacaan sholawat yang ditujukan untuk ketenangan ahli kubur atau arwah leluhur yang telah meninggal. Dalam beberapa pendapat, tradisi sandingan diperbolehkan dalam Islam selama tidak melanggar syari'at yang berlaku (Subahri, 2018). Tradisi sandingan dijadikan sebagai amal sedekah bagi orang yang meninggal agar tetap tenang di alam kubur, karena menurut bapak Syamsul Hadi orang yang meninggal hanya membawa tiga hal yaitu; amal jariyah, ilmu yang bermanfaat dan do'a anak sholeh. Sehingga dari amal sedekah dan do'a-do'a yang dipanjatkan dalam tradisi sandingan diharapkan dapat menjadi lampu penerang arwah yang berada di alam kubur.

Terjadinya akulturasi antara tradisi lokal yaitu Sandingan dengan budaya ke-Islaman menjadi bukti Islam sebagai agama yang rahmah bagi seluruh alam semesta, agama yang tidak terbatas pada kultur tertentu. Hal tersebut dikuatkan dengan pernyataan Bizawie dalam Qomar (2015) Islam Nusantara dianggap sebagai bentuk Islam yang bersifat ramah, terbuka, dan inklusif, serta mampu menawarkan solusi terhadap tantangan-tantangan yang dihadapi oleh masyarakat dan negara. Selain itu, Islam Nusantara juga dilihat sebagai agama yang dinamis dan mampu beradaptasi dengan beragam budaya, subkultur, dan agama yang ada.

Prosesi tradisi sandingan oleh masyarakat Pandanlungan kecamatan Senduro kabupaten Lumajang dilaksanakan satu bulan sekali pada hari kamis malam jum'at pada penggalan kalender Jawa. Pelaksanaanya dimulai dari pagi hari namun di beberapa tempat mulai dilaksanakan pada hari rabu malam

kamisnya dengan mulai membaca dan meng-khatam-kan al-Qur'an dan puncak prosesinya pada hari kamis sore hari atau sudah masuk pada pergantian hari jum'at. Karena menurut sistem waktu dalam budaya Jawa, Madura maupun Pandalungan tepatnya setelah waktu sholat ashar atau menjelang magrib merupakan waktu pergantian hari. Sehingga pada waktu tersebut, berdasarkan informasi dari bapak Syamsul Hadi dan beberapa masyarakat diyakini sebagai waktu para arwah leluhur pulang ke rumah masing-masing. Sehingga pada waktu sore atau menjelang malam hari tersebut, puncak pelaksanaan prosesi tradisi sandingan dengan membaca Ya-sin, Tahlil, sholawat dan do'a-do'a yang dikhususkan kepada arwah leluhur yang sudah meninggal.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, makanan yang disajikan dalam tradisi sandingan tidak ada ketentuan khusus atau tergolong sederhana. Hanya saja terkadang terdapat beberapa keluarga yang tergolong kategori "kaya" membawa sandingan yang cukup mewah, atau berpatokan pada makanan-makanan yang disukai oleh leluhur semasa hidupnya. Kemudian setelah prosesi membaca do'a-do'a selesai, makanan-makanan yang digunakan untuk sandingan di sedekahkan kepada masyarakat sekitar atau dimakan bersama-sama dengan saling menukar setiap sandingan yang dibawa. Faktor 'sederhana' dan 'saling menukar' dapat dilihat sebagai praktek egalitarianisme yang tercermin dalam tradisi ini. Sehingga dalam prosesi tradisi sandingan malam jum'at legi tidak ditemukan istilah perbedaan 'strata sosial', semua merasakan apa yang dibawa oleh masyarakat kalangan bawah maupun atas. Hal tersebut menurut bapak Syamsul Hadi adalah

sebuah bentuk kerukunan yang dapat meminimalisir segala bentuk kecemburuan sosial.

Sebelumnya dalam data lapangan tentang egalitarianisme dalam kebudayaan Pandalungan secara umum terdapat beberapa prinsip seperti; penguatan peran masyarakat sipil, tidak emosional, bersikap lemah lembut, menghargai perbedaan pendapat, berlandaskan pondasi keadilan, keseimbangan, persamaan, persaudaraan dan persatuan. Lebih khusus lagi, dalam ranah tradisi sandingan malam jum'at legi juga terdapat pola egalitarianisme yang tercermin dalam prosesinya. Pola egaliter tersebut terdapat dalam nilai-nilai dalam makna simbolik tradisi sandingan sebagai berikut:

Pertama; Kepedulian, terdapat dua nilai kepedulian dalam tradisi sandingan yaitu kepedulian terhadap yang masih hidup dan yang telah meninggal dunia. Kepedulian terhadap yang masih hidup berbentuk dengan adanya kepedulian berupa berbagi makanan sandingan yang telah di do'akan, para sanak saudara dan tetangga tanpa memandang status sosial merasakan apa yang telah disajikan dalam tradisi sandingan. Kepedulian terhadap yang telah meninggal merupakan sebuah pengingat bagi keluarga yang telah ditinggalkan, bahwasannya terdapat leluhur yang dahulu berjasa dalam kehidupan kita sebagai keluarga atau tokoh masyarakat dan juga sebagai pengingat bahwa kematian merupakan sebuah fase yang pasti dilewati oleh seluruh makhluk hidup.

Kedua; Musyawarah, nilai musyawarah tampak pada tradisi sandingan baik sebelum dan sesudah prosesi ritual. Di kecamatan Senduro khususnya desa Kandang Tepus sebelum pelaksanaan tradisi sandingan, para tokoh atau sesepuh

seperti informan bapak Syamsul Hadi melakukan undangan melalui siaran speaker dari Langgar tempat kediamannya, memberitahukan bahwa akan diadakan ritual tradisi sandingan. Kemudian sesudah prosesi tak jarang para warga masyarakat masih berdiskusi membahas tentang pertanian, kegiatan desa atau bahkan hanya sekedar berbincang santai menunggu waktu magrib. Nilai musyawarah tersebut memangkas sekat antar warga, seperti kyai, aparatur desa, guru, petani dan seluruh lapisan masyarakat pun berbaur dalam forum sederhana ala masyarakat Pandalungan.

Ketiga; Pengendalian Sosial, nilai pengendalian sosial tercermin pada proses penghambaan masyarakat kepada Yang Maha Kuasa melalui ritual sandingan. Dengan adanya tradisi tersebut, masyarakat seolah-olah memiliki kendali atas perilaku sosialnya. Masyarakat tau kapan harus fokus pada hal-hal duniawi, tetapi juga ingat pada hal-hal ilahiah. Tradisi sandingan juga menjadi pengingat dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, terutama dalam aktifitas sehari-hari.

Keempat; Kearifan Lokal, nilai kearifan lokal terwujud dalam prosesi tradisi sandingan yang merupakan perwujudan rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa, dan juga karakteristik Islam Nusantara sangat tergambar jelas dalam tradisi ini. Masyarakat menyiapkan makanan atau sesaji, kemudian mengucapkan doa-doa dan shalawat, setelah itu makanan tersebut dibagikan atau dimakan bersama-sama. Ini memastikan bahwa manfaat dari tradisi sandingan tidak hanya dinikmati oleh masyarakat yang melaksanakannya, tetapi juga oleh semua warga

atau tetangga yang berdekatan dapat menikmati manfaat dari kearifan lokal tradisi sandingan.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Meskipun tidak ada data pasti tentang kapan kebudayaan Pandalungan terbentuk, penelitian ini menunjukkan bahwa kebudayaan ini merupakan hasil dari pertemuan budaya Jawa dan Madura yang telah berlangsung selama berabad-abad. Proses migrasi masyarakat antar budaya, terutama dari Madura ke Jawa, menjadi katalisator utama dalam pembentukan kebudayaan Pandalungan. Berdasarkan sumber-sumber tertulis, penulis membagi proses migrasi masyarakat Pandalungan menjadi tiga fase kronologis: Fase Singosari-Majapahit pada abad 11-13 M, Fase Mataram Islam pada abad 16-18 M, dan Fase Kolonialisme pada abad 18-19 M. Motif migrasi ini lebih ditekankan pada faktor ekonomi, di mana pencarian peruntungan untuk merubah nasib hidup menjadi lebih baik menjadi faktor utama terjadinya migrasi penduduk.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa kebudayaan Pandalungan menganut prinsip-prinsip egalitarianisme yang kuat, seperti penguatan peran masyarakat sipil, penghargaan terhadap perbedaan pendapat, dan penekanan pada keadilan, persamaan, dan persaudaraan. Praktik-praktik tradisi kebudayaan seperti *sandingan malam jumat legi* merupakan contoh nyata dari implementasi prinsip-prinsip egalitarianisme ini dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Pandalungan di Lumajang, khususnya kecamatan Senduro. Kondisi geografis wilayah Lumajang yang agraris, menjadikan profesi masyarakatnya mayoritas dalam bidang pertanian, hal tersebut mempengaruhi karakteristik sosial masyarakat

Pandalungan, yang hidup dalam kesederhanaan, toleransi, dan harmoni dalam hubungan antar masyarakatnya. Integrasi antara kearifan lokal dan nilai-nilai Islam Nusantara juga memperkuat nilai-nilai egalitarianisme dalam kebudayaan Pandalungan, yang tercermin dalam tradisi sandingan malam Jumat Legi.

5.2. Saran

Penelitian Lanjutan

- Mungkin berguna untuk melanjutkan penelitian ini dengan fokus pada praktik-praktik egalitarianisme dalam konteks kehidupan sehari-hari masyarakat Pandalungan, serta memperdalam pemahaman tentang pengaruh kebudayaan Pandalungan dalam masyarakat Lumajang secara keseluruhan.

Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan

- Implikasi dari penelitian ini dapat digunakan untuk pengembangan program pendidikan dan kebudayaan yang lebih inklusif dan egaliter di wilayah Lumajang, dengan memperkuat nilai-nilai egalitarianisme dan menghargai keragaman budaya.

Kolaborasi dengan Komunitas Lokal

- Melakukan kolaborasi dengan komunitas lokal Pandalungan dalam mengembangkan kegiatan sosial, budaya, dan ekonomi yang memperkuat prinsip-prinsip egalitarianisme dalam kehidupan sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif* (P. Rapanna, Ed.; I). CV. Syakir Media Press.
- Ackermann, A. (2012). Cultural hybridity: Between metaphor and empiricism. *Conceptualizing Cultural Hybridization: A Transdisciplinary Approach*, 5–25.
- AGREGAT PENDUDUK BERDASARKAN AGAMA PER KECAMATAN DI KABUPATEN LUMAJANG DKB SEMESTER I TAHUN 2019. (2019). 350801.
- Al-Zastrouw, N. (2017). Mengenal Sepintas Islam Nusantara. *Hayula: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 1(1), 1–18.
<https://doi.org/10.21009/hayula.001.1.01>
- Ammaria, H. (2017). Komunikasi dan Budaya. *Jurnal Peurawi*, 1(1), 1–19.
- Astri Widyaruli Anggraeni, Trisna Andarwulan, R. (2016). *Ungkapan Emosi Negatif Masyarakat Multietnis Pandalungan Jember*. 1–23.
- Azra, A. (2022). *Islam Indonesia Berkelanjutan*.
<https://www.kompas.id/baca/opini/2022/09/18/islam-indonesia-berkelanjutan>
- Baso, A., & Jenius, I. N. I. (2015). *Ijma' Ulama Indonesia*. Jakarta: Pustaka Afid.
- Beetham, D. (1992). Liberal democracy and the limits of democratization. *Political Studies*, 40, 40–53.
- Bizawie, Z. M. (2014). Laskar Ulama-Santri \& Resolusi Jihad: Garda Depan Menegakkan Indonesia. *Tangerang: Pustaka Kompas*.
- Bizawie, Z. M., & Koeshendraty, A. (2016). *Masterpiece Islam Nusantara: Sanad dan Jejaring Ulama-Santri, 1830-1945*. Pustaka Compass.
<https://books.google.co.id/books?id=OmGwDAEACAAJ>
- Direktorat Pelindung Kebudayaan. (2022). Daftar Hasil Penetapan Warisan Budaya Takbenda Tahun 2013-2022 Berdasarkan Wilayah Provinsi. *Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Indonesia*.
<https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/dpk/sebanyak-1728-warisan-budaya-takbenda-wbtb-indonesia-ditetapkan/>
- Drs. Tjetjep Samsuri, M. Pd. (2003). Kajian Teori , Kerangka Konsep Dan Hipotesis dalam Penelitian. *KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEP DAN HIPOTESIS DALAM PENELITIAN*, 1–7.
http://repository.unp.ac.id/1656/1/TJEJEP_SAMSURI_209_03.pdf
- Falah, M. F. (2023). Egalitarianisme Muslim dan Nonmuslim Dalam Kitab Al-Musāwah Al-Insāniyyah Karya ‘Ali Jum’ah. *Syariah: Journal of Fiqh Studies*, 1(1), 1–20.

- Geertz, C. (2013). *Agama Jawa: Abangan, santri, priyayi dalam kebudayaan Jawa. (No Title)*.
- Ghofur, A., Ghulam, Z., & Subahri, B. (2022). Nangeleh: Kajian Filosofis dan Psikologi Dakwah Petani Pandalungan. *Dakwatuna: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi Islam*, 8(1), 75. <https://doi.org/10.54471/dakwatuna.v8i1.1559>
- Giddens, A., & Griffiths, S. (2006). *Sociology. Polity*.
- Habib, M., & Nasional, U. (n.d.). <http://jurnal-sdm.blogspot.com/2009/04/teori-budaya-organisasi.html> Mustopo, M. Habib. 1983. 1–16.
- Imarah, M. (1998). *Perang Terminologi Islam versus Barat. terj. Musthalah Maufur Jakarta*.
- Kemendikbud. (2023). *KBBI VI. Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud*. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>
- Kistanto, N. H. (2017). Tentang Konsep Kebudayaan. *Sabda : Jurnal Kajian Kebudayaan*, 10(2), 1–11. <https://doi.org/10.14710/sabda.v10i2.13248>
- Koentjaraningrat, K. (2010). *Manusia dan kebudayaan di Indonesia. [Humans and culture in Indonesia]. Jakarta: Djambatan*.
- Kroeber, A. L., & Kluckhohn, C. (1952). Culture: A critical review of concepts and definitions. *Papers. Peabody Museum of Archaeology & Ethnology, Harvard University*.
- Luthfi, K. M. (2016). Islam Nusantara: Relasi Islam dan Budaya Lokal. *SHAHIH: Journal of Islamicate Multidisciplinary*, 1(1), 1–12. <https://doi.org/10.22515/shahih.v1i1.53>
- Madjid, N. (2008). *Islam Doktrin dan Peradaban, Paramadina Bekerjasama dengan Dian Rakyat, Jakarta, Cet. Ke-6*.
- Musa, M. I., & others. (2015). Dampak pengaruh globalisasi bagi kehidupan bangsa Indonesia. *Jurnal Pesona Dasar*, 3(3).
- Nawiyanto. (2012). Berakhirnya Frontir Pertanian: Kajian Historis Wilayah Besuki, 1870-1970. *Jurnal Masyarakat Dan Budaya*, 14(1), 77–98. <https://jmb.lipi.go.id/jmb/article/view/88>
- Paparang, S. R., & Pasande, P. (2019). *Ilmu Budaya Dasar: Memahami Relasi, Adaptasi, & Interaksi dalam Masyarakat*. purnama.pasande@gmail.com.
- Permusyawaratan, M., & Republik, R. (1978). www.hukumonline.com. 1977–1979.
- Peursen, C. A. van, & Hartono, D. (1976). *Strategi kebudayaan. (No Title)*.
- Qomar, M. (2015). Islam Nusantara Sebagai Subject Dalam Islamic Studies: Lintas Diskursus Dan Metodologis. *El Harakah: Jurnal Budaya Islam*,

- 17(2), 198–217. <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/infopub/article/view/3345/pdf>
- Ritaudin, M. S. (2017). Rekonstruksi Politik Egalitarianisme Bangsa Perspektif Model Negara Madinah. *Kalam*, 6(1), 151. <https://doi.org/10.24042/klm.v6i1.399>
- Sahal, A., & Aziz, M. (2015). Islam Nusantara Dari Ushul Fiqh hingga Paham Kebangsaan. *Bandung: Mizan Pustaka*, 2012.
- Sedyawati, E. (2018). *Pengertian Dan Domain Warisan Budaya Takbenda*. Direktorat Warisan Dan Diplomasi Budaya. [https://warisanbudaya.kemdikbud.go.id/?tentang&active=pengertian dan domain warisan budaya takbenda](https://warisanbudaya.kemdikbud.go.id/?tentang&active=pengertian%20dan%20domain%20warisan%20budaya%20takbenda)
- Suaedy, A. (2018). *Gus Dur, islam Nusantara dan Kewarganegaraan Bineka, Penyelsaian Konflik Aceh dan Papua 1999-2001*.
- Subahri, B., Arif, A., Nuha, U., Islam, A., & Lumajang, S. (2022). *Budaya Pandalungan Sebagai Media Pendidikan Egaliter*. 3(02), 204–218.
- Suharyono, A., & Amien, M. (2013). Pengantar Filsafat Geografi. *Yogyakarta: Penerbit Ombak*.
- Sunyoto, A. (2020). *ATLAS WALISONGO: Buku Pertama yang mengungkapkan Wali Songo Sebagai Fakta Sejarah* (Cetakan XI). Pustaka IIMaN.
- Sutarto, A. (2006). Sekilas Tentang Masyarakat Pandalungan. *Jelajah Budaya*, 1–7. http://repositori.kemdikbud.go.id/1103/1/Masyarakat_Pandhalungan.pdf
- Syihab, M. A., & Asy'ari, H. S. (1994). Perintis Kemerdekaan Indonesia. *Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta Dan TIP*.
- Tylor, E. B. (2011). Primitive culture: Researches into the development of mythology, philosophy, religion, language, art, and custom, Vol 1 (7th ed.). In *Primitive culture: Researches into the development of mythology, philosophy, religion, language, art, and custom, Vol 1 (7th ed.)*. <https://doi.org/10.1037/13484-000>
- Van Der Kroef, J. M. (1951). The term Indonesia: Its origin and usage. *Journal of the American Oriental Society*, 71(3), 166–171.
- Wijaya, T. (2020). *Hajar Aswad dan Cara Rasulullah Atasi Perselisihan Masyarakat Quraisy*. NU Online. <https://islam.nu.or.id/sirah-nabawiyah/hajar-aswad-dan-cara-rasulullah-atasi-perselisihan-masyarakat-quraisy-9i4Bj>

Lampiran

- Dokumentasi Observasi Tradisi *Sandingan Malam Jum'at* Legi





- Transkrip wawancara observasi dengan informan¹:

Peneliti : Bagaimana sejarah terbentuknya kebudayaan Pandalungan?
 Informan : *Kulo kirang semerap kapan entene Pandalungan niku. Tirose tiang sepah, asale Pandalungan rumiyen amergi tiang Jawi kaleh Madunten orep engkang bebarengan. Keranten saking jaman kolo bendu Londo, katah tiang madunten di pindah teng Jawi, tiang Jawi di pindah teng madunten. Saking meniko dados sebabe muncul budaya Pandalungan kolo wau.*

Peneliti : Bagaimana asal usul dan prosesi tradisi sandingan malam jum'at legi?
 Informan : *Poro sepuh nyeritakaken sak derenge Islam dugi, tradisi sandingan meniko tradisi ingkang dados rituale umat Hindu-Jawi. Tradisi meniko ingkang nyalap sajen (sajian) nalliko sampun masuk dinten kemis masyarakat percados poro ahli kubur wangsul dateng griyone. Kersane mboten ganggu seng orep, masyarakat ngelaksanakaken tradisi sandingan nyalap sajen isi maeman engkang dikersoi ahli kubur sakjeke uripe. Naliko Islam dugi, tradisi kesebut namung dirubah coro pengaosane damel sholawat, tahlil kalih khotmil Qur'an. Nembe tigang doso (30) tahunan niki sandingan di laksanakan, keranten riyen sempet mboten di amalaken (laksanakan) masyarakat. Tigang (3) tokoh masyarakat berperan dumateng tradisi kesebut, meniko alm. bpk Kyai Bahrul Ulum, alm. bpk Chayyun, alm. bpk Sunar. Saking tigang tokoh kesebut, sakmeniko tradisi di amalaken masyarakat Pandalungan Senduro.*

Peneliti : Bagaimana kondisi geografis Lumajang sebagai wilayah Pandalungan?
 Informan : *Lumajang enten dateng lereng gunung Semeru. Gunung Semeru sakmeniko enten teng kecamatan Senduro dados salah satune tempat seng dianggep suci kaleh masyarakat Lumajang, terutami umat Hindu sakmeniko yakin dumateng Dewa-Dewa engkang enten teng puncak Gunung Semeru. Kondisi Lumajang khusus Senduro seng enten teng lereng Semeru dadosaken sedanten masyarakate nggaduh pendamelan tani. Lemah teng Lumajang khusus Senduro niku lumintu, saben tahun saget panen hasil tani kalihan sumber aire mboten nate kering.*

Peneliti : Bagaimana kondisi sosial masyarakat Pandalungan Lumajang khususnya di Senduro?
 Informan : *Sakmeniko Senduro dados simbole kerukunan keranten pemeluk Islam, Hindu kaleh agomo lintune saget rukun. Kerukunan sampun dados tradisi masyarakat Pandalungan Senduro, keranten masyarakat sampun lami urip bebarengan benten agomo, suku, kalian tradisinipun. Masyarakat Senduro ngutamaken kerukunan, gotong royong, seduluran, kalihan mboten mandang derajat.*

¹ Wawancara observasi dengan Bapak Syamsul Hadi tanggal 28 Maret 2024

- Kabeh sifat niku enten teng tradisi Sandingan, Sonjo, kalihan Ater-ater.*
- Peneliti : Apa yang bapak ketahui tentang egaliter atau kesetaraan?
 Informan : *Setara niku nggeh gotong royong, mboten mandang derajate tiang, sedanten mungguhe gusti Allah niku sami mas.*
- Peneliti : Bagaimana cara menerapkan kesetaraan tersebut?
 Informan : *Kesetaraan iku tercermin nang tradisi-tradisi wau mas, tradisi Sandingan, Sonjo kalihan Ater-ater. Tradisi-tradisi niku gambaraken carane kerukunan, seduluran, mboten mandang derajate tiang-tiang. Selain dados bentuk kesetaraan, tradisi kolowau masuk dateng bentuk rasa syukure masyarakat dumateng seng kuoso, gusti Allah ta'ala.*
- Peneliti : Kalau dalam hubungan sosial misalnya dalam satu keluarga, bagaimana penerapan kesetaraanya?
 Informan : *Umume kesetaraan masyarakat niku teng tradisi-tradisi kolowau, semua kalangan tumut sedanten teng prosesine, perangkat desa, pns, petani dan seluruh lapisan masyarakat tumut ngelaksanaaken tradisi-tradisi niku. Lek teng keluarga kulo kirang paham kesetaraane model pripun, keranten kulo kyambek kaleh estri kulo sedantenepun dikerjaaken bareng-bareng. Misale tindak kebun, pendamelan tani kulo kerjaaken bareng-bareng, kulo seng motong klaras gedang (daun pisang tua), estri kulo seng nglempaaken kersane mboten kleleran godonge (daunnya).*
- Peneliti : Bagaimana dengan prinsip kesetaraan atau egaliter yang ada di kebudayaan Pandalungan?
 Informan : *Prinsipe nggeh orep masyarakat Pandalungan iku ndak luput teko kerukunan. kerukunan sebabe teko kabeh masyarakat derajate podo, lek ono masalah ngutamakne rundingan (musyawarah), sabar lan wani marang keapikan, adil, rukun karo seduluran. Kabeh iku wes dadi ajiane wong Senduro teko tuturane poro wini sepuh.*